KABUPATEN MANGGARAI
1958
LPPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
KABUPATEN MANGGARAI
2022
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Katedral No. 2 Ruteng Telp. (0385) 22153

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

INSPEKTUR DAERAH KAB. MANGGARAI,

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI INSPEKTORAT DAERAH

Dra. Fransiska N. Ngarung
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199303 2 010

KATA PENGANTAR

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu daerah otonom yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

Berbagai rencana, kiat dan strategi disusun dan dilaksanakan untuk menghantar dan membebaskan masyarakat dari berbagai ketertinggalan, tersirat dalam Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai 2021 – 2026, yaitu "Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing**".**

Visi tersebut diwujudkan ke dalam 4 (empat) agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yaitu :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai patut berterima kasih kepada Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Pemerintah yang berkenan mengevaluasi laporan ini, baik dalam bentuk saran maupun arahan dalam rangka penyempurnaannya di masa – masa yang akan datang.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua komponen penyelenggara pembangunan daerah yang telah berkomitmen dan

bertanggungjawab secara bersama – sama untuk mewujudkan agenda pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita untuk terus berkarya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Memberkati.

Ruteng, 20 Maret 2023

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Hukum 1
B. Gambaran Umum Daerah 1
C. Gambaran Umum Demografis 9
D. Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah 10
E. Perencanaan Pembangunan Daerah 13
F. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 19
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 20
II. 1. Capaian Kinerja Makro 20
II. 2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 21
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran 21
1.1. Urusan Pendidikan 21
1.2. Urusan Kesehatan 23
1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27
1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 30
1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 31
1.6. Urusan Sosial 33
1.7. Urusan Tenaga Kerja 34
1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35
1.9. Urusan Pangan 36
1.10. Urusan Pertanahan 36
1.11. Urusan Lingkungan Hidup 38
1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 39
1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40
1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 41
1.15. Urusan Perhubungan 42
1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika 43
1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 44
1.18. Urusan Penanaman Modal 44
1.19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 45
1.20. Urusan Statistik 46
1.21. Urusan Persandian 46

1.22. Urusan Budaya 47
1.23. Urusan Perpustakaan 47
1.24. Urusan Kearsipan 48
1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan 49
1.26. Urusan Pertanian 49
1.27. Urusan Pariwisata 50
1.28. Urusan Industri 51
1.29. Urusan Perdagangan 52
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 53
2.1 Urusan Pendidikan 53
2.2 Urusan Kesehatan 64
2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69
2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 79
2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 83
2.6 Urusan Sosial 88
2.7 Urusan Tenaga Kerja 92
2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 98
2.9 Urusan Pangan 101
2.10 Urusan Pertanahan 102
2.11 Urusan Lingkungan Hidup 103
2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 105
2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 106
2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 108
2.15 Urusan Perhubungan 111
2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika 113
2.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 119
2.18 Urusan Penanaman Modal 123
2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 124
2.20 Urusan Statistik 125
2.21 Urusan Persandian 126
2.22 Urusan Budaya 127
2.23 Urusan Perpustakaan 130
2.24 Urusan Kearsipan 132
2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan 135
2.26 Urusan Pertanian 136
2.27 Urusan Pariwisata 137
2.28 Urusan Industri 138
2.29 Urusan Perdagangan 140
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 143
3.1 Perencanaan dan keuangan 143
3.2 Pengadaan 144

3.3 Kepegawaian 145
3.4 Manajemen keuangan 146
3.5 Transparansi dan partisipasi publik 147
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 148
BAB III TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN 258
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan 258
A. Dinas Pertanian 258
3.2 Tugas Pembatuan Provinsi Yang Dilaksanakan 260
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 261
4.1 Urusan Pendidikan 261
4.2 Urusan Kesehatan 263
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 269
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 272
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 274
4.6 Urusan Sosial 278
BAB V PENUTUP 281

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data administrasi wilayah Kabupaten Manggarai	2
Tabel 1.2	Rata – rata kelembaban udara per bulan	8
Tabel 1.3	Kecepatan angin	8
Tabel 1.4	Struktur usia berdasarkan jenis kelamin	9
Tabel 1.5	Sebaran penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin	9
Tabel 1.6	Penduduk menurut tingkat pendidikan	10
Tabel 1.7	Perangkat Daerah	10
Tabel 1.8	Pengelompokan Program Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	16
Tabel 1.9	Jumlah kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	17
Tabel 1.10	Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	18
Tabel 2.1	Perjanjian kinerja perubahan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	148
Tabel 2.2	Skala Kategori Peringkat Kinerja Kabupaten Manggarai	153
Tabel 2.3	Rata-rata Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan Tahun Pelajatan 2021/2022	165
Tabel 2.4	Penanganan PMKS Kabupaten Manggarai tahun 2022	173
Tabel 2.5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2022	176
Tabel 2.6	Nilai Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas	180
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 (*Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)*	192
Tabel 2.8	Produksi Perikanan Tahun 2019-2022	193
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Industri pengolahan)*	194
Tebal 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *((Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)*	195
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)*	197
Tabel 2.12	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km) Tahun 2020-2022	201
Tabel 2.13	Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022	202
Tabel 2.14	Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat Tahun 2020-2022	210
Tabel 2.15	Data Bantuan Bahan Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2018-2022	213

Tabel 2.16 Data Bantuan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2018-2022 214
Tabel 2.17 Status IDM Kabupaten Manggarai Tahun 2022 216
Tabel 2.18 Hasil Evaluasi RB Kabupaten/Kota Se-NTT Tahun 2022 224
Tabel 2.19 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT Tahun 2022 226
Tabel 2.20 Indikator Indeks Profesionalitas ASN 231
Tabel 2.21 Realisasi Indeks SPBE dari tahun 2020 s/d 2022 232
Tabel 2.22 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 255
Tabel 2.23 Keterkaitan antara Sasaran dan Program dengan Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 256

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2022 162
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat dan Provinsi..... 163
Grafik 2.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai ... 164
Grafik 2.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai..... 164
Grafik 2.5 Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan 165
Grafik 2.6 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai Dengan UHH Provinsi NTT dan Kabupaten Terdekat..... 168
Grafik 2.7 IDG Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2021 174
Grafik 2.8 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2022 176
Grafik 2.9 Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2022 195 178
Grafik 2.10 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Manggarai 183
Grafik2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT..... 189
Grafik 2.12 PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.) 190
Grafik 2.13 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km) Tahun 2020-2022 201
Grafik 2.14 TPT Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022..... 211
Grafik 2.15 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022..... 220

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyusunan LPPD Tahun 2022 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

B. Gambaran Umum Daerah

1. Letak Wilayah

   Kabupaten Manggarai berada di Pulau Flores bagian barat yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara geografis terletak di antara 8°14'27,32" LS - 8^{0}54'57,17"^{0} LS dan 120°.13'41,34"-120°32"47,22" BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia)

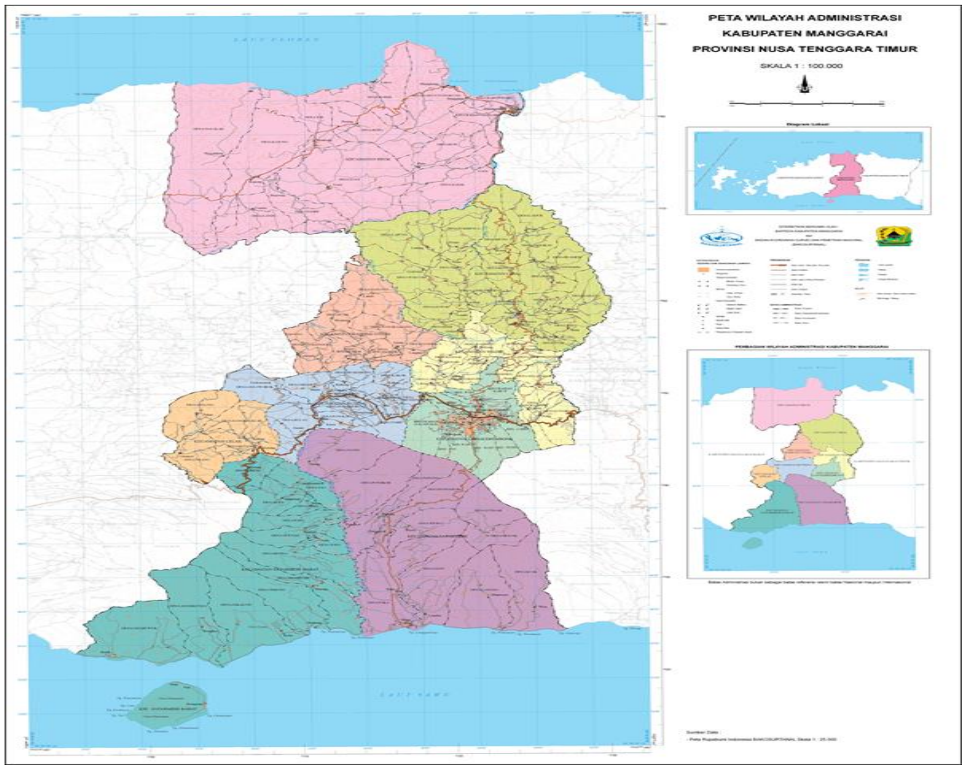

2. Batas Wilayah

   Batas – batas wilayah Kabupaten Manggarai adalah :

   a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur
   c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
   d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu

3. Luas Wilayah

   Luas Wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 Km² yang terdiri dari daratan di Pulau Flores dan Pulau Mules dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Secara administratif Kabupaten Manggarai dibagi terdiri dari 12 Kecamatan, 145 Desa, 26 Kelurahan dan 52 Desa Persiapan, secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Administrasi Wilayah Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	*2*	*3*	*4*
01.	Kecamatan Ruteng	Keputusan Gubernur Kepala Daerah	1. Kelurahan Wae Belang 2. Desa Cumbi

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
		Tingkat I NTT, tanggal 28 Februari 1962, No. Pem.66/I/2, dan No. Pem.66/I/32, tanggal 20 Juli 1963 tentang Pembagian Wilayah-wilayah Administratif Kecamatan dalam Kabupaten Manggarai di NTT	3. Desa Kakor 4. Desa Pong Murung 5. Desa Bulan 6. Desa Pong Lao 7. Desa Beo Rahong 8. Desa Golo Worok 9. Desa Meler 10. Desa Benteng Kuwu 11. Desa Belang Turi 12. Desa Pong Leko 13. Desa Rai 14. Desa Poco Likang 15. Desa Bangka Lao 16. Desa Compang Dalo 17. Desa Bea Kakor 18. Desa Compang Namut 19. Desa Pong Lale 20. Desa Persiapan Bung 21. Desa Persiapan Bangka Wela 22. Desa Persiapan Golo Cumang 23. Desa Persiapan Pong Ndung 24. Desa Persiapan Benteng Wake
02.	Kecamatan Satar Mese	sda	1. Desa Jaong 2. Desa Pongkor 3. Desa Wae ajang 4. Desa Papang 5. Desa Wewo 6. Desa Lungar 7. Desa Mocok 8. Desa Koak 9. Desa Langgo 10. Desa Legu 11. Desa Paka 12. Desa Tal 13. Desa Golo Lambo 14. Desa Ngkaer 15. Desa Umung 16. Desa Tado 17. Desa Gara 18. Desa Golo Muntas 19. Desa Ponggeok 20. Desa Iteng

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
			21. Desa Satar Loung 22. Desa Lolang 23. Desa Ulu Belang 24. Desa Persiapan Ulungali 25. Desa Persiapan Bangka Gonggor 26. Desa Persiapan Pongmeleng 27. Desa Persiapan Ulu Koak 28. Desa Persiapan Bangka Redeng 29. Desa Persiapan Satarloleng 30. Desa Persiapan Kaca 31. Desa Persiapan Nanga Woja
03.	Kecamatan Cibal	sda	1. Kelurahan Pagal 2. Desa Nenu 3. Desa Rado 4. Desa Wudi 5. Desa Welu 6. Desa Golo 7. Desa Barang 8. Desa Perak 9. Desa Bea mese 10. Desa Langkas 11. Desa Ladur 12. Desa Kentol 13. Desa Riung 14. Desa Pinggang 15. Desa Lando 16. Desa Gapong 17. Desa Golo Ncuan 18. Desa Persiapan Lura 19. Desa Persiapan Benteng Todo 20. Desa Persiapan Liang Tongkeng 21. Desa Persiapan Golo Roci 22. Desa Persiapan Bangka Gumbang
04.	Kecamatan Reok	sda	1. Kelurahan Reo 2. Kelurahan Mata Air 3. Kelurahan Baru 4. Kelurahan Wangkung 5. Desa Robek 6. Desa Ruis 7. Desa Bajak 8. Desa Watu Baur 9. Desa Salama 10. Desa Watu Tango

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
			11. Desa Persiapan Ruis Timur
05.	Kecamatan Langke Rembong	Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1992 Tentang Peningkatan Status Eks Perwakilan Kecamatan Ruteng Menjadi Kecamatan Langke Rembong	1. Kelurahan Golo Dukal 2. Kelurahan Wali 3. Kelurahan Karot 4. Kelurahan Pitak 5. Kelurahan Lawir 6. Kelurahan Pau 7. Kelurahan Waso 8. Kelurahan Watu 9. Kelurahan Mbaumuku 10. Kelurahan Tenda 11. Kelurahan Carep 12. Kelurahan Compang Carep 13. Kelurahan Laci Carep 14. Kelurahan Satar Tacik 15. Kelurahan Poco Mal 16. Kelurahan Bangka Nekang 17. Kelurahan Rowang 18. Kelurahan Bangka Leda 19. Kelurahan Compang Tuke 20. Kelurahan Tadong
06.	Kecamatan Wae Ri'i	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan Wae Ri'i	1. Desa Satar Ngkeling 2. Desa Lalong 3. Desa Poco 4. Desa Wae Mulu 5. Desa Ndehes 6. Desa Golo Cador 7. Desa Longko 8. Desa Ranggi 9. Desa Compang Ndehes 10. Desa Bangka Jong 11. Desa Bangka Kenda 12. Desa Golo Mendo 13. Desa Golo Wuas 14. Desa Wae Rii 15. Desa Ranaka 16. Desa Golo Watu 17. Desa Benteng Poco 18. Desa Persiapan Golo Ling 19. Desa Persiapan Bangka Wade 20. Desa Persiapan Bangka Nderu 21. Desa Persiapan Compang Rua 22. Desa Persiapan Compang Kaweng
07.	Kecamatan Satar Mese Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2007	1. Desa Hilihintir 2. Desa Bea Konda 3. Desa Golo Ropong

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
		Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Rahong Utara	4. Desa Terong 5. Desa Ceka Luju 6. Desa Satar Luju 7. Desa Satar Lenda 8. Desa Satar Ruwuk 9. Desa Nuca Molas 10. Desa Borik 11. Desa Cambir Leca 12. Desa Wongka 13. Desa Persiapan Denge 14. Desa Persiapan Luju Mas 15. Desa Persiapan Muku Tee 16. Desa Persiapan Hilihintir Selatan 17. Desa Persiapan Pasir Putih 18. Desa Persiapan Bea Terong 19. Desa Persiapan Lereng
08.	Kecamatan Lelak	sda	1. Desa Bangka Lelak 2. Desa Gelong 3. Desa Urang 4. Desa Ketang 5. Desa Pong Ompu 6. Desa Bangka Dese 7. Desa Nati 8. Desa Ndiwar 9. Desa Bangka Tonggur 10. Desa Lentang 11. Desa Persiapan Redo 12. Desa Persiapan Wae Nanga 13. Desa Persiapan Raong 14. Desa Persiapan Watu Weri
09.	Kecamatan Rahong Utara	sda	1. Desa Buar 2. Desa Benteng Tubi 3. Desa Compang Dari 4. Desa Dimpong 5. Desa Bangka Ajang 6. Desa Liang Bua 7. Desa Tengku Lese 8. Desa Golo Langkok 9. Desa Pong Lengor 10. Desa Manong 11. Desa Bangka Ruang 12. Desa Wae Mantang 13. Desa Persiapan Compang Ntala 14. Desa Persiapan Cunca Lega 15. Desa Persiapan Bangka Putuk 16. Desa Persiapan Golo Wangko

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
			17. Desa Persiapan Mbau Langke
10.	Kecamatan Reok Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Cibal Barat	1. Desa Kajong 2. Desa Lante 3. Desa To,e 4. Desa Sambi 5. Desa Nggalak 6. Desa Loce 7. Desa Lemarang 8. Desa Torong Koe 9. Desa Paralando 10. Desa Rura 11. Desa Persiapan Benteng Loce 12. Desa Persiapan Kajong Timur 13. Desa Persiapan Kajong Barat 14. Desa Persiapan Pasat
11.	Kecamatan Cibal Barat	sda	1. Desa Timbu 2. Desa Golo Woi 3. Desa Bangka Ara 4. Desa Wae Renca 5. Desa Wae Codi 6. Desa Latung 7. Desa Compang Cibal 8. Desa Lenda 9. Desa Bere 10. Desa Golo Lanak 11. Desa Persiapan Compang Bere 12. Desa Persiapan Golo Taas 13. Desa Persiapan Golo Lada 14. Desa Persiapan Bea Denger 15. Desa Persiapan Madona
12	Kecamatan Satar Mese Utara	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai.	1. Desa Renda 2. Desa Todo 3. Desa Gulung 4. Desa Popo 5. Desa Lia 6. Desa Kole 7. Desa Ling 8. Desa Nao 9. Desa Cireng 10. Desa Ruang 11. Desa Mata Wae 12. Desa Persiapan Compang Wotol 13. Desa Persiapan Compang Repok 14. Desa Persiapan Ndajang

Sumber data : Dinas PMD, 2023

4. Geologi dan Topografi

a) Komposisi Jenis tanah

1) Latosol : 53,357 km² (31,96%)
2) Mediterian : 60,984 km² (36,53%)
3) Litosol : 52,601 km² (31,51%)

b) Ketinggian

1) 0–100 m dpl : 28.512 Ha (17,08 %)
2) 100–500 m dpl : 64.362 Ha (38,55 %)
3) 500–1000 mdpl : 56.528 Ha (33,86 %)
4) >1000 m dpl : 17.540 Ha (10,51 %)

c) Kemiringan Tanah

1) $0 – 2^0$: 5.621 Ha (3,37 %)
2) $2 – 15^0$: 18.732 Ha (11,22%)
3) $15 – 40^0$: 52.986 Ha (31,74%)
4) $> 40^0$: 89.603 Ha (53,67%)

d) Klimatologi

Secara umum Kabupaten Manggarai mengalami 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata 373,317 mm^3. Rata-rata bulan basah setiap tahun yakni 6 (enam) bulan.

- Kelembaban Udara.

Tabel 1.2
Rata – rata kelembaban udara per bulan

Januari	: 94%	Mei	: 81%	September	: 77 %
Pebruari	: 87%	Juni	: 81%	Oktober	: 70 %
Maret	: 90%	Juli	: 78 %	Nopember	: 86 %
April	: 86%	Agustus	: 85 %	Desember	: 87%

Sumber data ; Bappelitbang, 2023

- Kecepatan angin

Tabel 1.3
Kecepatan angin

- Januari	: 11 knots	- Juli	: 7 knots
- Pebruari	: 9 knots	- Agustus	: 7 knots
- Maret	: 8 knots	- September	: 8 knots
- April	: 8 knots	- Oktober	: 9 knots
- Mei	: 8 knots	- Nopember	: 8 knots
- Juni	: 7 knots	- Desember	: 9 knots

Sumber data ; Bappelitbang, 2023

C. Gambaran Umum Demografis

1. Jumlah Penduduk

   Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai (Data Konsolidasi Bersih Semester II) Tahun 2022 adalah 326.737 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebayak 163.504 orang dan perempuan sebanyak 163.233 orang.

2. Struktur Usia

Tabel 1.4
Struktur usia berdasarkan jenis kelamin

No.	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	11.784	10.931	22.715
2	5 – 9	16.812	16.070	32.882
3	10 – 14	18.500	17.539	36.039
4	15 – 19	15.680	15.597	31.277
5	20 – 24	18.155	18.109	36.264
6	25 – 29	14.733	14.745	29.478
7	30 – 34	11.547	12.178	23.725
8	35 – 39	10.628	11.258	21.886
9	40 – 44	9.770	10.190	19.960
10	45 – 49	8.526	9.281	17.807
11	50 – 54	7.706	8.259	15.965
12	55 – 59	7.013	7.240	14.253
13	60 – 64	4.975	4.982	9.957
14	65– 69	3.350	3.199	6.549
15	70-74	2.027	1.900	3.927
16	75-79	1.358	1.078	2.436
17	>79	940	677	1.617
	Total	163.504	163.233	326.737

Sumber data : Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

3. Sebaran Penduduk

Tabel 1.5
Sebaran penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Wae Rii	15.205	15.144	30.349
2	Ruteng	21.971	22.073	44.044
3	Satar Mese	18.637	17.917	36.554
4	Cibal	13.766	13.751	27.517
5	Reok	9.780	9.717	19.497
6	Langke Rembong	31.745	32.531	64.276
7	Satar Mese Barat	10.297	10.087	20.384

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
8	Rahong Utara	11.812	11.997	23.809
9	Lelak	6.512	6.301	12.813
10	Reok Barat	7.700	7.677	15.377
11	Cibal Barat	7.848	7.903	15.751
12	Satar Mese Utara	8.231	8.135	16.366
Total		163.504	163.233	326.737

Sumber data ; Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

4. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.6
Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	70.655
2	Tidak tamat SD	50.525
3	Tamat SD/sederajat	100.493
4	Tamat SLTP/sederajat	35.823
5	Tamat SLTA/sederajat	49.518
6	Tamat D-I/II	1.080
7	Tamat Diploma III/Sarmud	3.734
8	Tamat Diploma IV/S1	14.510
9	Tamat S2	378
10	Tamat S3	21
	Total	326.737

Sumber data ; Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

D. Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah.

Tabel 1.7
Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nama	Jumlah Personil
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum	1 1 -
3.	Staf Ahli	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1

No	Perangkat Daerah	Nama	Jumlah Personil
		2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan , Perekonomian dan Pembangunan	1
		3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1
4.	Sekretariat Daerah	1. Bagian Pemerintahan	9
		2. Bagian Adm. Kesejahteraan Sosial	6
		3. Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	12
		4. Bagian Adm. Perekonomian	
		5. Bagian Adm. Pembangunan	10
		6. Bagian Organisasi	9
		7. Bagian Hukum	9
		8. Bagian Umum	5
		9. Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	21
		10. Bagian Kerjasama	6
			6
5.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	24
6.	Inspektorat	Inspektorat Kabupaten	28
7.	Dinas	1. Dinas Pendidikan	1.857
		2. Dinas Kesehatan	837
		3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72
		4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39
		5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	31
		6. Dinas Sosial	28
		7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
		8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
		9. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
		10. Dinas Lingkungan Hidup	49
		11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22
		12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
		13. Dinas Perhubungan	37
		14. Dinas Komunikasi dan Informatika	24
		15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39
		16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31
		17. Dinas Perikanan	30

No	Perangkat Daerah	Nama	Jumlah Personil
		18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	52
		19. Dinas Peternakan	28
		20. Dinas Perdagangan	24
8.	Badan	1. Badan Perencanaan , Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	40
		2. Badan Keuangan dan Aset	44
		3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	32
		4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	20
		5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23
		6. Badan Pendapatan Daerah	30
9.	Kantor	1. RSUD Ruteng	373
10.	Kecamatan	1. Kecamatan Cibal	30
		2. Kecamatan Cibal Barat	16
		3. Kecamatan Langke Rembong	126
		4. Kecamatan Lelak	10
		5. Kecamatan Rahong Utara	11
		6. Kecamatan Reok	34
		7. Kecamatan Reok Barat	17
		8. Kecamatan Ruteng	22
		9. Kecamatan Satar Mese	27
		10.Kecamatan Satar Mese Barat	14
		11.Kecamatan Satar Mese Utara	17
		12.Kecamatan Wae Rii	25
12.	Sekretariat KPUD		4
Total			4.430

2. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   a. Pendapatan

      Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.1.112.498.294.818,69.- atau sebesar 96,85 % dari target pendapatan sebesar Rp. 1.148.633.546.856.- Capaian target pendapatan ini ditunjang oleh seluruh komponen pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

      1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi sebesar Rp.110.628.187.541,69.-, meliputi:
         - Pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 17.599.050.545,64.-
         - Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 6.627.969.044.-

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.371.631.127,65.-
- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 83.029.536.824,40.-

2) Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 928,295,624,485.-. yang terdiri dari:
   - Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp.902.068.026.862,-
   - Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.26.227.97.623,-
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.73.574.482.792,-

b. Belanja

Realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.1.127.108.988.701,94,- dari target sebesar Rp. 1.203.443.264.459,- yang terdiri dari :

1) Belanja operasi sebesar Rp.769.450.722.785,96,- dari target anggaran belanja sebesar Rp.832.537.175.122,-
2) Belanja Modal sebesar Rp.169.206.541.293,98,- dari target anggaran sebesar Rp.180.784.326.029,-
3) Belanja tidak terduga sebesar Rp.5.329.997.314,- dari target anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,-
4) Belanja Transfer sebesar Rp.183.121.763.308,- dari target anggaran sebesar Rp.183.121.763.308,-

c. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan pembiayaan, yang meliputi:
   - SILPA sebesar Rp. 68.559.000.049.- dari target anggaran sebesar Rp. 68.559.000.049.-
   - Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 6.250.717.554.- dari target anggaran sebesar Rp. 6.250.717.554.-
2) Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi penyertaan modal daerah sebesar Rp.19.300.000.000.- dari anggaran sebesar Rp.20.000.000.000.-

E. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Kemajuan pembangunan kabupaten Manggarai yang telah dicapai sampai tahun 2022 sudah cukup baik yang ditunjukkan melalui indikator capaian kinerja, namun belum maksimal sesuai dengan standar pelayanan minimal pada beberapa indikator strategis. Berbagai kesenjangan ditemukan untuk menjadi agenda prioritas pemecahannya pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi pembangunan daerah diinventarisasi permasalahan pokok sebagai berikut :

- Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat Manggarai;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan dengan angka capaian pada indikator nasional.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Manggarai : **"MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING"**

- **Manggarai** artinya, memiliki makna spasial sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan dan memiliki makna masyarakat beserta sosial budaya Manggarai yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.
- **Maju** artinya, Kondisi perbaikan atau peningkatankualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis. Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal dan kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- **Adil** artinya, Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan. Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpaadanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan. Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat. Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi

masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan dan Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan

- **Berdaya Saing artinya** Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi. Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Misi Pembangunan

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai yang menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu :

PERTAMA	:	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
KEDUA	:	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
KETIGA	:	Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup
KEEMPAT	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Tabel 1.8
Pengelompokan Program Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7
2	Dinas Kesehatan	5
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	3
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
8	Dinas Sosial	5
9	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	7
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10
12	Dinas Lingkungan Hidup	9
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
16	Dinas Perhubungan	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5
21	Dinas Perikanan	4
22	Dinas Peternakan	5
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6
24	Sekertariat Daerah	3
25	Sekretariat DPRD	2
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3
28	Badan Pendapatan Daerah	2
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2
30	Inspektorat	3
31	Kecamatan Langke Rembong	5
32	Kecamatan Ruteng	5
33	Kecamatan Satar Mese	5
34	Kecamatan Reok	5
35	Kecamatan Cibal	5
36	Kecamatan Wae Rii	5
37	Kecamatan Satar Mese Barat	5
38	Kecamatan Rahong Utara	5
39	Kecamatan Lelak	5

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program
40	Kecamatan Reok Barat	5
41	Kecamatan Cibal Barat	5
42	Kecamatan Satar Mese Utara	5
43	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	6
	TOTAL	209

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Tabel 1.9
Jumlah kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17
2.	Dinas Kesehatan	15
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	11
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10
8.	Dinas Sosial	11
9.	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	14
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18
12.	Dinas Lingkungan Hidup	12
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
16.	Dinas Perhubungan	15
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13
21.	Dinas Perikanan	10
22.	Dinas Peternakan	14
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11
24.	Sekertariat Daerah	19
25.	Sekretariat DPRD	11
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13
28.	Badan Pendapatan Daerah	9
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9
30.	Inspektorat	10
31.	Kecamatan Langke Rembong	10

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan
32.	Kecamatan Ruteng	10
33.	Kecamatan Satar Mese	9
34.	Kecamatan Reok	11
35.	Kecamatan Cibal	9
36.	Kecamatan Wae Rii	9
37.	Kecamatan Satar Mese Barat	10
38.	Kecamatan Rahong Utara	10
39.	Kecamatan Lelak	10
40.	Kecamatan Reok Barat	10
41.	Kecamatan Cibal Barat	10
42.	Kecamatan Satar Mese Utara	10
43.	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	10
	TOTAL	501

c. Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Tabel 1.10

Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	67
2.	Dinas Kesehatan	53
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	14
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	60
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23
8.	Dinas Sosial	25
9.	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	25
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43
12.	Dinas Lingkungan Hidup	26
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39
16.	Dinas Perhubungan	28
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	33
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23
21.	Dinas Perikanan	24
22.	Dinas Peternakan	27
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25
24.	Sekertariat Daerah	64
25.	Sekretariat DPRD	28
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	52

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan
	Pengembangan Daerah	
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	55
28.	Badan Pendapatan Daerah	27
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27
30.	Inspektorat	28
31.	Kecamatan Langke Rembong	18
32.	Kecamatan Ruteng	29
33.	Kecamatan Satar Mese	16
34.	Kecamatan Reok	22
35.	Kecamatan Cibal	20
36.	Kecamatan Wae Rii	16
37.	Kecamatan Satar Mese Barat	19
38.	Kecamatan Rahong Utara	20
39.	Kecamatan Lelak	19
40.	Kecamatan Reok Barat	21
41.	Kecamatan Cibal Barat	32
42.	Kecamatan Satar Mese Utara	22
43.	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	26
	TOTAL	1.255

F. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Keputusan Bupati Manggarai nomor 100 Tahun 2020 telah membentuk tim penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Manggarai.

SPM mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik bagi Pemerintah Daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan, khususnya terhadap urusan wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat. SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah juga menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,01	65,83	1,26
2	Angka Kemiskinan	71.030	69.680	-1,901
3	Angka Pengangguran	3,70	3,50	-5,405
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,30	2,21	70
5	Pendapatan Perkapita	15,11	15,72	4,037
6	Ketimpangan Pendapatan	0,308	0,291	-5,519

Sumber data : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2023

II.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1.1 Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja kunci keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 5.075 ---------- x 100 % 12.402	40,921 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan 39.342 ---------- x 100 % 41.923	93,843 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan 17.511 ---------- x 100 % 22.227	78,783 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja kunci keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan 39 ---------- x 100 % 245	15,918 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

1.2 Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan --- Jumlah Penduduk di Kabupaten 208 --- 326.737	0,064	Dinas Kesehatan	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi --- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten 1 --- x 100 % 2	50 %	Dinas Kesehatan	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan --- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten 5.069 ---x100% 6.073	83,468 %	Dinas Kesehatan	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan --- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 5.913 --- x100% 6.040	97,897 %	Dinas Kesehatan	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar --- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten 6.009	100 %	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		----------x100% 6.009			
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten 25.375 ---------- x100% 27.934	90,839 %	Dinas Kesehatan	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten 33.358 ---------- x100% 36.297	91,903 %	Dinas Kesehatan	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten 74.045 ----------x100% 210.615	35,157 %	Dinas Kesehatan	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten 8.988 ---------- x 100% 24.486	36,707 %	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten 12.097 ---------- x100% 92.860	13,027 %	Dinas Kesehatan	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten 1.313 ---------- x100% 1.374	95,56 %	Dinas Kesehatan	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten 487 ---------- x100% 575	84,696 %	Dinas Kesehatan	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten 318 ---------- x100% 1.676	18,974 %	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten 5.794 ---------- x100% 7.515	77,099 %	Dinas Kesehatan	

1.3 Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----------x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 0,62 ha ---------- x100% 6,08 ha	10,197 %	Dinas PUPR	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) 0,44 ha ---------- x100% 17,04 ha	2,582 %	Dinas PUPR	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) ---------- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 14.330,9 ha ---------- x100% 19.833 ha	72,528 %	Dinas PUPR	

4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten. ---------- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut 81.176 ---------- x100% 94.598	85,812 %	Dinas PUPR	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----------x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten 78.636 ---------- x100% 94.598	83,126 %	Dinas PUPR	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya - ----------x 100 % Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku 41 ---------- x 100 % 41	100 %	Dinas PUPR	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan keseluruhan diwilayah Kabupaten 952,131 km ---------- x100% 1.959,794 km	48,583 %	Dinas PUPR	

8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten 0 ----------x100% 0	0 %	Dinas PUPR	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 271 ---------- x 100 % 271	100 %	Dinas PUPR	

1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 5 ---------- x 100 % 11	45,455 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0 %	Sda	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 4,60 ha ---------- x 100 % 41,80 ha	11,005 %	Sda	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten 5.164 Unit ---------- x100% 69.439 unit	7,437 %	Sda	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten 64.275 unit ---------- x100% 69.439 unit	92,563 %	sda	

1.5 Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk X 100% 124 / 124 x100%	100 %	Sat Pol PP dan Damkar	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi X 100% 12 / 49 x100%	24,49 %	Sat Pol PP dan Damkar	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	160 orang	BPBD	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	160 orang	BPBD	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6 orang	BPBD	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah +	44,44 %	Sat Pol PP dan Damkar	

		Jumlah layanan pemadaman di KabKota dalam tingakt waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/kota 4 ---------- x100% 9			
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15 menit	Sat Pol PP dan Damkar	

1.6 Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis X 100% 115 ----------x100% 115	100 %	Dinas Sosial	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosisal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100% Populasi korban bencana alam dan social didaerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daeah kabupaten kota 16.167 ----------x100% 16.167	100 %	Dinas Sosial	

1.7. Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x100% = 5 / 14 x100%	35,714 %	Dinas PMKUT	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x100% = 635 / 4.500 x100%	14,111	Dinas PMKUT	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100 % = 3.097.18 / 4.500 x100%	68,826 %	Dinas PMKUT	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (pp/pkb, lks bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelolah yang layak / Jumlah perusahaan x100% = 10 / 300 x100%	3,333 %	Dinas PMKUT	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x 100% = 32 / 62 x100%	51,613 %	Dinas PMKUT	

1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----------x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD 60.485.000 ---------- x100% 1.013.321.501.151	0,006 %	Dinas P3A	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota -	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ---------- x 100 % Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yag menjadi kewenangan Kab/kota 29 ---------- x100% 29	100 %	Dinas P3A	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan 43 ---------- x 100.000 163.233	26,343	Dinas P3A	

1.9 Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan 67.282 ton ---------- x100% 70.210 ton	95,83 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

1.10 Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai pereuntukan ijin lokasi ---------- x 100 % Seluruh luas tanah yan diberikan ijin lokasi	0 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jlh penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100 % Jlh kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 %	Sda	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi ----------x100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	0 %	Sda	

4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterimaa lebih besar sama dengan 0,5 ha ---------- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform	0 %	sda	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas atanh yang dimanfaaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----------x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0 %	sda	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani ---------- x 100% Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani 2 ---------- x100% 10	20 %	sda	

1.11 Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219). = (50x 0,376)+ (93,82x 0,405)+ (73,89x 0,219) = 72,97 IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	72,98	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ---------- x100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota 26.904,15 m^3 ---------- x100% 297.254 m^3	9,051 %	sda	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota ----------x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 31 ---------- x100% 52	59,61 %	sda	

1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ---------- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun keatas 218.465 ---------- x100% 223.556	97,723 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiki KIA ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0 – 17 tahun 42.608 ---------- x100% 107.190	39,75 %	sda	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ---------- x 100% Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 81.993 ---------- x100% 116.171	70,58 %	sda	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah menafaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----------x 100% Jumlah OPD 0 ---------- x 100 % 43	0 %	sda	

1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun ---------- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) 21 ----------x100% 42	50 %	Dinas PMD	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun ----------x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) 0 ---------- x100% 99	0 %	sda	

1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR= $5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ ASFR i = $\frac{bi}{Pi} \times \frac{k}{f}$ = 5 x 417,003/1.000	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern ---------- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur 30.629 ----------x100% 49.303	62,124 %	sda	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ----------x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur 6.457 ----------x100% 49.303	13,097 %	sda	

1.15 Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan). ✓ IK1: (0,91667 x 70%) ✓ IK2: (0,33 x 30%) Ratio : 0,64 + 0,099 = 0,7406	0,7406	Dinas Perhubungan	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten /kota	Jumlah angkutan darat ---------- x 100% Panjang ruas jalan 46.214 ---------- x 100% 2.125,83	21,74 %	sda	

1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah OPD 8 ---------- x100% 43	18,605 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah layanan publik 7 ---------- x100% 164	4,268 %	sda	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ---------- x 100% Jumlah penduduk 202.608 ----------x100% 326.737	62,01 %	sda	

1.17 Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi 25 ---------- x100% 159	15,723 %	Dinas KUKM dan TK	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan 13 ---------- x100% 3.678	0,353 %	sda	

1.18 Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1))di kabupaten/kota ---------- x 100% jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota 1.396.803390.601 – 522,090,993,413 ---------- x100% 522,090,993,413	167,54 %	Dinas PMPTSP	

1.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota 7.101 ----------x100% 94.280	7,532 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabuaten/kota ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota 15.337 ----------x100% 94.280	16.268 %	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	16	sda	

1.20 Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah OPD 43 ----------x100% 43	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah OPD 43 ---------- x100% 43	100 %	Sda	

1.21 Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah area per keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian 11 ---------- x100% 11	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

1.22 Urusan Budaya

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata 485 ---------- x100 % 485	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

1.23 Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan ---------- x 100% 5% Penduduk usia 15-69 tahun 16.018 ---------- 5% x 227.121	0,07	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\sum \frac{UPLM}{ALM}$ x100 % $\sum$ [0,0011018 + 0,1692585 + 0,0021393 + 0,0001408 + 0,0000 + 0,0071556 + 0,0047592] x 100	18,455	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

1.24 Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 = (0 + 100 + 100 + 0)/4	50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 = 0 + 24.994 + 24.994 + 24.994 + 0 + 1.785/ 6	12.794,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

1.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota ---------- x 100% Target Produksi Perikanan 7.663,86 Ton ---------- x100% 7.241,72 Ton	105,829 %	Dinas Perikanan	

1.26 Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100% Luas panen 123.583,70 ---------- x100% 23.348	529.312 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) –jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ---------- x 100% jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 7 - 8 ----------x100% 7	- 12,5 %	Dinas Peternakan	

1.27 Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun ke n - Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) / Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) x 100% (4.061 – 115) / 115 x100%	3.431,304 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun ke n - Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) / Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) x 100% (19.397– 12.521) / 12.521 x100%	54,916 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100%	0 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku / Total PDRB x100% 355,39 / 4.994,85 x100%	7,115 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD / Total PAD x100% 78.887.000 / 110.629.692.741,69 x100%	0,071 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

1.28 Urusan Industri

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n − jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n-1 ----------x 100% jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n-1 1.870 – 1.751 ---------- x100% 1.751	6,796 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan pemantauan ---------- x 100% Jumlah ijin yang dikeluarkan 69 ----------x100% 69	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan pemantauan ---------- x 100% Jumlah ijin yang dikeluarkan	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan : 25**%** 2. Kelengkapan informasi industri : a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10 %) b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10**%**) c. Informasi tenaga kerja (10**%**) d. Informasi investasi (10**%**) Akumulasi = 25 % + 40%	65 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

1.29 Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan ----------x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota 719 ----------x100% 4.774	15.061 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ---------- x 100% RDKK 6.037,6 ---------- x100% 49.308,84	12,244 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera pada tahun berjalan ----------x 100% Jumlah potensi UTTP wajib tera ulang diwilayah kabupaten/kota 82 ----------x100% 1.520	5,395 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.1 Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
	- Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		131 PAUD	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		9.465 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Tidak ada pembebasan biaya/beasiswa untuk PAUD sehingga pembebeasan biayanya berasal dari BOP PAUD sebanyak jumlah siswa yang ada di jenjang PAUD yaitu 9.465 siswa
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		698 Guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		582 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		224 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah		19 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
	- Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		223 Sekolah Dasar, 70 Sekolah (SMP)	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		44.935 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		23.818 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		3.324 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidikpada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1.725 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2.990 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1.677 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		780 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		261 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		181 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama - (Negeri dan Swasta)		192 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah sda. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1.010 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		421 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		190 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		49 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		9 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		22 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
	- Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		223 SD, 70 SMP	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		44.935 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		23.818 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		175 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		125 siswa	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		3.324 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		1.725 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2.990 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		1.677 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		780 pegawai	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		261 pegawai	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		181	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		192	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dansertifikat pendidik		1.010 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		421 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		190 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		49 guru	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat		9 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat		22 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
	- Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		39 PKBM, 1 SKB	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dariPemerintah Daerah		345	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		480 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		77 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/Persamaam	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		43 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		0 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		40 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

2.2 Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus /Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
	- Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1 unit	Dinas Kesehatan	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
	- Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		1 unit	Dinas Kesehatan	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Alat Kesehatan : 85 - Tablet Besi : 477.270 - Buku KIA : 5.069	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		800 orang bidan	Dinas Kesehatan	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Obat 5913 Oxytocin inject - Alat Kesehatan 110 Partus Set	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus /Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayananpersalinan sesuaistandar		785 Orang bidan	Dinas Kesehatan	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Obat 5673 Vit. K. inject - Alat Kesehatan 85 timbangan	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		785 orang bidan	Dinas Kesehatan	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Obat 16.097 Vit A - Alat Kesehatan 270 Alatatropometridan SDIDTK Kit	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		858 Orang bidan	Dinas Kesehatan	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus /Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		500 orang	Dinas Kesehatan	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Alat Periksa 149 - STIK GDS 2000 - POSBINDU KIT 20 - BODY FAT 71	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		25 orang	Dinas Kesehatan	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Alat Periksa 24	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		474 orang	Dinas Kesehatan	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Alat logistic 251.410	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus /Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		580 orang	Dinas Kesehatan	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistikkesehatan yang tersedia		Stik GDS 2000	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		580 orang	Dinas Kesehatan	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Sputum Pot 2100 - OAT I 192 - OAT II 4 - Slide 5688	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus /Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		29 orang	Dinas Kesehatan	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar				
	- Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		- Reagen HIV : 8.000 - HRV : 810	Dinas Kesehatan	
	- Jumlah SDM kesehatan untukpelayanan kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	

2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				
	- Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		6,08 Ha	Dinas PUPR	
	- Panjang sungai di kawasan permukimanyang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m)		3.800	Dinas PUPR	
	- Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		17,04	Dinas PUPR	
	- Panjang pantai dikawasan permukiman yg sda rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		13.985	Dinas PUPR	
	- Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Belum dilakukan pendataan	Dinas PUPR	
	- Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Belum dilakukan pendataan	Dinas PUPR	
	- Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota		Ada	Dinas PUPR	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
	- Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		6,08 Ha	Dinas PUPR	

	- Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		3.800	Dinas PUPR	
	- Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		17,04	Dinas PUPR	
	- Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresidi WS kewenangan kabupaten/kota (m)		13.985	Dinas PUPR	
	- Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Kegiatan perencanaan dilakukan secara manual karena belum ada dokumen rencana Tata Pengaturan Air/Tata pengairan/rencanan pengeloalaan SDA WS	Dinas PUPR	
	- Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Kegiatan perencanaan dilakukan secara manual karena belum ada dokumen rencana Tata Pengaturan Air/Tata pengairan/rencanan pengeloalaan SDA WS	Dinas PUPR	
	- Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		Ada	Dinas PUPR	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
	- Persentase Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----------x100% Panjang jaringan irigasi primer (m) 50.68,74 m ----------x100% 100.799 m	50,282 %	Dinas PUPR	
	- Persentase Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	10.573,78 m ----------x100% 25.442,20 m	41,56 %	Dinas PUPR	

	- Persentase panjang jaringan irigasi tersierdalam kondisi baik	749,5232 m ----------x100% 1.411 m	53,12 %	Dinas PUPR	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
	- Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Ada, tidak di Perdakan	Dinas PUPR	
	- Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perumda Tirta Komodo Kabupaten Manggarai	1 (Perumda Tirta Komodo)	Dinas PUPR	
	- Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perumda Tirta Komodo Kabupaten Manggarai	Ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Tidak ada	Dinas PUPR	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	- Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		46.346 unit	Dinas PUPR	
	- Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Belum ada IPLT, pengadaan lahan yang merupakan kewenangan propinsi sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi,dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah	Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses		46.346 unit	Dinas PUPR	

	sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanandasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				
	- Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----------x100% Jumlahrumah di wilayah pengembanan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha 43.346 ----------x100% 66.728	69,455 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----------x100% Jumlah rumah di wilayah pengembanan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha	0 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnyadiolah di IPALD ----------x100% Jumlahrumah di wilayah pengembanan SPALD-T	0 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memilikiakses unit pengelolahan setempat ----------x100%	0 %	Dinas PUPR	

		Jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembanan SPALD-S			
	- Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengekautan yang tersediat ----------x100% Jumla sarana pengangkutan yang dibutuhkankab/kota	0 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengelohan lumpur tinja yang tersedia ----------x100% Jumla kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkankab/kota	0 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambunan rumah yang tersambung dengan IPALD ----------x100% Jumlahrumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kot	0 %	Dinas PUPR	
	- Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangka septiknya sudah disedot ----------x100% Jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembangan SPALD-S	0 %	Dinas PUPR	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
	- Rasio bangunan gedung(kecuali rumah tinggaltunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah banguna gedung (kecualirumahtingal dan rumahderetsederhana) yang laikfungsi berlaku ----------x 100 % Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tingal dan rumah deret sederhana)	0	Dinas PUPR	
	- Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		41	Dinas PUPR	
	- Penetapan Peraturan Daerah Tentang Bangunan/Gedung		Perda No 3 Tahun 2013 tentang penggendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas PUPR	

	- Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Keputusan Bupati No Hk/202/2019 Tentang Pembentukan TABG Kabupaten Manggarai	Dinas PUPR	
	- Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Belum adanya Dokumen RDTR dan RTBL	Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Belum adanya Dokumen RDTR dan RTBL	Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Belum dilakukan pendataan	Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Belum dilakukan pendataan	Tidak ada	Dinas PUPR	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota				
	- Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		1.548,924 Km	Dinas PUPR	
	- Panjang jalan yang dibangun		km	Dinas PUPR	
	- Panjang jembatan yang dibangun		m	Dinas PUPR	
	- Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		km	Dinas PUPR	
	- Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		-	Dinas PUPR	
	- Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		72,71 Km	Dinas PUPR	
	- Panjang jembatan yang direhabilitasi		44 m	Dinas PUPR	
	- Panjang jalan yang dipelihara		m	Dinas PUPR	

	- Panjang jembatan yang dipelihara		m	Dinas PUPR	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
	- Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah tenaga kerja operator /teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Belum dilakukan pendataan	orang	Dinas PUPR	
	- Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	Belum dilakukan pendataan	orang	Dinas PUPR	
	- Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	SIPJAKI	Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah		Ada	Dinas PUPR	

	dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
	- Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada/tidak	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Tidak Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Tidak Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,		Ada, 73 Perusahaan	Dinas PUPR	

	bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	- Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Dinas PUPR	
	- Tersedianya data dan informasi hasil Pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		380 perusahaan	Dinas PUPR	
	- Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		380 perusahaan	Dinas PUPR	
	- Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		106 perusahaan	Dinas PUPR	
	- Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Tidak Ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah pemenuhan Komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		19 Perusahaan	Dinas PUPR	
	- Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada, 73 Perusahaan	Dinas PUPR	

	- Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak ada	Dinas PUPR	
	- Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Dinas PUPR	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		271	Dinas PUPR	

2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
	- Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	- Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	Sda	
	- Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	Sda	
	- Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	Sda	
	- Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	Sda	
	- Jumlah unit rumah korbanbencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	Sda	

	- Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	Sda	
	- Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	Sda	
	- Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		0	Sda	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
	- Jumlah rumah tanggapenerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Sda	
	- Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Sda	
	- Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uangsewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Sda	
	- Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Sda	

	- Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Sda	
	- Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	Sda	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
	- Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		41,80 ha	Sda	
	- Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		280 unit	Sda	
	- Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		59,8 ha	Sda	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
	- Jumlah rumah di kab/kota		69.439	Sda	
	- Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		16.223	Sda	
	- Jumlah rumah tidak layak huni		5.164	Sda	
	- Jumlah rumah yang tidak dihuni		0	Sda	
	- Rasio rumah dan KK	69.439 ---------- 94.598	0,734	Sda	
	- Jumlah rumah pembangunan baru		0	Sda	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				

	- Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		64.275 Unit	Sda	
	- Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		31.792 pelanggan	Sda	PDAM, DDA 2023
	- Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		0	Sda	

2.5 Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
	- Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		124 pengaduan	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		171 orang	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		6 orang	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		4 orang	Pol PP dan Damkar	
	- Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada 6 SOP	Pol PP dan Damkar	
	- Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	Pol PP dan Damkar	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
	- Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----------x100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 1 ----------x100% 1	100 %	BPBD	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----------x100% Seluruh penduduk di Kawasan rawan bencana 160 ----------x100% 7.950	0,20 %	BPBD	- 4 desa masing-masing 40 orang - Ds. Lalong : 1.763 - Ds. Salama : 1.9922 - Ds. Robek : 2.004 - Ds. Satar Lenda : 2.261
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	- Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang di susun ---------- x 100% Jumlah satudokumen KRB yang lengkap dan sudahdisahkan 1 ---------- x 100% 1	100 %	BPBD	
	- Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		0 %	BPBD	
	- Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		0 %	BPBD	
	- Persentase warga negara yang ikut pelatihan		0 %	BPBD	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		0 %	BPBD	
	- Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0 %	BPBD	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB 0 ---------- x 100% 0	0 %	BPBD	
	- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 6 ---------- x 100% 6	100 %	BPBD	
	- Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas aktif dalam penanggulangan darurat bencana ---------- x 100%	100 %	BPBD	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana 27 ---------- x 100% 27			
	- Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- x 100% Perkiraan korban keseluruhan dalm bencana 6 ---------- x 100% 6	100 %	BPBD	
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	- Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi padakondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) olehDinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan di kabupaten/kota		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	
	- Tersedianya pos sektor damkar yangdilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dikantor kecamatan		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	
	- Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bergantian (shift) di kantor kecamatan				
	- Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Ada	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	
	- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Tidak ada	Pol PP dan Damkar	

2.6 Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				
	- Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		1	Dinas Sosial	
	- Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		115	Dinas Sosial	
	- Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		115	Dinas Sosial	
	- Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		115	Dinas Sosial	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		14	Dinas Sosial	
	- Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		-	Dinas Sosial	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		-	Dinas Sosial	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	mendapatkan layanan penelusuran keluarga				
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		-	Dinas Sosial	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
	- Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		16.167 orang	Dinas Sosial	
	- Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		-	Dinas Sosial	
	- Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		16.167 orang	Dinas Sosial	
	- Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		25 orang	Dinas Sosial	

2.7 Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
	- Dokumen perencanaan tenaga kerjakabupaten/kota.		Tidak ada	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Tidak ada	sda	
	- Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		1	sda	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
	- Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBL kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ---------- x 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompeyensi maupun klister pada tahun n	0 %	sda	
	- Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- x 100% Jumlah instruktur bersertifikat seluruhnya pada tahun n	0 %	sda	
	- Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ---------- Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	0	sda	
	- Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ---------- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n 1 ---------- x 100% 4	25 %	sda	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ---------- x 100% Jumlah seluruh LPK yang terdata pada tahun n 1 ---------- x 100% 4	25 %	sda	
	- Jumlah penganggur yang dilatih		0 orang	sda	
	- Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n ---------- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	0 %	sda	
	- Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ---------- x 100% Jumlah lulusan pada tahun n	0 %	sda	
	- Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	0 %	sda	
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑ CPMI di latih ---------- x 100% ∑ CPMI terdaftar	0 %	sda	
	- Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		Tidak ada	sda	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja				

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ---------- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	0 %	sda	
	- Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		sda	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
	- Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ---------- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n 10 ---------- x 100% 300	3,333 %	sda	
	- Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ---------- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB 10 ---------- x 100% 300	3,333 %	sda	
	- Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		0 perusahaan	sda	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah ---------- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja 4 ---------- x 100% 4	100 %	sda	
	- Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ---------- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perushaan wajib lapor 24 ---------- x 100% 300	0,08 %	sda	
	- Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ---------- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n 13 ---------- x 100% 300	4,33 %	sda	
	- Jumlah mogok kerja		0	sda	
	- Jumlah penutupan perusahaan		0	sda	
	- Jumlah perselisihan kepentingan		0 %	sda	
	- Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	sda	
	- Jumlah perselisihan PHK	13 ---------- x 100% 300	4,33 %	sda	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		21 orang	sda	
	- Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	sda	
	- Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		12 LKS	sda	
	- Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ---------- x 100% Jumlah kasus perselisihan 12 ---------- x 100% 13	92,30 %	sda	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
	- Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		32 orang	sda	
	- Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		62 orang	sda	
	- Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		0	sda	
	- Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0	sda	
	- Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	sda	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		1 LPTKS	sda	
	- Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		10	sda	
	- Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		32	sda	
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	∑ CPM/CTKI yang mendpatan sosialisasi ---------- x 100% ∑ CPM/CTKI	0 %	sda	
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	∑ CPMI ---------- x 100% ∑ CPMI yang terdata	0 %	sda	
	- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	.∑ fasilitasi PMI yang dipulangkan ---------- x 100% ∑ PMI yang dipulangkan	0 %	sda	
	- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	.∑ PMI yang mendapatkan pendidikan TKI dan pelatihan kerja ---------- x 100% ∑ PMI /TKI	0 %	sda	
	- Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	.∑ PMI TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan ---------- x 100% ∑ PMI /TKI purna dan keluarganya	0 %	sda	
	- Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	.∑ LTSA yang terbentuk ---------- x 100% Jumlah daerah kantong PMI/ TKI	0 %	sda	

2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
	- Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		52 OPD	Dinas P3A	
	- Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ kota		-	Dinas P3A	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Dinas P3A				
	- Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0	Dinas P3A	
	- Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		0	Dinas P3A	
	- Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ---------- x 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten 29 ---------- x 100% 29	100 %	Dinas P3A	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0	Dinas P3A	
	- Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		0	Dinas P3A	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
	- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		0	Dinas P3A	
	- Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0	Dinas P3A	
	- Jumlah lembaga Layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	Dinas P3A	
	- Jumlah lembagaLayanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuankeuangan oleh pemerintahkabupaten/kota		0	Dinas P3A	
	- Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1 program	Dinas P3A	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					Perempuan
	- Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		6	Dinas P3A	
	- Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang dilayani ---------- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 43 ---------- x 100% 43	100 %	Dinas P3A	

2.9 Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				
	- Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Ada, 40 unit lumbung pangan masyarakat (LPM)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	- Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			sda	
	- Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		Tidak ada	sda	
	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			sda	
	- Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		Ada, Peta KetahananPangan (FSVA)	sda	
	- Tertanganinya kerawanan pangan		Tidak ada	sda	
	- Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Tidak ada	sda	
	- Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		Tidak ada	sda	

2.10 Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	- SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		Tidak ada	sda	
	- SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		Tidak ada	sda	
	- SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti RugiKepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Tidak ada	sda	
	- Dokumen Izin membuka tanah		Tidak ada	sda	
	- Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		Tidak ada	sda	

2.11 Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota				
	- Hasil perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan(ITH)	IKLH = (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+ (0,219xIKL) = (50x 0,376)+ (93,82x 0,405)+ (73,89x 0,219)	72,98	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota				
	- Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ---------- x 100% Total volume timbunan sampah Kabupaten /Kota 73,71 m3/hari ---------- x100% 814,395 m3/hari	9,05 %	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				
	- Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan pemerintahKab/ kota ---------- x 100 % Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan 31 ---------- x 100% 52	59,61 %	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) diKabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada ---------- x 100 % Jumlah kegiatan dan atau ijin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan permerintah kab/kota 2 ---------- x 100% 34	5,88 %	Dinas lingkungan hidup	
	- Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota		Tidak ada	Dinas lingkungan hidup	
	- Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Tidak ada	Dinas lingkungan hidup	
	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		Tidak ada	Dinas lingkungan hidup	
	- Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ---------- x 100 % Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 8 ---------- x 100% 8	100 %	Dinas lingkungan hidup	

2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perekaman KTP Elektronik				
	- Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ---------- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan 44.956 ---------- x 100% 44.956	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ---------- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan 70 ---------- x 100% 70	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ---------- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan 3.466 ---------- x 100% 3.466	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun ---------- x 100% .2 semester 2 ---------- x 100% 2	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Z				
	- Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		145 desa	Dinas PMD	
	- Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		135 desa /10 BKAD dan 1 BKAK	Sda	
	- Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		29 lembaga adat	Sda	
	- Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		140 BUM Desa 1.015 SPKP/UEP pada 167 desa/kel	Sda	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				
	- Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		145 desa	Dinas PMD	
	- Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlahdesa		135 desa /10 BKAD dan 1 BKAK	Sda	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang melakukan kerja sama antardesa tahun sebelumnya				
	- Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		145 LKD terdiri dari 3.974 jenis dan 68 LA	Sda	
	- Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		140 BUM Desa 1.015 SPKP/UEP pada 167 desa/kel	Sda	

2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)				
	- Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Tidak ada	Dinas P2KB	
	- Median Usia Kawin Pertama Perempuan(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	112.856 x 50 %	56.428	Dinas P2KB	
	- Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFRi = \frac{b_i}{p^f} \times k$ ASFR 15-19 = $\frac{425}{15.597}$	27,25 per 1.000 Perempuan	Dinas P2KB	
	- Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)	Jmlh masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK ---------- x 100% Jmlh sasaran masyarakat program KKBPK 9.496 ---------- x 100% 326.737	2,90 %	Dinas P2KB	
	- Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang		748 orang	Dinas P2KB	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK				
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)				
	- Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jmlh faskes yg melayani MKJP / Jmlh Faskes x 100% 25 / 25 x 100%	100 %	Dinas P2KB	
	- Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PA MKJP / Jumlah PUS x 100% 30.629 / 49.303 x 100%	62,124 %	Dinas P2KB	
	- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah Kampung KB Efektif / Jumlah Kampung KB x 100% 27 / 27 x 100%	100 %	Dinas P2KB	
	- Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah Akseptor Pasca persalinan / Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100% 2.902 / 3.315 x 100%	87,54 %	Dinas P2KB	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
	- Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	3.830 / 8.936 x 100%	42,86 %	Dinas P2KB	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Iuran ---------- x 100% Jumlah Keluarga PBI 2.902 ---------- x 100% 3.315	87,54 %	Dinas P2KB	

2.15 Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota				
	- Persentasetersedianya fasilitaspenyelenggaraanterminal penumpangangkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C ---------- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan 3 ---------- x 100% 3	100 %	Dinas Perhubungan	
	- Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang di uji pertahun ---------- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji 0 ---------- x 100% 2.300	0 %	Dinas Perhubungan	
	- Penetapan tarifangkutan orang antarkota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif angkutan darat ---------- x 100% Jumlah lintasan angkutan darat dalam Kab/Kota 66 ---------- x 100% 72	91,66 %	Dinas Perhubungan	
	- Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalanKabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota ---------- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota 1.423 ---------- x 100% 3.500	40,66 %	Dinas Perhubungan	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota				

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota ---------- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota 1.518 ---------- x 100% 3.500	40,66 %	Dinas Perhubungan	

2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	- Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo ---------- x 100% Jumlah OPD 0 ---------- x 100% 43	0 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang mengguakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo ---------- x 100% Jumlah PD 8 ---------- x 100% 43	18,60 %	Dinas Kominfo	
	- Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak ada	Dinas Kominfo	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015 ---------- x 100% Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah an pelayanan publik pada pemerinah daerah 8 ---------- x 100% 43	18,60 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ---------- x 100% Jumlah PD 6 ---------- x 100% 43	13,95 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai denganketentuan perundangundangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umu dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---------- x 100% Jumlah PD 29 ---------- x 100% 43	67,44 %	Dinas Kominfo	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ---------- x 100% Jumlah layanan 164 ---------- x 100% 164	100 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) manfaatkan sertifikat elektronik ---------- x 100% Jumlah layanan 1 ---------- x 100% 164	0,60 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---------- x 100% Jumlah sistem elektronik 164 ---------- x 100% 164	100 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ---------- x 100% Jumlah layanan publik dan layanan administrasi 7	4,26 %	Dinas Kominfo	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		---------- x 100% 164			
	- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ---------- x 100% Jumlah perangkat daerah 5 ---------- x 100% 43	11,62 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang yang menyimpan data di pusat ---------- x 100% Jumlah perangkat daerah 5 ---------- x 100% 43	11,62 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ---------- x 100% Jumlah perangkat daerah 0 ---------- x 100% 43	0 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ---------- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	0 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city ---------- x 100% Jumlah perangkat daerah 29 ---------- x 100%	67,44 %	Dinas Kominfo	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		43			
	- Persentase ASN pengelola TIK yangtersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelolah TIK yang tersertifikat kompentensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ---------- x 100% Jumlah ASN pengelolah TIK 0 ---------- x 100% 0	0 %	Dinas Kominfo	
	- Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e government	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021	Ada	Dinas Kominfo	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota				
	- Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	∑ komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ---------- x 100% ∑ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah 4 ---------- x 100% 7	57,14 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	∑ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan strategi komunikasi (strakom) ---------- x 100% ∑ konten informasi terkait program dan keijakan pemerintah dan pemerintah daerah 3 ---------- x 100% 3	100 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	∑ diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (strakom) dan SOP	27.90 %	Dinas Kominfo	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	---------- x 100% ∑ diseminasi dan layanan informasi publik 12 ---------- x 100% 43			

2.17 Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
	- Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerahkabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 25 ---------- x 100% 159	15,72 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada 12 ---------- x 100% 159	7,54 %	Dinas KUKM dan TK	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 26 ---------- x 100% 159	16,35 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ---------- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada 0 ---------- x 100% 159	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 0 ---------- x 100% 159	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menerbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 75 ---------- x 100% 159	47,16 %	Dinas KUKM dan TK	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 0 ---------- x 100% 159	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperas idengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 0 ---------- x 100% 159	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 50 ---------- x 100% 159	31,44 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada 0 ---------- x 100% 159	0 %	Dinas KUKM dan TK	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				
	- Rasio pertumbuhan wirausaha baruyang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ---------- x 100% Jumlah wirausaha baru	0,21 %	Dinas KUKM dan TK	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		786 ---------- x 100% 3.678			
	- Persentase jumlah usaha mikro yangdiinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro ya diinput ke dalam sistem data online (ODS) ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikat ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	0 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada 78 ---------- x 100% 3.665	2,12 %	Dinas KUKM dan TK	
	- Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada 0 ---------- x 100% 3.665	0 %	Dinas KUKM dan TK	

2.18 Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota				
	- PERDA mengenai pemberian fasilitas /intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota		Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019	Dinas PMPTP	
	- Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		Termuat dalam Peraturan Nomor 46 tahun 2019	sda	
	- Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /insentif pena-naman modal		1 dokumen	sda	
	- Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Tidak ada	sda	
	- Kegiatan pameran penanaman modal		Tidak ada	sda	
	- Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Tidak ada	sda	
	- Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal		1.948 izin	sda	
	- Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		1.948 izin	sda	
	- Laporan realisasi penanaman modal		Rp. 195.134.403.611	sda	
	- Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Tidak ada	sda	
	- Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		121 Perusahaan	sda	
	- Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota		1 dokumen	sda	

2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
	- Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		230	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		400	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan				
	- Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		24 Orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		1.540 Orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga				
	- Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi disatuan2 pendidikan		40 orang	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
	- Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		2	Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga	

2.20 Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
	- Tersedianya buku profil Daerah		Ada	Dinas Kominfo	
	- Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Tidak ada	Dinas Kominfo	
	- Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Tidak ada	Dinas Kominfo	
	- Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Tidak ada	Dinas Kominfo	
	- Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Ada	Dinas Kominfo	
	- Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		Tidak ada	Dinas Kominfo	
	- Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral		Tidak ada	Dinas Kominfo	

2.21 Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
	- Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanansinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ---------- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada 0 ---------- x 100% 0	0 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibandingjumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang merapkan SMKI dan diamankan sertiffikat elektronil atau aplikasi penyandian ---------- x 100% Jumlah SE yang ada 11 ---------- x 100% 11	100 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase sistemelektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ---------- x 100% Jumlah SE yang ada 0 ---------- x 100% 11	0 %	Dinas Kominfo	
	- Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruhtitik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ---------- x 100% Jumlah titik pada PHKS 0 ---------- x 100% 0	0 %	Dinas Kominfo	

2.22 Urusan Budaya

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya				
	- Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK :	958	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK - disebarluaskan : - dikaji : - dikayakan keberagamannya :	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang Dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		306	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Perlindungan cagar Budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum - Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Pemetaan SDM cagar budaya danpermuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

2.23 Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
	- Rasio ketercukupan Koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 55.303 ---------- x 100% 326.737	16,92 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya 2.338 ---------- x 100% 326.737	0,71 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 699 ---------- x 100% 326.737	0,21 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ---------- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 0 ---------- x 100% 383	0 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Jumlah Pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat		16.018	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
	- Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

2.24 Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
	- Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif	0 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif 24.994 ---------- x 100% 24.994	100 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ---------- x 100% Jumlah seluruh arsip statis 197 ---------- x 100% 197	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukan dalam SIKN mellui JIKN ---------- x 100% Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsipmerujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentangPedoman Pemusnahan Arsip	Belum dilakukan pemusnahan sesuai NSPK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Sudah sesuai NSPK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/ pembubaran perangkat daerah meruju kpada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atauPembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	- Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar PencarianArsip (DPA)		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK				
	- Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	1.761 izin	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap danBudidaya)kabupaten/kota				
	- Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP)		1.273 RT	Dinas Perikanan	
	- Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Jumlah TPI yang operasional ---------- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah 1 ---------- x 100% 1	100 %	sda	
	- Jumlah Izin UsahaPerikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		Tidak ada	sda	
	- Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		36 kelompok	sda	
	- Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi per tahun	282.350 ekor	sda	

2.26 Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
	- Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		450.654	Dinas Pertanian	
	- Prasarana pertanian yang digunakan		102	Dinas Pertanian	
	- Penerbitan izin usaha pertanian		0	Dinas Pertanian	
	- Persentaseprasarana yangdigunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ---------- x 100% Jumlah prasarana yang di bangun 102 ---------- x 100% 102	100 %	Dinas Pertanian	
	- Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ---------- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	0 %	Dinas Pertanian	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				
	- Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ---------- x 100% Luas area terkena bencana 12 ---------- x 100% 2.096,44 km^2	0,57 %	Dinas Peternakan	

2.27 Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
	- Jumlah entitas pengelolaan destinasi				
	- Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kota		16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		4.061	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah industri Pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri		10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Persentase tenaga kerja disektor parwisata yang disertifikasi		152	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Persentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----------x 100 % Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan 280 ----------x 100% 280	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	- Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		6 lokasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

2.28 Urusan Industri

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota				
	- Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Tidak ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				
	- Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		Tidak ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	- Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 69 ----------x 100% 69	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	- Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Tidak ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				

No	Indikator Kinerja KunciHasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di SIINAS ---------- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri 1 ----------x 100% 1.975	0,050 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2.29 Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
	- Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja ---------- x 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 2 ----------x 100% 2 Jumlah permohonan izin swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 45 ----------x 100% 45	100 % 100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TGD ≤ 5 hari kerja ---------- x 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG 2 ---------- X 100 % 2	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TGD ---------- x 100% Jumlah gudang yang ada di kab 0 ---------- X 100 % 0	0 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		a. 0 b. ... c. ...	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi - pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawsan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah ---------- x 100% Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) ---------- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterimadengan lengkap dan benar	0 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100%	Tidak ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Persentase koefisien variasi harga antar waktu		8,50 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk				
	- Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b+c} \times 100\%$ $\frac{6.037,6}{44.377,96 + 49.308,84} \times 100\%$	6,44 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
	- Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{82}{1.520} \times 100\ \%$	5,39 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	- Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Tidak ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

3.1 Perencanaan dan keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ---------- x100% Jumlah APBD 118.943.912.740 ---------- x100% 1.146.408.988.701,94	10,375 %	Badan Keuangan	
2	Rasio PAD	Jumlah PAD ---------- x100% Jumlah Pendapatan pada APBD 110.628.187.541,69 ---------- x100% 1.112.498.294.819	9,944 %	Badan Keuangan	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 2	Inspektorat	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 3	Inspektorat	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ---------- x100% Jumlah belanja APBD 957.902.447.407,96-183.121.727.308 ---------- x100% 1.127.108.988.701,94	68,741 %	Badan Keuangan	
6	Opini Laporan Keuangan	Tahun 2020 Tahun 2021	WTP WTP	Badan Keuangan	

3.2 Pengadaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- x100% Jumlah kontral keseluruhan tahun	0 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Surat keterangan
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 215 ----------x100% 368	58,424 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- x100% Total belanja langsung 185.543.756.264 ---------- x100% 1,132,928,772,819	16,377 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk_Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ---------- x100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) *185.543.756.264-183.344.399.103* ---------- x100% *183.344.399.103*	101,2 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	

3.3 Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ---------- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 961 ---------- x100% 648	148,302 %	BKPSDM	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.145 ---------- x 100% 1.609	71,162 %	BKPSDM	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 96 ---------- x 100% 1.145	8,384 %	BKPSDM	

3.4 Manajemen keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / Total belanja APBD) - 1x100 % (1.127.108.988.701,94 / 1.203.443.264.459) - 1x100 %	10,4244 %	Badan Keuangan	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD) - 1x100 % (110.629.692.741,69 / 121.176.876.649) - 1x100 %	8,704 %	Badan Keuangan	
3	Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	Ya Ya Ya Ya	Badan Keuangan	
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA / Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya X 100% 68.559.000.049 / 1.219.431.496.229 x 100%	5,622 %	Badan Keuangan	

3.5 Transparansi dan partisipasi publik

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus/ Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- x100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda 58.700.000 ---------- x100% 58.880.000	99,694 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- x100% total jumlah dokumen yang telah dirinci 5 ---------- x100% 9	55,556 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

4.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disajikan dalam laporan ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 dan merupakan Perjanjian Kinerja ke-1 periode RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Manggarai

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1			*2*		*3*	*4*
Tujuan	*1*	*Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	66,24
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,61
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,53
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,42
Sasaran	2	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masya-rakat/indeks minat baca	Angka	12
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehat-an masyarakat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	67,77
			6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melak-sanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100,00

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1			*2*		*3*	*4*
Sasaran	4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,056
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,19
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	64,00
Tujuan	*2*	*Meningkatnya Keberda-yaan Sosial Mayarakat*	Angka PMKS		Angka	19.089
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,84
Sasaran	7	Meningkatnya kesejah-teraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1,12
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	64,16
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	25,45
			14	Angka kasus kekera-san terhadap anak	Angka	0,019
Tujuan	*3*	*Meningkatnya Ketahan-an Sosial*	Angka konflik social		Angka	6
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)		Angka	97,12
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	13,86
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesi-vitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	6
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketang-guhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	23,74
Tujuan	*4*	*Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi*	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	4,93
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per pddk	10.125
			Laju Inflasi		Angka	2,00
Sasaran	14	Meningkatnya partumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	2,44
Sasaran	15	Meningkatnya partumbuhan sektor perikanan	20	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	2,44

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1			*2*		*3*	*4*
Sasaran	16	Meningkatnya partumbuhan sektor industry	21	Laju pertumbuhan sektor industri pengo-lahan	Angka	5,62
Sasaran	17	Meningkatnya partumbuhan sektor pariwisata	22	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	4,56
Sasaran	18	Meningkatnya partumbuhan sektor perdagangan	23	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	5,16
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	24	Persentase pening-katan realisasi PMDN	Persen	5,00
			25	Persentase pening-katan realisasi PMA	Persen	5,00
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	56,15
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	76,20
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	81,71
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	29	Rasio konekvitas	Angka	0,81
			30	Kinerja lalulintas	Angka	46,22
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	74,60
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	110,57
Tujuan	*5*	*Meningkatnya Pemerata-an Kesejahteraan*	Indeks Gini		Angka	0,289
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	90,00
			34	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	50,00
Tujuan	*6*	*Menurunnya Kemiskinan*	Tingkat Kemiskinan		Persen	19,47
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	3,09
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	90,75
			37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	78,092
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88,00

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1			*2*		*3*	*4*
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	22,00
Tujuan	*7*	*Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa*	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,601
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	42,06
Tujuan	*8*	*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,36
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	71,50
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,37
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,32
Sasaran	34	Meningkatnya pengelo-laan persampahan dan pengelolaan limba B3	44	Persentase sampah ter-tangani	Persen	20,97
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	26,13
Tujuan	9	*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profe-sional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik*	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai / Predikat	50,10 (CC)
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	63,10 (B)
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Perlu Perbaikan
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Sedang (0,565)
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,10
			53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71,00 (Sedang)
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut di atas adalah anggaran yang terdapat pada program-program strategis yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran sebesar Rp.652.702.567.342,00.

4.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi-Misi Kabupaten Manggarai selama periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai. Nilai akuntabilitas dari capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Tujuan dan IKU Sasaran Strategis.

Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD periode 2021-2026 mempunyai 9 Tujuan dengan 13 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan 37 Sasaran dengan 54 Indikator Kinerja Utama Sasaran yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Manggarai tahun 2022.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Kategori Peringkat Kinerja
Kabupaten Manggarai

No.	Interval Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	≥ 100	Memuaskan
2.	85 ≤ 99	Sangat Baik
3.	70 ≤ 84	Baik
4.	50 ≤ 69	Cukup
5.	< 50	Kurang

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
					2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	69,30	65,83	99,38	94,99

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
					2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Manusia							
		Rata-rata						99,38	94,99
		Kategori					SANGAT BAIK		SANGAT BAIK
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Mayarakat	Angka PMKS	Angka	19.089	17.089	16.299	85,38	95,38
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	66,02	64,58	98,09	97,82
		Rata-rata						91,74	96,60
		Kategori					SANGAT BAIK		SANGAT BAIK
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial	Angka	6	3	6	100,00	0,00
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	54,18	144,21	144,21
		Rata-rata						122,11	72,11
		Kategori					MEMUASKAN		BAIK
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,23	2,21	44,83	42,26
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	10.125	11.706	9.750	96,30	83,29
			Laju Inflasi	Angka	2,00	2,00	6,25	-112,50	-112,50
		Rata-rata						9,54	4,35
		Kategori					KURANG		KURANG
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Angka	0,289	0,276	0,291	99,31	94,57
		Rata-rata						99,31	94,57
		Kategori					SANGAT BAIK		SANGAT BAIK
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	17,12	19,84	98,10	84,11
		Rata-rata						98,10	84,11
		Kategori					SANGAT BAIK		BAIK
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Keman-dirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,650	0,618	102,83	95,08
		Rata-rata						102,83	95,08
		Kategori					MEMUASKAN		SANGAT BAIK
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	82,16	72,98	89,70	88,83
		Rata-rata						89,70	88,83

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
					2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Kategori					SANGAT BAIK		SANGAT BAIK
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerin-tahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	50,10 (CC)	60,10 (B)	53,27	106,33	88,64
		Rata-rata						106,33	88,64
		Kategori					MEMUASKAN		SANGAT BAIK
Rata-rata Tujuan 1 s/d 9								91,00	79,92
Kategori							SANGAT BAIK		BAIK

Ket: Indikator Kinerja Tujuan sebanyak 13 Indikator

Rata-rata capaian kinerja dari 9 (Sembilan) tujuan di atas adalah 91,00% kategori kinerja SANGAT BAIK dengan rincian sebanyak 3 (tiga) tujuan atau 33,33% kategori MEMUASKAN dan sebanyak 5 (lima) tujuan atau 55,6% kategori SANGAT BAIK dan 1 (satu) tujuan atau 11,11% kategori KURANG. Ke-9 tujuan ini diukur dengan masing-masing indikator dengan jumlah indikator sebanyak 13 indikator.

Dari 13 indikator kinerja tujuan tersebut, terdapat 4 (lima) indikator dengan kategori MEMUASKAN, 7 (tujuh) indikator kategori SANGAT BAIK dan 2 (dua) indikator dengan kategori KURANG.

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai terdiri dari 14 indikator yang diambil dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi Tahun 2022	% Capaian		Ket.
			Tahun 2022	Akhir RPJMD		Tahun 2022	Akhir RPJMD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	69,30	65,83	99,38	94,99	IK Tujuan
2	Prevalensi Stunting	Persen	19,40	9,40	16,24	116,30	27,27	IK Program
3	Angka PMKS	Angka	19.089	17.089	16.299	85,38	95,38	IK Tujuan
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	66,02	64,58	98,09	97,82	IK Tujuan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi Tahun 2022	% Capaian		Ket.
			Tahun 2022	Akhir RPJMD		Tahun 2022	Akhir RPJMD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
5	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	54,18	144,21	144,21	IK Tujuan
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,23	2,21	44,83	42,26	IK Tujuan
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	10.125	11.706	9.750	96,30	83,29	IK Tujuan
8	Indeks Gini	Angka	0,289	0,276	0,291	99,31	94,57	IK Tujuan
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	17,12	19,84	98,10	84,11	IK Tujuan
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,650	0,618	102,83	95,08	IK Tujuan
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	82,16	72,98	89,70	88,83	IK Tujuan
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	50,10 (CC)	60,10 (B)	53,27 (CC)	106,33	88,64	IK Tujuan
13	Nilai SAKIP	Angka	63,10	68,00 (B)	63,90 (B)	101,27	93,97	IK Sasaran
14	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	IK Sasaran
RATA-RATA						98,72	87,89	
KATEGORI						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah 98,72% kategori SANGAT BAIK, dengan rincian sebanyak 6 IKU atau 42,86 kategori MEMUASKAN, sebanyak 7 IKU atau 50,00% kategori SANGAT BAIK dan sebnayak 1 IKU atau 7,14% dengan kategori kinerja KURANG.

c. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,61	8,04	7,62	100,13	94,78
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,53	14,03	13,70	101,26	97,65
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,42	56,52	73,47	130,21	129,98
	Rata-rata Sasaran 1								*110,53*	*107,47*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	12	15	18,455	153,79	123,03
	Rata-rata Sasaran 2								*153,79*	*123,03*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	3	Meningkatnya derajat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	67,77	69,24	67,38	99,42	97,31

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		kesehatan masyarakat	6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksa-nakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100,00	100,00	16,67	16,67	16,67
	Rata-rata Sasaran 3								*58,05*	*56,99*
	Kategori								*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	4	Terkendalinya laju partum-buhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,056	2,00	2,09	98,59	95,75
	Rata-rata Sasaran 4								*98,59*	*95,75*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,19	9,75	16,05	174,66	164,63
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5	4	0	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 5								*87,33*	*82,31*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	6	Meningkatnya pemberda-yaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	64,00	100,00	16,58	25,91	16,58
	Rata-rata Sasaran 6								*25,91*	*16,58*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1,12	5,08	0,85	76,24	16,81
	Rata-rata Sasaran 7								*76,24*	*16,81*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	64,16	68,37	81,91	127,66	119,80
	Rata-rata Sasaran 8								*127,66*	*119,80*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	25,45	21,24	28,18	89,27	67,32
			14	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,019	0,014	0,025	68,61	21,69
	Rata-rata Sasaran 9								*78,94*	*44,51*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	13,86	67,87	18,095	130,56	26,66
	Rata-rata Sasaran 10								*130,56*	*26,66*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	6	3	6	100,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 11								*100,00*	*0,00*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,49 (Sedang)	0,66 (Sedang)	134,69	134,69
	Rata-rata Sasaran 12								*134,69*	*134,69*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	23,74	58,60	21,18	89,24	36,15
	Rata-rata Sasaran 13								*89,24*	*36,15*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	2,44	3,85	3,57	146,31	92,73
	Rata-rata Sasaran 14								*146,31*	*92,73*
	Kategori								*BAIK*	*CUKUP*
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	20	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	2,44	3,85	3,57	146,31	92,73
	Rata-rata Sasaran 15								*146,31*	*92,73*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	21	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	5,62	6,53	4,95	88,08	75,80
	Rata-rata Sasaran 16								*88,08*	*75,80*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	22	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	4,56	5,72	19,03	417,32	332,69
	Rata-rata Sasaran 17								*417,32*	*332,69*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	23	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	5,16	6,30	6,75	130,81	107,14
	Rata-rata Sasaran 18								*130,81*	*107,14*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	24	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	25,00	1,68	33,51	6,70
			25	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 19								*16,75*	*3,35*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	56,15	67,88	54,80	97,60	80,73
	Rata-rata Sasaran 20								*97,60*	*80,73*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	76,20	88,00	72,311	94,90	82,17
	Rata-rata Sasaran 21								*94,90*	*82,17*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	81,71	100,00	72,26	88,43	72,26
	Rata-rata Sasaran 22								*88,43*	*72,26*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhu-bungan	29	Rasio konekvitas	Angka	0,81	0,89	0,74	91,44	83,22
			30	Kinerja lalulintas	Angka	46,22	65,94	21,74	47,03	32,97
	Rata-rata Sasaran 23								*69,24*	*58,09*
	Kategori								*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	74,60	81,94	71,88	96,35	87,72
	Rata-rata Sasaran 24								*96,35*	*87,72*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	110,57	119,69	113,54	102,69	94,86
	Rata-rata Sasaran 25								*102,69*	*94,86*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	90,00	100,00	47,80	53,11	47,80
			34	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	50,00	70,00	0,35	0,71	0,50
	Rata-rata Sasaran 26								*26,91*	*24,15*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	3,09	2,08	3,50	86,83	31,88
	Rata-rata Sasaran 27								*86,83*	*31,88*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*KURANG*
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	90,75	94,75	94,37	103,99	99,60
			37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	78,092	89,872	83,13	106,45	92,49
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88,00	93,00	85,81	97,51	92,27
	Rata-rata Sasaran 28								*102,65*	*94,79*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	22,00	62,00	23,18	105,38	37,39
	Rata-rata Sasaran 29								*105,38*	*37,39*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	42,06	65,51	68,28	162,33	104,22
	Rata-rata Sasaran 30								*162,33*	*104,22*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	71,50	72,50	50,00	69,93	68,97
	Rata-rata Sasaran 31								*69,93*	*68,97*
	Kategori								*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,37	88,87	93,82	106,17	105,57
	Rata-rata Sasaran 32								*106,17*	*105,57*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,32	86,32	73,89	86,60	85,60
	Rata-rata Sasaran 33								*86,60*	*85,60*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persam-pahan dan pengelolaan limba B3	44	Persentase sampah tertangani	Persen	20,97	29,91	9,05	43,16	30,26
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	26,13	46,57	69,64	266,52	149,54
	Rata-rata Sasaran 34								*154,84*	*89,90*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	63,10 (B)	68,00 (B)	63,90 (B)	101,27	93,97
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	100,00	81,97
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Perlu Perbaikan	Baik	58.9308 B (Perlu Perbaikan)	100,00	100,00
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Sedang (0,727)	Tinggi (1,073)	0,546 (Rendah)	75,10	50,89
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 3	Level 2	66,67	66,67
	Rata-rata Sasaran 35								*90,51*	*82,25*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,10	3,00	1,76	83,81	58,67
			53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71,00 (Sedang)	83,00 (Tinggi)	47,73 (Sangat Rendah)	67,23	57,51
	Rata-rata Sasaran 36								*75,52*	*58,09*
	Kategori								*BAIK*	*CUKUP*
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00	84,50	84,54	105,68	100,05
	Rata-rata Sasaran 37								*105,68*	*100,05*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37									106,48	79,02
KATEGORI									MEMUASKAN	BAIK

Rata-rata capaian dari 37 sasaran sesuai tabel pengukuran tersebut di atas adalah 106,48% dengan kategori kinerja MEMUASKAN. Dari 37 sasaran tersebut terdapat 17 sasaran atau 45,95% kategori MEMUASKAN, sebanyak 11 sasaran atau 29,73% kategori SANGAT BAIK dan masing-masing sebanyak 3 sasaran atau 8,11% kategori BAIK, CUKUP dan KURANG.

URAIAN CAPAIAN KINERJA SESUAI *FORM* PENGUKURAN KINERJA

TUJUAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ketercapaian tujuan kinerja direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99,38% karegori capaian kinerja Sangat Baik.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

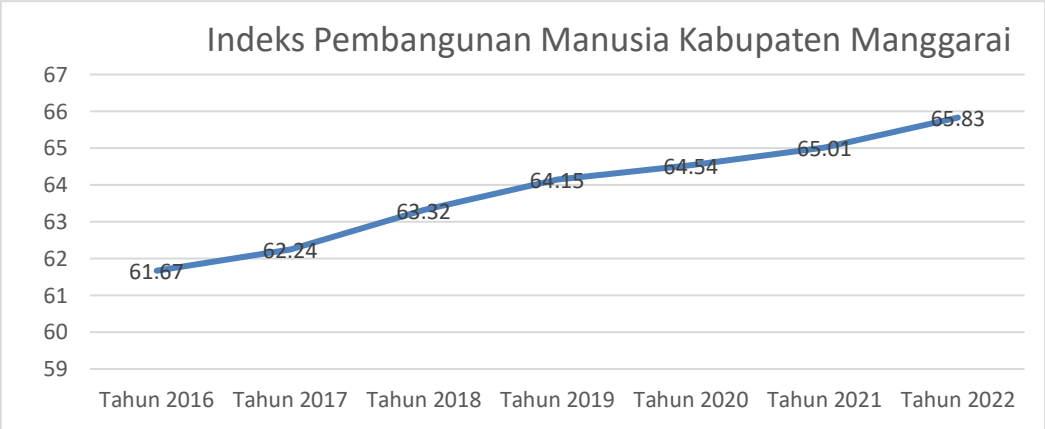

Berdasarkan grafik di atas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2016-2022 terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Mangarai masih pada indeks 61,67 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 65,83.

Realisasi 65,83 dari target 66,24 maka capaian kinerja sebesar 99,38% atau kategori kinerja Sangat Baik.

Tahun 2022 IPM Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-7 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Grafik 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai
Dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat dan Provinsi
Tahun 2020-2022

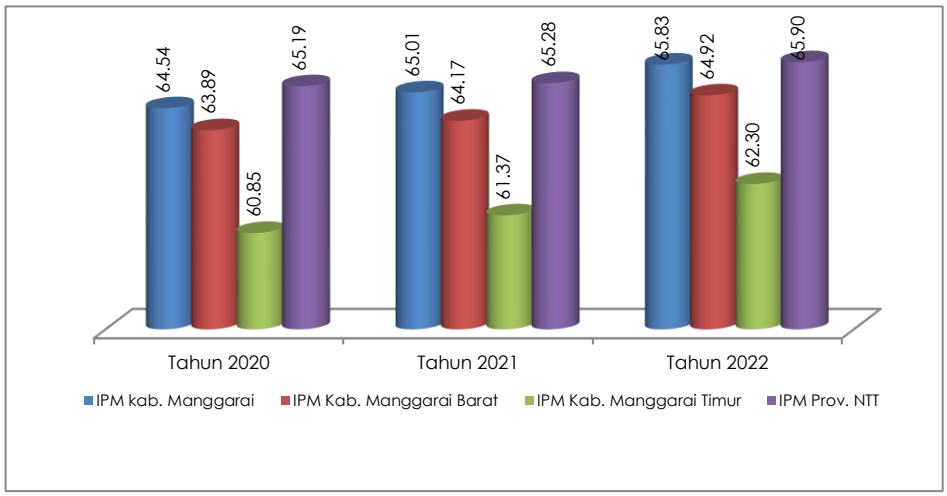

Sumber : BPS NTT, 2023

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA*, didukung oleh 6 (Enam) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*

Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS)

Indikator Haparan lama sekolah (HLS)

Indikator Rata-rata nilai ujian

Sasaran Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut adalah 110,53%, kategori capaian kinerja MEMUASKAN.

Rata-rata Lama Sekolah

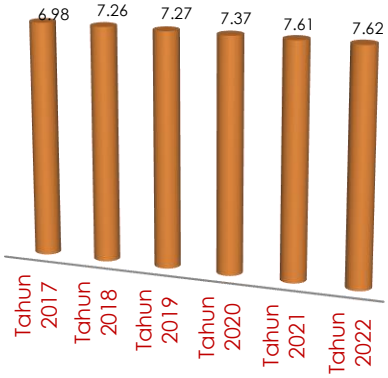

Target 7,61 → Realisasi 7,62 → Capaian 100,13%

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,61 tahun pada tahun 2021 menjadi 7,62 tahun pada tahun 2022. Angka ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah sampai pada pendidikan SMP Kelas 1 Semester 2.

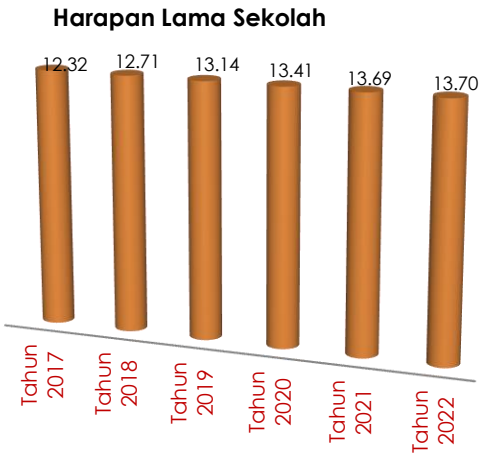

Target 13,53 → Realisasi 13,70 → Capaian 101,26%

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan nilai yang positif, dimana banyak penduduk Kabupaten Manggarai yang melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Adapun capaian tahun 2022 adalah 13,70 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa minimal pendidikan anak di Kabupaten Manggarai setara dengan Diploma 1.

Grafik 2.3
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Terdekat

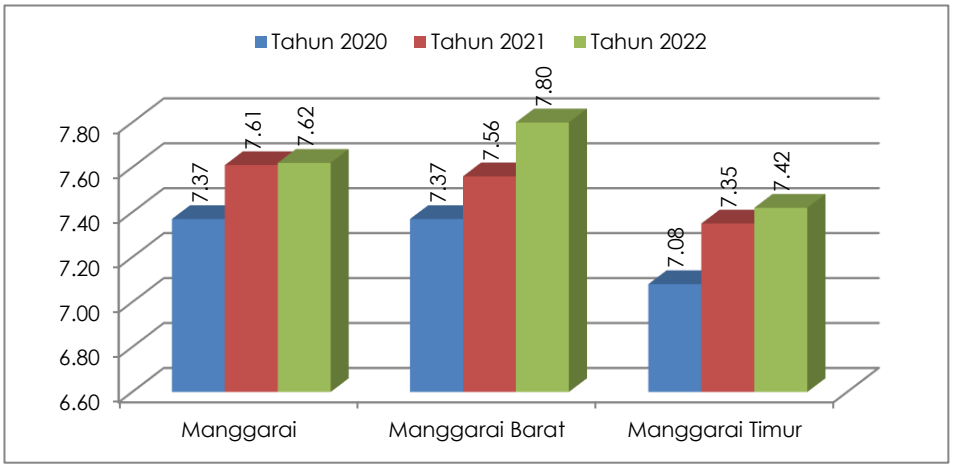

Sumber : BPS NTT, 2022

Grafik 2.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Dengan Kabupaten Terdekat

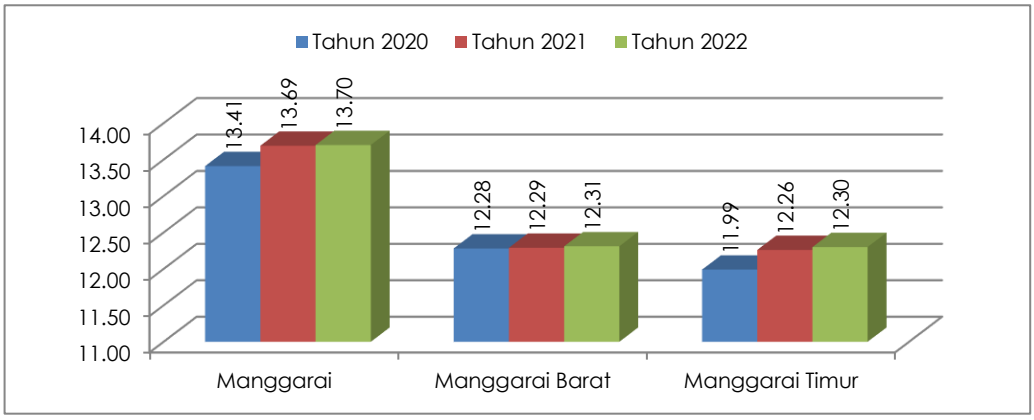

Sumber : BPS NTT, 2022

Keberhasilan Peningkatan Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal dimana salah satu solusi atau upayanya adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan melalui:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar maupun pendidikan nonformal/kesetaraan.
2. Pemberian bantuan kepada siswa-siswi baik pada satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal/kesetaraan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan

Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan untuk melayani penduduk di luar usia sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya baik pada jenjang Paket A setara SD dan Paket B Setara SMP.

Rata-rata Nilai Ujian, untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 73,47 dari target 56,42 atau 130,21%. Realisasi 73,47 diperoleh dari jenjang Pendidikan SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dengan rata-rata nilai mencapai 71,52 dan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA memperoleh nilai rata-rata sebesar 75,41.

Tabel 2.3
Rata-rata Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan
Tahun Pelajatan 2021/2022

No	Jenjang Pendidikan	Mata Pelajaran				Rata-rata
		Bindo	Bing	Matematika	IPA	
1	SD/MI	72,94	-	69,56	72,05	71,52
2	SMP/MTs	77,29	75,35	74,02	74,97	75,41
Rata-rata Nilai Ujian						73,47

Sumber : Dinas PPO, 2022

Grafik 2.5
Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan

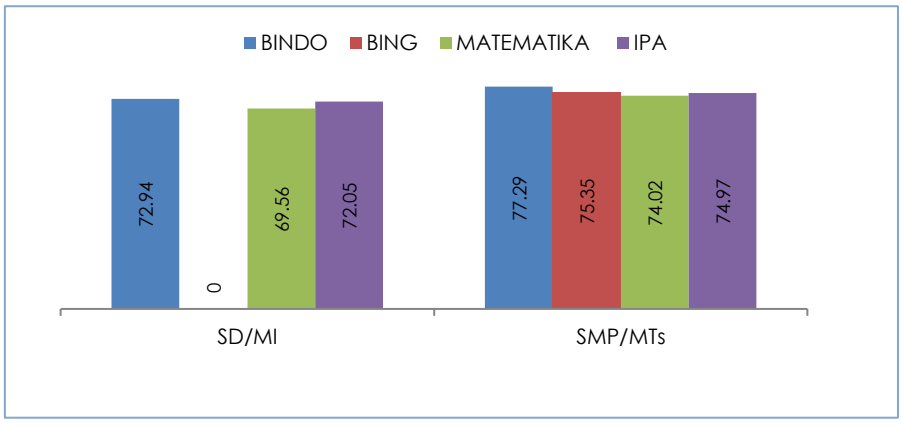

Sasaran "*Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	106.676.612.175,00	22.213.329.066,00	20,82
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.127.576.431,00	18.610.609.154,00	92,46
3	Program Pengembangan Kurikulum	72.718.100,00	70.427.700,00	96,85
Total Anggaran		126.876.906.706,00	40.894.366.130,14	32,23

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan" tidak lepas dari upaya konsistensi, kolaboratif dan terus berinovasi dalam melaksankan kebijakan-kebijakan pada bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Manggarai akan terus berupaya memastikan kualitas dan akses pelayanan bidang pendidikan bagi anak- anak Manggarai tetap terjamin.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat*

Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca

Indeks Literasi Masyarakat tahun 2022 mencapai angka 18,455 dari target 12 yang tertuang dalam dokumen RPJMD/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan tingkat capaian 153,79%, kategori kinerja MEMUASKAN.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur dalam pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Ket.
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,00110	
2	Ketercukupan koleksi	0,169258	
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,002139	
4	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,0001	
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP	-	
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi	0,0072	
7	Anggota perpustakaan	0,0048	
	Jumlah	0,18456 x 100	
Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca		18,455	

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

Sasaran "*Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1.136.227.800,00	1.123.695.770,00	98,90
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	74.935.000,00	74.895.000,00	99,95
Total Anggaran		1.211.162.800,00	1.198.590.968,84	98,96

Langka peningkatan Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca, yaitu:

→ Melakukan pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Sasaran 3 : *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*
Indikator Angka harapan hidup (AHH)

Indikator Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI

Sumber : MDA, BPS Kab. Manggarai, 2023

Target 67,77→Realisasi 67,38→Capaian 99,42%

Usia Harapan Hidup (UHH) atau juga sering disebut Angka Harapan Hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh seseorang/penduduk. Sesuai Data MDA yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2023, Angka Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah 67,38 tahun, berada di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi NTT yang mencapai 67,47 tahun, Kabupaten Manggarai Barat 67,73 dan Kabupaten Manggarai Timur 68,29 pada tahun yang sama.

Grafik 2.6
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai
Dengan UHH Provinsi NTT dan Kabupaten Terdekat

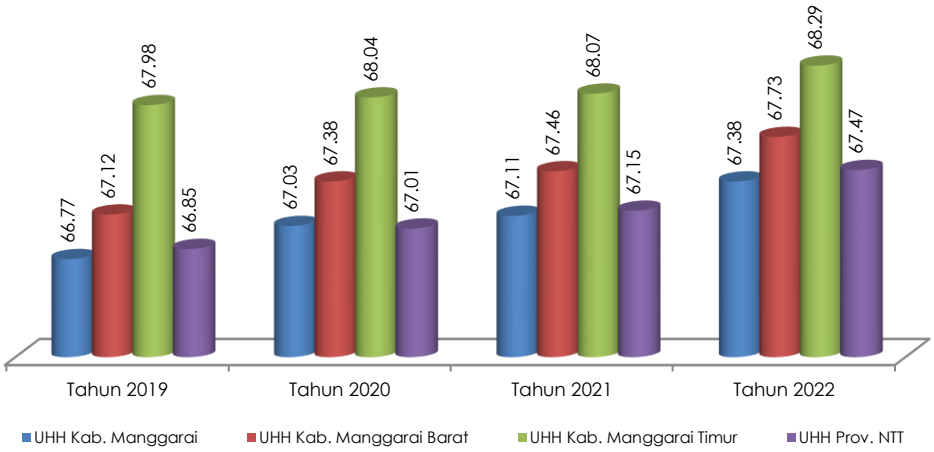

Angka Harapan Hidup Kabupaten Manggarai selama 4 (Empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 65,77 tahun 2019 menjadi 67,38 di tahun 2022.
Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai.

Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI
Target 100→Realisasi 16,67→Capaian 16,67%

STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang terdiri dari 5 pilar kegiatan yaitu: 1. Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) 2. Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT) 4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Air dan sanitasi merupakan kebutuhan utama masyarakat yang sangat penting guna tepenuhinya kualitas air minum dan sanitasi yang layak, dimana jika hal tersebut terpenuhi maka peningkatan produktifitas masyarakat pun akan terjadi.
Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Pilar STBM GESI di 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Wae Ri'i dan Kecamatan Ruteng.
Sementara 10 Kecamatan lainnya baru melaksanakan Pilar 1 dan Pilar 2 dari 5 Pilar STBM GESI. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk melaksanakan 3

pilar lainnya dengan melibatkan sekolah-sekolah dan unsur-unsur lain yang ada di wilayah kecamatan dan desa.

Sasaran "*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Kesehatan dan RSUD Ruteng				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	143.422.037.791,00	129.963.894.815,00	90,62
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.094.301.497,00	1.037.928.747,00	94,85
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	328.029.000,00	277.769.000,00	84,68
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	230.493.000,00	187.265.000,00	81,25
Total Angaran		145.074.861.288,00	131.466.857.562,00	90,62

Upaya pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan urusan kesehatan diantaranya:

a. Sinergitas lintas program, lintas sektor dan stakeholder terkait dalam pembangunan bidang kesehatan.
b. Akses fasilitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan sebagai prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sasaran 4 : *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk*

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat fertilitas wanita menurut umur (ASFR). Realisasi TFR tahun 2022 sesuai data Dinas P2KB adalah 2,09 dari target 0,056 dengan capaian kinerja 98,59% kategori SANGAT BAIK.

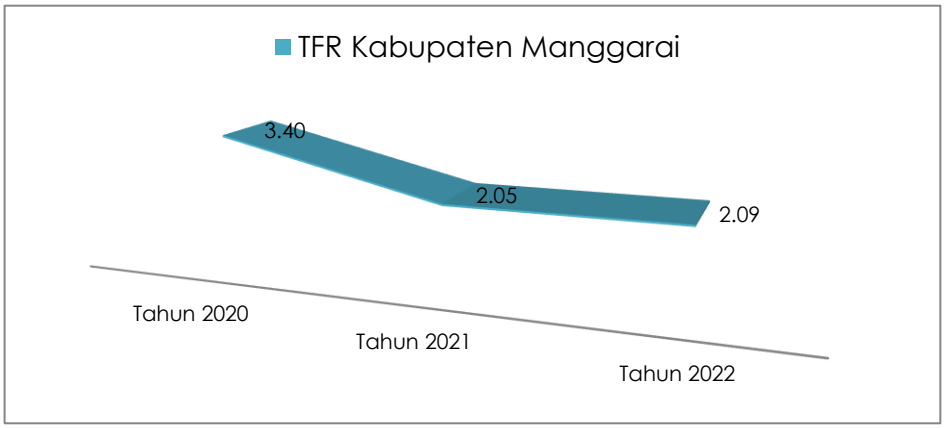

Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya:

a. Melakukan penyuluhan dan KIE secara intensif mengenai Keluarga Berencana.
b. Adanya upaya-upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD).
c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi.
d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok-pelosok.
e. Adanya pelatihan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun.
b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (dua) anak.
c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi.
d. Alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB belum/tidak tersedia.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas yaitu:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB.

Sasaran "*Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.064.282.492,00	2.640.124.700,00	86,16
2	Program Pengendalian Penduduk	107.772.500,00	102.855.000,00	95,44
3	Program Pemberdayaan	2.242.718.500,00	618.828.500,00	27,59

	dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			
Total Angaran		5.414.773.492,00	3.361.808.409,19	62,09

Sasaran 5 : *Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan*

Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Indikator Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)

Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 87,33%, kategori SANGAT BAIK dengan rincian capaian per indikator sebagai barikut :

1. Realisasi Indikator *Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri* tahun 2022 adalah 16,05 dari target 9,19 dengan tingkat capaian kinerja 174,66% Kategori MEMUASKAN. Realisasi 16,05 diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Manggarai dibagi jumlah pemuda usia 16-20 tahun di Kabupaten Manggarai kali 100. Pada tahun 2022 jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha sebanyak 15.133 orang, sedangkan jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Manggarai sebanyak 94.280 orang.
2. Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)

   Pada tahun 2022, realisasi dari indikator sasaran ini adalah 0,00 karena pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar pada tingkat Provinsi NTT karena keterbatasan anggaran.

Terakhir Kabupaten Manggarai mengikuti kegiatan POPDA tahun 2019 dan menempati posisi ke-10 dari 22 Kabupaten/kota se-Provinsi NTT dan perolehan medali sebanyak 12 medali dengan rincian: medali emas sebanyak 4 medali, perak 3 medali dan perunggu sebanyak 5 medali.

Sasaran "*Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	308.840.000,00	297.616.200,00	96,37
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	192.615.000,00	184.844.562,00	95,97
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	742.690.980,00	731.505.280,00	98,49

Total Angaran	1.244.145.980,00	1.213.966.332,83	97,57

Sasaran 6 : *Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya*

Indikator Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan

Target 64,00 → Realisasi 16,58 → Capaian Kinerja 25,91% → Kategori Kurang

Realisasi 16,58 pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah budaya benda dan tak benda dilestarikan sebanyak 33 dari jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 199.

Untuk mendukung pencapaian "*Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya*", Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	184.907.000,00	184.907.000,00	100,00
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	411.929.296,00	408.408.940,00	99,15
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	477.072.508,00	476.572.507,00	99,90
Total Anggaran		1.073.908.804,00	1.069.888.447,00	99,63

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas:

1. Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail latar sejarahnya.
2. Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap diminta masuk sebagai cagar budaya.
3. Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya.
4. Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang.

Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ke depan:

1 Menginventarisir temuan benda cagar budaya.
2. Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya.

3. Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan taman budaya daerah.
4. Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KEBERDAYAA N SOSIAL MAYARAKAT
Indikator Angka PMKS
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketercapaian tujuan kinerja direpresentasikan melalui IKU Angka PMKS dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 91,74% karegori capaian kinerja SANGAT BAIK.

Indikator Angka PMKS

Target 19.089 → Realisasi 16.299 → Capaian Kinerja 85,38% → SANGAT

Tabel 2.4
Penanganan PMKS Kabupaten Manggarai tahun 2022

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS yang dibantu
1	Disabilitas	58 Orang
2	Lansia	50 Orang
3	Anak Terlantar	7 Orang
4	Warsosek	10 Kelompok
5	Karang Taruna	7 Kelompok
6	Bencana Alam/Bencana Sosial	16.167 Orang
Jumlah		16.299 Orang

Dalam rangka mengurangi risiko kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendukung program pemerintah pusat dengan menggelontorkan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas dan sembilan bahan pokok serta CBP (Cadangan Beras Pemerintah) terhadap penyandang masalah sosial di Kabupaten Manggarai.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Target 65,84 → Realisasi 64,58 → Capaian Kinerja 98,09% → SANGAT BAIK

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2022 mencapai 64,58. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IDG tahun 2020 yang mencapai

66,32. IDG Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-6 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Pencapian tersebut lebih baik jika dibandingan dengan IDG Kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Grafik 2.7
IDG Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2021

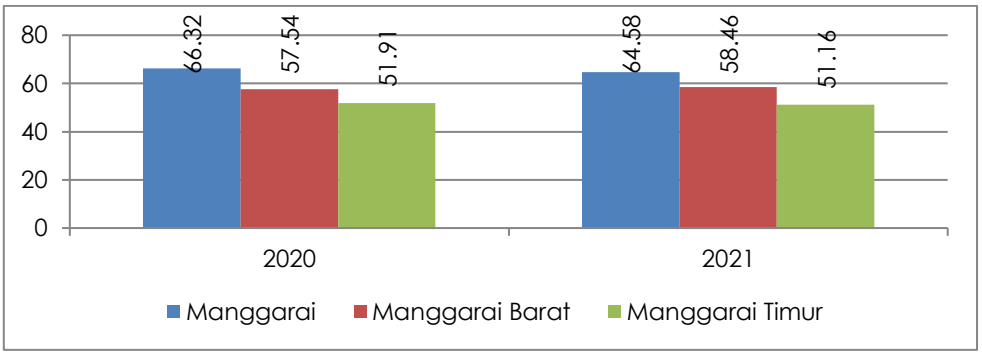

Sumber : BPS Prov. NTT, 2022

Langkah peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu :

1. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MAYARAKAT*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*

Indikator Persentase PMKS yang tertangani

Target 1,12 → Realisasi 0,85 → Capaian Kinerja 76,24% → BAIK

Total PMKS di Kabupaten Manggarai yang direncanakan untuk diintervensi/ ditangani tahun 2022 sebanyak 19.089 orang. Dari total PMKS tersebut yang mendapat bantuan/tertangani tahun 2022 sebanyak 16.299 orang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran "*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*", Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut :

Dinas Sosial				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perlindungan Jaminan Sosial	41.786.000,00	34.477.000,00	82,51
2	Program Rehabilitasi Sosial	261.268.000,00	260.384.370,00	99,66
3	Program Pemberdayaan Sosial	484.663.000,00	475.037.500,00	98,01
	Program Penanganan Bencana	28.976.000,00	19.646.000,00	67,80
Total Anggaran		816.693.000,00	789.544.870,00	96,68

Sasaran 2 : *Menurunnya Ketimpangan Gender*
Indikator TPAK Perempuan

Target 64,16 → Realisasi 81,91 → Capaian Kinerja 127,66% → MEMUASKAN

Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$$

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023, angkatan kerja perempuan tahun 2022 sebanyak 90.065 orang atau 81,91% dari jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 109.962 orang.

Tabel 2.5
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 tahun ke atas	Jlh. Angkatan Kerja Perempuan	% Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
1.	2019	111.407	70.312	63,11
2.	2020	120.570	83.475	69,23
3.	2021	122.334	88.108	72,02
4.	2022	109.962	90.065	81,91

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Grafik 2.8
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

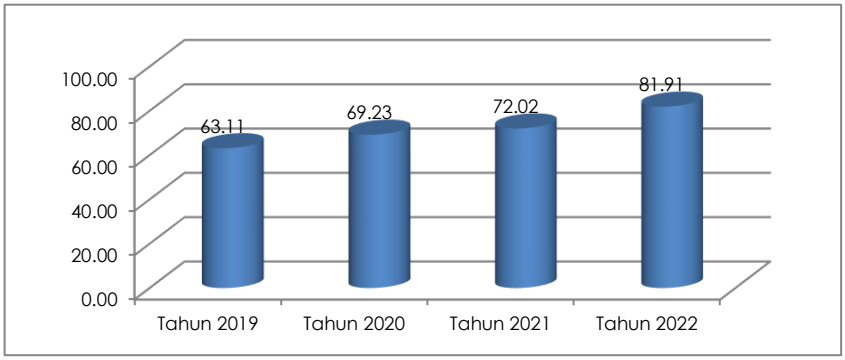

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Sasaran "*Menurunnya Ketimpangan Gender*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.485.000,00	60.485.000,00	100,00
Total Anggaran		60.485.000,00	60.485.000,00	100,00

Sasaran 3 : ***Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak***
Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Target 25,45 → Realisasi 28,18 → Capaian Kinerja 89,27% → SANGAT BAIK

$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan}} \times 100.000$$

Kasus kekerasan terhadap perempuan (usia 18 tahun ke atas) di Kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 46 kasus atau 28,18% dari total jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas sebanyak 163.233 orang. Kasus kekerasan sebanyak 46 tersebut sama dengan tahun 2021 dan meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 37 kasus.

Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Target 0,019 → Realisasi 0,025 → Capaian Kinerja 68,61% → CUKUP

$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak} = \frac{\text{Jlh. Anak mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Anak usia kurang dari 18 tahun}} \times 100$$

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tahun 2022 sebanyak 29 anak/kasus atau 0,025% dari jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 116.171 anak.

Sasaran "*Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perlindungan Perempuan	28.590.000,00	28.480.000,00	99,62
2	Program Perlindungan Khusus Anak	108.535.300,00	108.345.388,00	99,83
Total Anggaran		137.125.300,00	136.825.388,00	99,78

Grafik 2.9
Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2020-2022

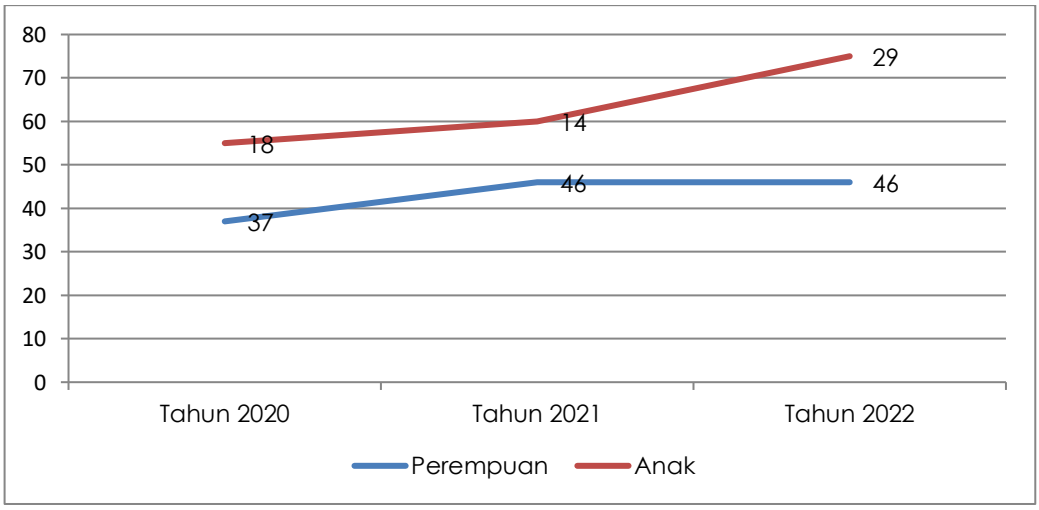

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengurangi atau menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yaitu Desa Bangka Kenda dan Desa Satar Ngkeling sebagai desa per-contohan di Kabupaten Manggarai.
2. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Sosialisasi yang terkait dengan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

TUJUAN 3

MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

Indikator Angka Konflik Sosial

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui IKU Angka Konflik Sosial dan Indeks Risiko Bencana (IRBI) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 122,22% karegori capaian kinerja MEMUASKAN.

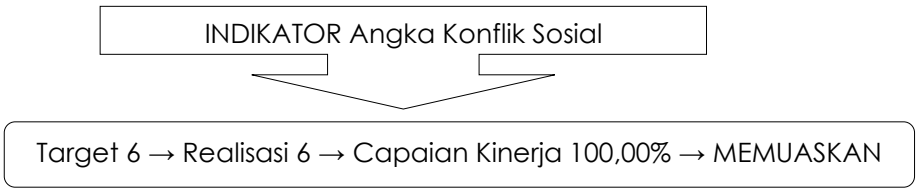

Konflik sosial sepertinya tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Menjadi soal serius ketika konflik sosial itu mengganggu rasa aman dan nyaman seseorang atau sekelompok orang. Apalagi kalau berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Pada tahun 2022 sesuai data Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 kasus, yaitu :

1. Masalah tanah Lingko Golo Kalo Antara Pemerintah Desa Golo Nenu dan Rafael Jenggal di Kecamatan Cibal.
2. Masalah BLT di desa Pong Lale Kecamatan Ruteng.

3. Masalah Tanah di Lapangan Bola Sepak dan Kapela Pong Pahar Paroki Bunda Segala Bangsa di Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat.
4. Masalah tanah SDI Wangko desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.
5. Masalah tanah Milik Pemkab Manggarai di Nanga Banda Kecamatan Reok.
6. Masalah Tanah antara Masyarakat Gendang Tengger dan Gendang Purang Desa Golo Lambo Kecamatan Satar Mese.

Ke-6 masalah sosial tersebut di atas semuanya telah difasilitasi/ditangani penyelesaianya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Target 97,12 → Realisasi 54,18 → Capaian Kinerja 144,21% → MEMUASKAN

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah. Adapun metode analisis perhitungan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Manggarai:

R = H x V/C

*H = Hazard (*Ancaman) atau Bahaya mendapat nilai 43.

*V = Vulnerability (*Kerentanan) mendapat skor 12,60.

C = Capacity (Kapasitas) dengan skor 10.

R = 43 x 12,60/10

R = 54,18 Poin

Perolehan nilai bahaya (43), Kerentanan (skor 12,60) dan Kapasitas (skor 10) dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Nilai Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas

1. Bahaya

Jenis Bencana		BAHAYA				
		Luas (Ha)	Kelas	Nilai Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)
1	Banjir	37.500	SEDANG	2	4	8
2	Banjir Bandang	-	-	0	4	0
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	125.000	TINGGI	3	4	12
4	Gempa Bumi	40.000	SEDANG	2	4	8
5	Gelombang Ekstrim Abrasi	-	-	0	4	0
6	Kekeringan	-	-	0	4	0

7	Kebakaran Hutan	-	-	0	4	0
8	Letusan Gunung Api	-	-	0	3	0
9	Tanah Longsor	108.000	TINGGI	3	5	15
10	Tsunami	-	-	0	4	0
Multi Bahaya						43

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

2. Kerentanan

a. Penduduk Terpapar Bencana

Jenis Bencana		Penduduk Terpapar Bencana							
		Jlh Pddk Terpapar	Kelompok Rentan			Kls	Nilai Kls	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)
			Klpk Umur Rentan	Pddk Miskin	Pddk Cacat				
1	Banjir	95.000	45.000	21.000	27	TINGGI	3	40%	1,2
2	Banjir Bandang	-	-	-	-	-	0	40%	0
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	214.000	96.000	76.000	15	TINGGI	3	40%	1,2
4	Gempa Bumi	97.000	27.000	20.000	30	TINGGI	3	40%	1,2
5	Gelombang Ekstrim Abrasi	-	-	-	-	-	0	40%	0
6	Kekeringan	-	-	-	-	-	0	40%	0
7	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	0	30%	0
8	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	0	40%	0
9	Tanah Longsor	120.000	50.000	27.000	30	TINGGI	3	40%	1,2
10	Tsunami	-	-	-	-	-	0	40%	0
Total Skor									4,8

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

b. Kerugian (Juta Rupiah)

Jenis Bencana		KERUGIAN (JUTA RUPIAH)						
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kls	Nilai Kls	Bobot Kls	Skor (Kelas x Bobot)
1	Banjir	205.000	82.000	287.000	TINGGI	3	50%	1,50
2	Banjir Bandang	-	-	-	-	0	50%	-
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	1.420.000	250.000	1.670.000	TINGGI	3	60%	1,80
4	Gempa Bumi	1.270.000	100.000	1.370.000	TINGGI	3	60%	1,80
5	Gelombang Ekstrim Abrasi	-	-	-	-	0	50%	-
6	Kekeringan	-	-	-	-	0	30%	-
7	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	0	30%	-
8	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	0	50%	-
9	Tanah Longsor	610.000	102.000	712.000	TINGGI	3	50%	1,50

10	Tsunami	-	-	-	-	0	50%	-
Total Skor								6,60

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

c. Kerugian Lingkungan (Ha)

Jenis Bencana		KERUGIAN (JUTA RUPIAH)				
		Kerugian Fisik	Kelas	Nilai Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)
1	Banjir	39.000	TINGGI	3	10%	0,3
2	Banjir Bandang	-	-	0	10%	0
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	120.000	TINGGI	3	10%	0,3
4	Gempa Bumi	110.000	TINGGI	3	10%	0,3
5	Gelombang Ekstrim Abrasi	-	-	0	10%	0
6	Kekeringan	-	-	0	30%	0
7	Kebakaran Hutan	-	-	0	40%	0
8	Letusan Gunung Api	-	-	0	10%	0
9	Tanah Longsor	108.000	TINGGI	3	10%	0,3
10	Tsunami	-	-	0	10%	0
Total Skor						1,2
Multi Kerentanan (a+b+c)						12,60

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

3. Kapasitas

Jenis Bencana		KAPASITAS DAERAH					
		Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiap siagaan	Kelas Kapasitas	Nilai Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)
1	Banjir	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
2	Banjir Bandang	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
4	Gempa Bumi	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
5	Gelombang Ekstrim Abrasi	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
6	Kekeringan	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
7	Kebakaran Hutan	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
8	Letusan Gunung Api	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
9	Tanah Longsor	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
10	Tsunami	SEDANG	RENDAH	RENDAH	1	100%	1
Multi Kapasitas							10

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia
** Nilai kelas Ketahanan, Kelas Kesiapsiagaan dan kelas kapasitas diambil dari Kajian Resiko Bencana Kab. Manggarai

Grafik 2.10
Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Kabupaten Manggarai

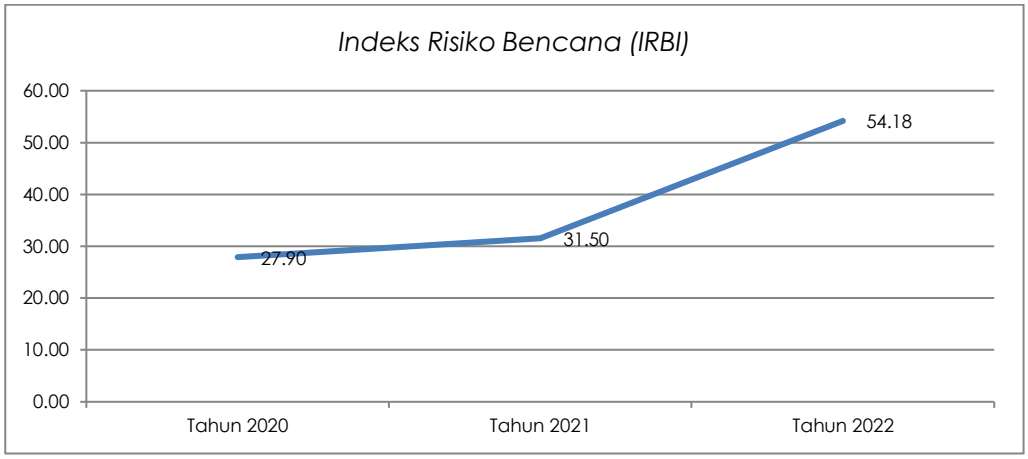

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 27,90 poin tahun 2020 menjadi 54,18 poin tahun 2022. Semakin tinggi bahaya/ancaman yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan maka semakin tinggi juga indeks risiko bencananya.

Untuk mendukung pencapian IKU ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan :

1. Melakukan sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat pada daerah rawan bencana.
2. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Penyediaan peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL*, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Ketertiban Umum*

Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

Target 13,86 → Realisasi 18,095 → Capaian Kinerja 130,56% → MEMUASKAN

Angka pelanggaran terhadap Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebnyak 124 pelanggaran, mengalami peningkatn dari tahun 2021 yang mencapai 105 pelanggaran atau meningkat sebesar 18,095%. Realisasi 18,095% dari target 13,86% maka capaian kinerja tahun 2022 mencapai 130,56% kategori kinerja MEMUASKAN.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran di atas pada tahun 2022 sebaga berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.593.291.560,00	1.590.251.710,00	99,81
Total Anggaran	1.593.291.560,00	1.590.251.710,00	99,81

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai melalui pendekatan persuatif dan preventif dan didukung dengan penambahan jumlah personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dari 39 orang menjadi 71 orang pada tahun 2022 yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Faktor penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai, antara lain :

- Faktor Internal :
  1. Sumber Daya Manusia dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan pelaksanaan program penegakan perda/perkada kurang optimal.
  2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
- Faktor Ekternal :
  - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda / Perkada.

Langkah-langkah antisipatif dan alternatif solusi yang dilakukan:

- Koordinasi yang lebih terencana dan lebih terorganisir dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda/Perkada serta pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan SDM anggota Satpol PP dan Damkar baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui diklat sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
- Melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kali Lima (PKL).

Sasaran 2 : *Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial*
Indikator Angka konflik sosial

Target 6 → Realisasi 6 → Capaian Kinerja 100% → MEMUASKAN

Manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya sehingga menimbulkan konflik sosial yang tidak bisa dihindari dan dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi seseorang atau sekelompok orang yang tentu saja berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Pada tahun 2022 sesuai data Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 kasus, yaitu :

1. Masalah tanah Lingko Golo Kalo antara Pemerintah Desa Golo Nenu dan Rafael Jenggal di Kecamatan Cibal.
2. Masalah BLT di desa Pong Lale Kecamatan Ruteng.
3. Masalah Tanah di Lapangan Bola Sepak dan Kapela Pong Pahar Paroki Bunda Segala Bangsa di Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat.
4. Masalah tanah SDI Wangko desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.
5. Masalah tanah Milik Pemkab Manggarai di Nanga Banda Kecamatan Reok.
6. Masalah Tanah antara Masyarakat Gendang Tengger dan Gendang Purang Desa Golo Lambo Kecamatan Satar Mese.

Ke-6 masalah sosial tersebut di atas semuanya telah difasilitasi/ditangani penyelesaianya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2022 sebaga berikut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	885.176.000,00	885.063.000,00	99,99
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	207.028.000,00	151.590.000,00	73,22
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.430.706.000,00	590.189.320,00	41,25
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.854.000,00	33.784.000,00	99,79
Program Pembinaan dan	70.405.000,00	70.390.000,00	99,98

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Total Anggaran	2.627.169.000,00	1.731.016.320,00	65,89

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana*

Indikator Indeks ketahanan daerah (IKD)

Target 0,46 (Sedang) → Realisasi 0,66 (Sedang) → Capaian Kinerja 134,69% → MEMUASKAN

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pada tahun 2022 IKD Kabupaten Manggarai mencapai 0,66 (sedang) dari target 0,46 (Sedang) dengan capaian kinerja sebesar 134,69% kategori MEMUASKAN.

Untuk mendukung dan mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam mendukung program/perencanaan penanggulangan daerah.
2. Mengurangi kerentanan yang ada di daerah, baik itu berupa kerentanan yang sifanya fisik, sosial maupun kerentanan akibat ekonomi serta memperbanyak program-program pembangunan yang dapat mengurangi berbagai ancaman yang ada di daerah.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2022 sebaga berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	457.572.448,00	422.214.106,00	92,27
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20.084.000,00	20.084.000,00	100,00
Total Anggaran	477.656.448,00	442.298.106	92,60

Sasaran 4 : *Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana*

Indikator Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Memiliki Bangunan Pengendali Bencana

Target 23,74 → Realisasi 21,18 → Capaian Kinerja 89,29% → SANGAT BAIK

Sesuai data dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, realisasi kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sampai dengan tahun 2022 adalah 21,18% atau 89,24% dari yang ditargetkan 23,74% dengan kategori kinerja SANGAT BAIK. Realisasi 21,18% termasuk realisasi yang dibangun tahun 2022 yang mencapai 4,60% yang diperoleh dari luas kawasan permukiman rawan bencana yang dibangun pengendali bencana seluas 1,06 Ha berbanding dengan luas kawasan permukiman rawan bencana/banjir seluas 23,12 Ha.

Program yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana* tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.959.299.400,00	1.943.629.104,00	99,20
Total Anggaran	1.959.299.400,00	1.943.629.104,00	99,20

TUJUAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Indikator PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) Laju Inflasi

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 3 (tiga) IKU dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 86,51% kategori capaian kinerja SANGAT BAIK.

INDIKATOR Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 4,93 → Realisasi 2,21 → Capaian Kinerja 44,83% → KURANG

Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,21% mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,30 persen. Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan jika

dibandingkan dengan tahun 2021, bahkan banyak sektor yang di tahun lalu memiliki laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan dan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Walaupun banyak sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021, namun masih ada sektor yang mengalami kontraksi dan penurunan pertumbuhan. Beberapa sektor tersebut diantaranya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; kostruksi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Sementara itu, kategori dengan kontraksi pertumbuhan terbesar adalah jasa jasa pendidikan yaitu dengan pertumbuhan -0,15 persen disusul konstruksi dengan pertumbuhan -0,07.

Grafik 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT

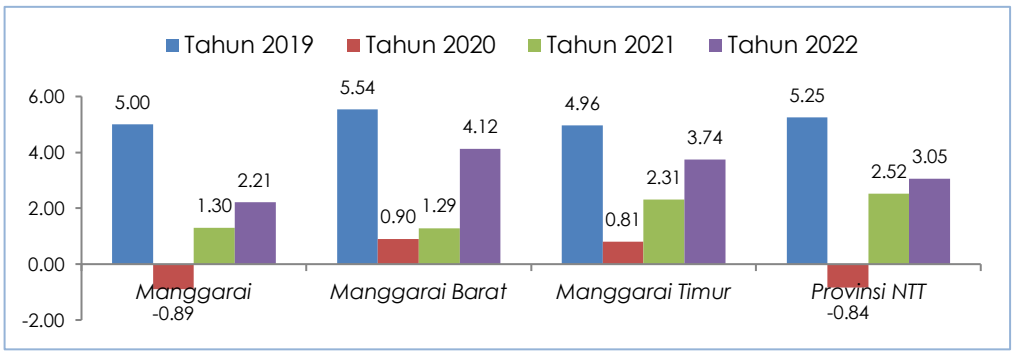

Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 merupakan pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Provinsi NTT.

INDIKATOR PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)

Target 10.125 → Realisasi 9.750 → Capaian Kinerja 96,30% → SANGAT BAIK

Angka PDRB perkapita menunjukan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya. PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai Data Prov. NTT Dalam Angka yang dirilis BPS Prov. NTT Tahun 2023 adalah Rp.9.750 atau 96,30 dari yang ditargetkan Rp.10.125 dengan kategori kinerja SANGAT BAIK.

Grafik 2.12
PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.)

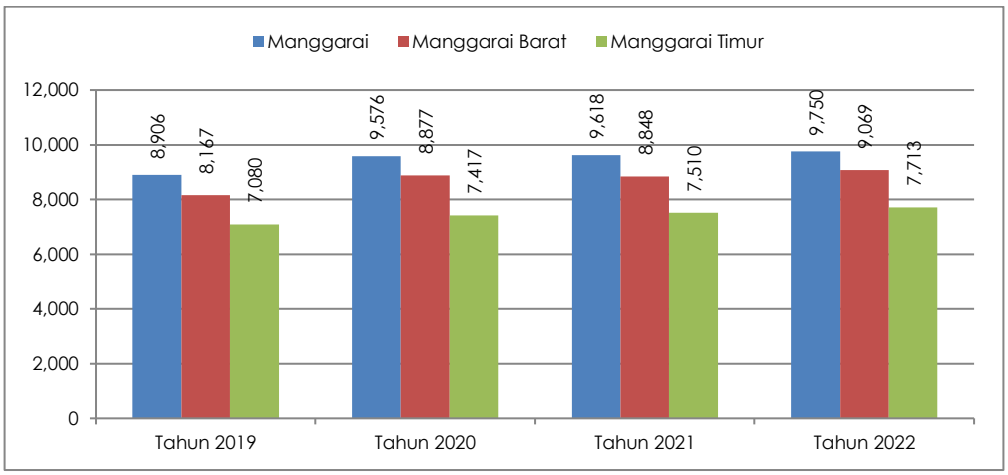

Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Prov. NTT, 2023

PDRB Perkapita (ADHK Ribu Rp.) Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan berada di atas atau lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

INDIKATOR Laju Inflasi

Target 2,00 → Realisasi 6,25 → Capaian Kinerja -112,50% → KURANG

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi kabupaten/kota di Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang dirilis BPS yang diperoleh dari 3 (tiga) kota inflasi yaitu Kota Kupang, Waingapu dan Kota Maumere. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, laju inflasi diperoleh berdasarkan data inflasi kota Maumere Provinsi NTT.

Inflasi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai data yang rilis BPS Provinsi NTT tahun 2023 menurut wilayah inflasi kota Maumere adalah 6,25%. Realisasi 6,25% dari target 2,00% maka capaian kinerja dari indikator tujuan ini adalah -112,50% kategori KURANG. Inflasi 6,25 tahun 2022 ini meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 0,55%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar 28,13%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,82%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,90%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,13%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/rekreasi sebesar 5,09%; kelompok kesehatan sebesar 1,70%; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 1,35%; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,83%; kelompok pendidikan sebesar 0,00% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,61%.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI*, didukung oleh dua belas sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian*
Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian

Target 2,44 → Realisasi 3,57 → Capaian Kinerja 146,31% → MEMUASKAN

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan pertumbuhan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu

menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan dan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 (*Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)*

Lapangan Usaha/Industry		Tahun			
		2019	2020	2021*	2022**
a.	*Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*	*2,42*	*0,86*	*2,71*	*3,57*
b.	Pertambangan dan Penggalian	0,25	-15,37	1,88	3,66
c.	Industri pengolahan	8,66	-1,30	-3,83	4,95
d.	Pengadaan listrik dan Gas	1,03	18,49	0,50	9,08
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	2,12	10,55	0,54
f.	Konstruksi	6,16	-5,46	4,15	-0,07
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	-4,66	1,61	6,75
h.	Transportasi dan Pergudangan	5,09	-1,58	0,48	2,61
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,20	-32,94	11,62	19,03
j.	Informasi dan Komunikasi	4,35	5,41	1,87	3,22
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	10,70	3,23	1,07
l.	Real Estat	0,52	-3,83	1,20	2,01
m,n.	Jasa Perusahaan	5,82	-30,29	-13,79	4,63
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	1,14	-3,67	0,10
p.	Jasa Pendidikan	6,73	0,02	-0,03	-0,15
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,08	0,04	3,26	2,17
r,s,t,u	Jasa Lainnya	6,89	-12,47	-0,07	0,91
PDRB		5,00	-0,89	1,30	2,21

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyuluhan Pertanian	1.450.475.972,00	1.422.005.520,00	98,04
Program Penyediaan dan	8.581.949.771,00	6.476.577.665,00	75,47

Pengembangan Sarana Pertanian			
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	449.035.972,00	443.609.320,00	98,79
Program Perizinan Usaha Pertanian	16.000.000,00	15.180.000,00	94,88
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	564.180.000,00	553.260.000,00	98,06
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	965.673.892,00	952.828.865,00	98,67
Total Anggaran	12.027.315.607,00	9.863.461.370,00	82,01

Sasaran 2 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan*
Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan

Target 2,44 → Realisasi 3,57 → Capaian Kinerja 146,31% → MEMUASKAN

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis BPS kabupaten Manggarai tahun 2022, realisasi Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3,57% tahun 2022 merupakan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai menurut Lapangan Usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan demikian laju pertumbuhan 3,57% termasuk pertumbuhan sub sektor perikanan.

Tabel 2.8
Produksi Perikanan Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jlh. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jlh. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah
1.	2019	7.058,85	137,01	7.195,86
2.	2020	7.067,11	149,69	7.216,80
3.	2021	7.542,00	151,17	7.693,17
4	2022	7.505,56	158,30	7.663,86

Sumber: Perikanan Kab. Manggarai, 2021

Langkah-langkah yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan produksi perikanan antara lain:

- Penambahan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan melalui bantuan alat tangkap baik mesin, jaring dan armada penangkapan.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perluasan lahan perikanan budidaya.
- Pembentukan kelompok perikanan budidaya.

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perikanan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	181.739.296,00	179.530.684,00	98,78
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.482.285.916,00	1.474.649.480,00	99,48
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	185.180.000,00	3.680.000,00	1,99
Total Anggaran	1.849.205.212,00	1.657.860.164,00	89,65

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Target 5,62 → Realisasi 4,95 → Capaian Kinerja 88,08% → SANGAT BAIK

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi salah satu yang mengalami percepatan pertumbuhan. Sesuai data MDA-BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2022 yang dirilis tahun 2023. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2019-2022 berfluktuatif dari 8,66 tahun 2019, mengalami kontraksi tahun 2020 yaitu -1,30 dan tahun tahun 2021 -3,83. Namun di tahun 2022 menjadi 4,95%. Realisasi 4,95% tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 5,62% atau hanya mencapai 88,08% kategori kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Industri pengolahan)*

Lapangan Usaha/Industry		Tahun			
		2019	*2020*	*2021**	*2022***
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,42	0,86	2,71	3,57
b.	Pertambangan dan Penggalian	0,25	-15,37	1,88	3,66
c.	*Industri pengolahan*	*8,66*	*-1,30*	*-3,83*	*4,95*
d.	Pengadaan listrik dan Gas	1,03	18,49	0,50	9,08
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	2,12	10,55	0,54
f.	Konstruksi	6,16	-5,46	4,15	-0,07
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	-4,66	1,61	6,75
h.	Transportasi dan Pergudangan	5,09	-1,58	0,48	2,61
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,20	-32,94	11,62	19,03
j.	Informasi dan Komunikasi	4,35	5,41	1,87	3,22
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	10,70	3,23	1,07
l.	Real Estat	0,52	-3,83	1,20	2,01

Lapangan Usaha/Industry		Tahun			
		2019	*2020*	*2021**	*2022***
m,n.	Jasa Perusahaan	5,82	-30,29	-13,79	4,63
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	1,14	-3,67	0,10
p.	Jasa Pendidikan	6,73	0,02	-0,03	-0,15
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,08	0,04	3,26	2,17
r,s,t,u	Jasa Lainnya	6,89	-12,47	-0,07	0,91
PDRB		5,00	-0,89	1,30	2,21

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.346.711.511,00	7.164.972.763,00	97,53
Total Anggaran	7.346.711.511,00	7.164.972.763,00	97,53

Sasaran 4 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Akomodasi Dan Makan Minum

Target 4,56 → Realisasi 19,03 → Capaian Kinerja 417,32% → MEMUASKAN

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Realisasi 19,03 dari target 4,56 maka capaian kinerjanya 417,32% kategori MEMUASKAN.

Tabel 2.10

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)*

Lapangan Usaha/Industry		Tahun			
		2019	*2020*	*2021**	*2022***
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,42	0,86	2,71	3,57
b.	Pertambangan dan Penggalian	0,25	-15,37	1,88	3,66
c.	Industri pengolahan	8,66	-1,30	-3,83	4,95
d.	Pengadaan listrik dan Gas	1,03	18,49	0,50	9,08
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	2,12	10,55	0,54
f.	Konstruksi	6,16	-5,46	4,15	-0,07

g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	-4,66	1,61	6,75
h.	Transportasi dan Pergudangan	5,09	-1,58	0,48	2,61
i.	*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum*	*6,20*	*-32,94*	*11,62*	*19,03*
j.	Informasi dan Komunikasi	4,35	5,41	1,87	3,22
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	10,70	3,23	1,07
l.	Real Estat	0,52	-3,83	1,20	2,01
m,n.	Jasa Perusahaan	5,82	-30,29	-13,79	4,63
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	1,14	-3,67	0,10
p.	Jasa Pendidikan	6,73	0,02	-0,03	-0,15
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,08	0,04	3,26	2,17
r,s,t,u	Jasa Lainnya	6,89	-12,47	-0,07	0,91
PDRB		5,00	-0,89	1,30	2,21

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	260.144.520,00	258.403.115,00	99,33
Program Pemasaran Pariwisata	559.040.330,00	478.472.830,00	85,59
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.229.633.620,00	1.212.969.969,00	98,64
Total Anggaran	2.048.818.470,00	1.949.846.197,56	95,17

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai, langkah-langkah yang dilakukan:

1. Melakukan penataan terhadap obyek-obyek wisata yang telah ada maupun obyek-obyek wisata baru.
2. Melakukan promosi obyek-obyek wisata melalui media massa dan elektronik.
3. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap sektor-sektor jasa usaha yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti pembinaan terhadap pemilik hotel dan restoran, pemilik tempat rekreasi dan hiburan umum. Upaya-upaya itu dilakukan dengan harapan para pengusaha dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.

4. Melakukan pendekatan sosial budaya kepada para pemilik lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata untuk dikembangkan lewat program dan kegiatan sektor pariwisata agar memiliki daya tarik yang signifikan.

Sasaran 5 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Target 5,16 → Realisasi 6,75→ Capaian Kinerja 130,81% → MEMUASKAN

Salah satu sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dimana pada tahun 2021 sebesar 1,61% menjadi 6,75% tahun 2022. Realisasi 6,75% tersebut melampaui target sebesar 5,165% yang telah ditetapkan sesuai dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022. Tingkat capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 130,81% dengan ketegori kinerja MEMUASKAN.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha/Industry		Tahun			
		2019	*2020*	*2021**	*2022***
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,42	0,86	2,71	3,57
b.	Pertambangan dan Penggalian	0,25	-15,37	1,88	3,66
c.	Industri pengolahan	8,66	-1,30	-3,83	4,95
d.	Pengadaan listrik dan Gas	1,03	18,49	0,50	9,08
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	2,12	10,55	0,54
f.	Konstruksi	6,16	-5,46	4,15	-0,07
g.	*Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*	*8,28*	*-4,66*	*1,61*	*6,75*
h.	Transportasi dan Pergudangan	5,09	-1,58	0,48	2,61
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,20	-32,94	11,62	19,03
j.	Informasi dan Komunikasi	4,35	5,41	1,87	3,22
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	10,70	3,23	1,07
l.	Real Estat	0,52	-3,83	1,20	2,01
m,n.	Jasa Perusahaan	5,82	-30,29	-13,79	4,63
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	1,14	-3,67	0,10
p.	Jasa Pendidikan	6,73	0,02	-0,03	-0,15
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,08	0,04	3,26	2,17
r,s,t,u	Jasa Lainnya	6,89	-12,47	-0,07	0,91
PDRB		5,00	-0,89	1,30	2,21

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50.600.000,00	50.550.000,00	99,90
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	20.101.000,00	20.101.000,00	100,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	36.700.000,00	36.630.000,00	99,81
Total Anggaran	107.401.000,00	107.281.299,71	99,89

Faktor penghambat yang meneyebabkan tercapai/tidak tercapaianya kinerja ini antara lain adalah :

1. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, langkah-langkah yang dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan.
2. Pembinaan secara rutin terhadap pedagang/petani dan pelaku usaha.
3. Peningkatan SDM.
4. Promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Sasaran 6 : *Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMDN

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMA

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN	Persen	5,00	1,68	33,51
2	Persentase Peningkatan Realisasi PMA	Persen	5,00	0,00	0,00
Rata-rata					16,75
Kategori					KURANG

Sasaran "*Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*" diukur menggunakan 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas dengan rata-rata sebesar 16,75%, kategori KURANG.

Sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari ke-2 indikator sasaran yang mempunyai data realisasi hanya indikator "Persentase

Peningkatan Realisasi PMDN". Sedangkan indikator "Persentase Peningkatan Realisasi PMA" tidak ada realisasi karena belum adanya investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Manggarai.

Jumlah realisasi investasi PMDN di Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan dari Rp.522.090.953.413,00 di tahun 2021 menjadi Rp.1.396.803.390.601,00 pada tahun 2022 dengan peningkatan realisasi mencapai 1,68%. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun realisasi 1,68% tersebut tidak mencapai target 5,00% yang perjanjinan dalam dokumen perjianjian kinerja tahun 2022. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 hanya sebesar 33,51%, kategori KURANG.

Keberhasilan Kabupaten Manggarai meningkatkan nilai investasi pada tahun 2022 didukung oleh :

1. Ketersediaan SDM aparatur DPMPTSP baik kualitas maupun kuantitas.
2. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Bimtek/Sosialisasi terhadap pelaku usaha.
3. Penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal sehingga memberikan kemudahan kepada investor.
4. Pembangunan dan pengembangan Inovasi Puspita.

Namun demikian sejumlah tantangan masih mengiringi upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai di antaranya:

1. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang proses perijinan secara mandiri melalui OSS RBA, sehingga pelaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian data-data dari OSS versi 1.1 ke dalam OSS RBA.
2. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*.
3. Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan komitmen usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurang promosi potensi investasi.

Solusi yang dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi pelaku usaha, guna peningkatan kapasitas SDM terkait pemahaman tentang OSS yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

2. Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi aparatur DPMPTSP, terkait pemahaman tentang OSS RBA dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
3. Perlu melaksanakan promosi potensi investasi.

Sasaran "*Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.310.000,00	8.160.000,00	98,19
Program Promosi Penanaman Modal	7.632.000,00	7.632.000,00	100,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360.216.000,00	350.870.900,00	97,41
Program Pelayanan Penanaman Modal	149.264.648,00	148.310.342,00	99,36
Total Anggaran	525.422.648,00	514.973.636,96	98,01

Sasaran 7 : *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan*
Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Target 56,15 → Realisasi 54,80 → Capaian Kinerja 97,60% → SANGAT BAIK

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap diartikan sebagai jalan kabupaten dengan kondisi permukaan jalan baik dan sedang. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai data dari Dinas PUPR sampai dengan tahun 2022 adalah 1548,924 Km. Panjang jalan tersebut tidak termasuk jalan desa 410,870 Km sebagaimana perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari 1548,924 Km panjang jalan tersebut yang dalam kondisi mantap (baik dan dan sedang) adalah 848,807 Km atau 54,80% dari 56,16 yang ditargetkan dalam kondisi mantap tahun 2022. Dengan demikian capaian dari indikator sasaran ini adalah 97,60%, kategori kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 2.12
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2022

No	S/d Tahun	Pjg. Jalan Kabupaten	Pjg. Jln Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang, Km)	%	Pjg. Jln Kurang Baik (Rusak dan Rusak Berat, Km)	%
1	2020	1444,01	1232,157	85,33	211,856	14,67
2	2021	1462,00	1160,336	79,37	301,662	20,63
3	2022	1548,92	848,807	54,80	700,117	45,20

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2022

Ket. : - Jalan dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya baik dan sedang.
-Jalan dalam kondisi kurang baik (<40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya rusak dan rusak berat.

Grafik 2.13
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2022

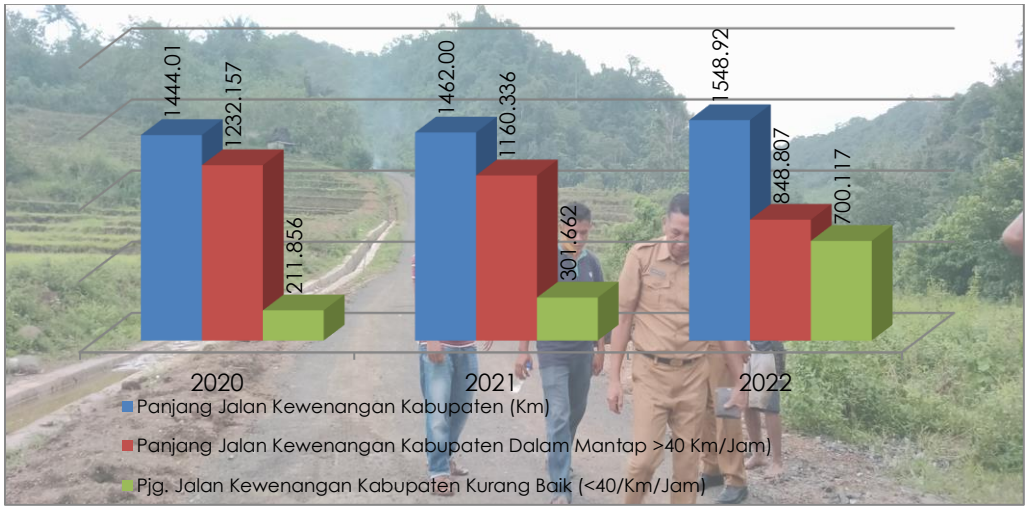

Sesuai Hasil Survei Ulang Data Base Jalan, panjang jalan Kabupaten Manggarai setiap tahun mengalami penambahan panjang jalan, hal disebabkan karena adanya penambahan/pembangunan ruas jalan baru yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tabel 2.13
Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Kewenangan Jalan	Jenis Pemukaan (KM)					Kondisi Permukaan (Km)			
			Hotmix	Aspal	Kerikil	Tanah	Tdk Dirinci	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2020	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108,935	0,00	12,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	17,16	1,50	26,44	0,00
		Kab. Manggarai	264,05	1022,06	74,54	83,38	0,00	768,40	463,76	110,76	101,10
		Desa	0,00	82,36	184,14	144,22	0,15	76,37	2,55	3,58	328,36
2	2021	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	15,16	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	297,426	918,746	128,360	110,119	7,347	1220,725	36,687	72,315	543,139
		Desa	0,00	106,059	168,090	136,571	0,150	84,957	12,120	9,132	304,661
3	2022	Nasional	108,935	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	15,16	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	293,750	1176,612	23,5920	52,450	2,520	552,468	296,339	69,130	630,987
		Desa	0,00	89,733	175,958	144,691	0,487	100,701	2,623	3,582	303,963

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	46.408.276.032,00	42.133.244.420,00	90,79
Total Anggaran	46.408.276.032,00	42.133.244.420,00	90,79

Sasaran 8 : *Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan*
Indikator Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun

Target 76,20 → Realisasi 72,311 → Capaian Kinerja 94,90% → SANGAT BAIK

Panjang drainase perkotaan yang terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 1.055,675 Km atau 72,311% dari total panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2021 (hasil survey tahun 2021) sepanjang 1462,00 Km. Realisasi 1.055,675 tersebut termasuk drainase perkotaan yang dibangun pada tahun 2022 sepanjang 0,11061 Km. Realisasi 72,31% dari target 76,20% maka capaian kinerjanya mencapai 94,90% kategori SANGAT BAIK.

Sasaran "*Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.405.443.606,00	5.091.027.422,00	94,18
Total Anggaran	5.405.443.606,00	5.091.027.422,00	94,18

Sasaran 9 : *Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan*
Indikator Persentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer

Target 81,71 → Realisasi 72,26 → Capaian Kinerja 88,43% → SANGAT BAIK

Realisasi indikator sasaran ini diperoleh dari perbandingan antara luas daerah terlayani irigasi primer dibagi luas daerah irigasi seluruhnya di Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 luas daerah irigasi terlayani irigasi primer adalah 4.330,99 Ha atau 72,26% dari total luas daerah irigasi Kabupaten Manggarai seluas 19.883,00 Ha. Realisasi 72,26 dari target 81,71 maka capaian dari indikator sasaran ini adalah 88,43% kategori SANGAT BAIK.

Sedangkan Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2022 adalah 302.369 Meter dengan rincian jaringan irigasi primer sepanjang 200.562 Meter, irigasi Sekunder 98.257 Meter dan irigasi Tersier sepanjang 3.550 Meter.

Sasaran "***Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan***" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	4.116.431.400,00	3.807.945.066,00	92,51
Total Anggaran	4.116.431.400,00	3.807.945.066,00	92,51

Sasaran 10 : ***Meningkatnya Pelayanan Perhubungan***

Indikator Rasio Konekvitas

Indikator Kinerja Lalulintas

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Konekvitas	Angka	0,81	0,74	91,44
2	Kinerja Lalulintas	Angka	46,22	21,74	47,03
Rata-rata					69,24
Kategori					CUKUP

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Perhubungan*" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut sebesar 69,24% kategori BAIK.

Indikator Rasio Konekvitas

Target 0,81 → Realisasi 0,74 → Capaian Kinerja 91,44% → SANGAT BAIK

Rasio Konektvitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

► IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab. Manggarai x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kab. Manggarai).

- *Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten = 66*
- *Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten = 72*
- *Bobot trayek = 1*
- *Bobot angkutan jalan = 70*

IK1 (angkutan jalan) = (66 x 1)/72

= 0,92

► IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kab. Manggarai x bobot lintas) dibagi (jumlah

kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut).

- *Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten (tidak termasuk sungai dan danau) = 10.*
- *Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah Kabupaten = 15*
- *Bobot lintas = 0,5*
- *Bobot SDP = 30*

IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (10 x 0,5)/15
= 0,33

Rasio Konektvitas = (0,92 x 70%) + (0,33 x 30%)
= 0,74

Indikator Kinerja Lalulintas

Target 46,22 → Realisasi 21,74 → Capaian Kinerja 47,03% → KURANG

$$\text{Kinerja Lalulintas} = \frac{\text{V (Volume Lalulintas)}}{\text{C (Kapasitas Jalan)}} \times 100$$

Realisasi capaian indikator sasaran ini adalah 21,74% dari target 46,22% dengan tingkat capaian kinerja 47,03% kategori KURANG. Realisasi 21,74% diperoleh dari jumlah volume angkutan jalan yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor tahun 2022 sesuai data Dinas Perhubungan dan SAMSAT Ruteng yang dirilis tahun 2022 sebanyak 46.214 unit. Sementara panjang jalan seluruhnya di Kabupaten Manggarai yang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinisi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa mencapai 2125,83 Km.

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Perhubungan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perhubungan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	3.266.071.013,00	3.228.642.796,98	98,85
Program Pengelolaan Pelayaran	937.580.000,00	48.709.700,00	5,20
Total Anggaran	4.203.651.013,00	3.277.352.497	77,96

Sasaran 11 : *Meningkatnya Ketahanan Pangan*

Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Target 74,60 → Realisasi 71,88 → Capaian Kinerja 96,35% → SANGAT BAIK

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Manggarai yang disajikan disini adalah IKP Tahun 2021 sesuai data/laporan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2022. Nilai IKD Kabupaten Manggarai sesuai data dalam laporan tersebut mencapai angka 71,88. Realisasi 71,88 dari target 74,60 maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 96,35% kategori SANGAT BAIK.

IKD Kabupaten Manggarai menempati peringkat ke-276 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dan peringkat ke-7 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT.

Sasaran "*Meningkatnya Ketahanan Pangan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8.679.000,00	8.679.000,00	100,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.516.000,00	5.516.000,00	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	360.385.500,00	346.372.996,00	96,11
Program Pengawasan Keamanan Pangan	4.593.000,00	3.793.000,00	82,58
Total Anggaran	379.173.500,00	364.361.374,69	96,09

Sasaran 12 : *Meningkatnya Stabilitas Harga Barang*

Indikator Indeks Harga Konsumen

Target 110,57 → Realisasi 113,54 → Capaian Kinerja 102,69% → MEMUASKAN

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Indeks Harga Konsumen Kabupaten Manggarai Tahun 2022 sesuai data BPS Provinsi NTT yang diperoleh berdasarkan wilayah inflasi yaitu kota Maumere mencapai angka 113,54. Realisasi 113,54 dari target 110,57 maka tingkat capaian dari indikator sasaran ini adalah 102,69% kategori kinerja MEMUASKAN.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting lainnya pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dan melaksanakan operasi pasar murah di beberapa tempat di Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi.

Sasaran *Meningkatnya Stabilitas Harga Barang* dicapai melalui program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.201.887.924,00, terserap Rp.145.783.840,00 atau 12,13%.

TUJUAN 5
MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

INDIKATOR Indeks Gini

Target 0,289 → Realisasi 0,291 → Capaian Kinerja 99,31% → SANGAT BAIK

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Angka realisasi Indeks Gini atau Gini Ratio yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 0,291 merupakan realisasi indeks gini tahun 2022. Realisasi 0,291 dari target tahun 2022 sebesar 0,289 sehingga capaiannya adalah sebesar 99,31%.

INDEKS GINI KAB. MANGGARAI

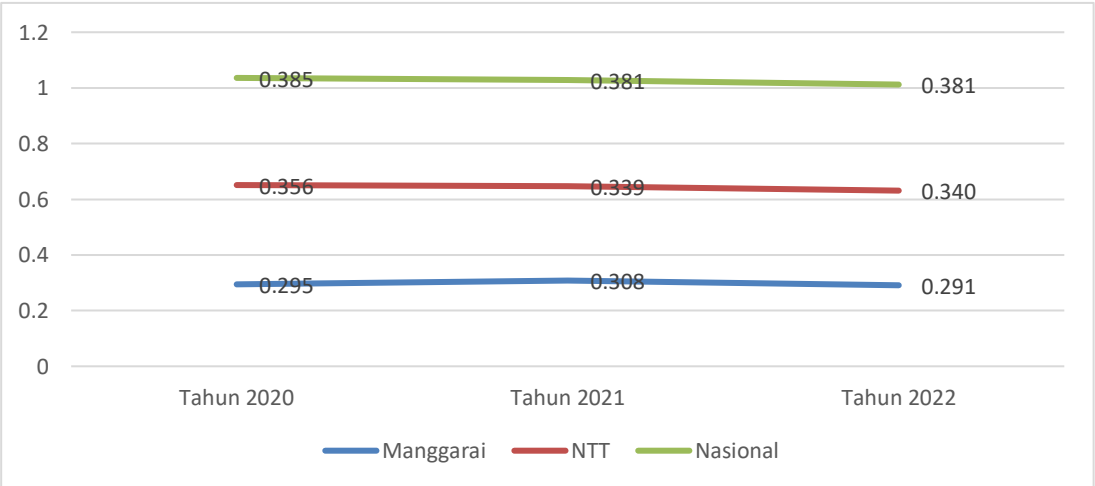

Indeks Gini Kabupaten Manggarai dalam kurun 2020-2022 berfluktuatif dari 0,295 tahun 2020 naik menjadi 0,308 tahun 2021 dan kembali turun menjadi 0,291 tahun 2022. Realisasi 0,291 tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah dan masih lebih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks gini Provinis NTT yang mencapai 0,340 dan Nasional 0,381 di tahun yang sama.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui peningkatan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN*, didukung oleh 1 (Satu) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	90,00	47,80	53,11
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	50,00	0,35	0,71
Rata-rata					*26,91*
Kategori					*KURANG*

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut di atas adalah 26,91% kategori KURANG.

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Target 90,00 → Realisasi 47,80 → Capaian Kinerja 53,19% → KURANG

Data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai di Kabupaten Manggarai, sampai dengan tahun 2022 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 159 unit. Dari 159 unit koperasi tersebut yang meningkat SHU-nya hanya 76 unit atau 47,80%. Realisasi 47,80 dari target 90,00% sehingga capaiannya adalah 53,19% kategori KURANG.

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

Target 50,00 → Realisasi 0,35 → Capaian Kinerja 0,71% → KURANG

Data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Usaha Mikro yang naik kelas menjadi kecil di Kabupaten Manggarai sebanyak 13 unit atau 0,35% dari total usaha mikro sebanyak 3.678 unit.

Sasaran "*Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	387.200.000,00	375.560.506,00	96,99
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	11.360.000,00	11.360.000,00	100,00
Program Pengembangan UMKM	12.845.800,00	12.845.500,00	100,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	11.852.000,00	11.852.000,00	100,00
Total Anggaran	423.257.800,00	411.618.402,99	97,25

TUJUAN 6

MENURUNNYA KEMISKINAN

INDIKATOR Tingkat Kemiskinan

Target 19,47 → Realisasi 19,84 → Capaian Kinerja 98,10% → SANGAT BAIK

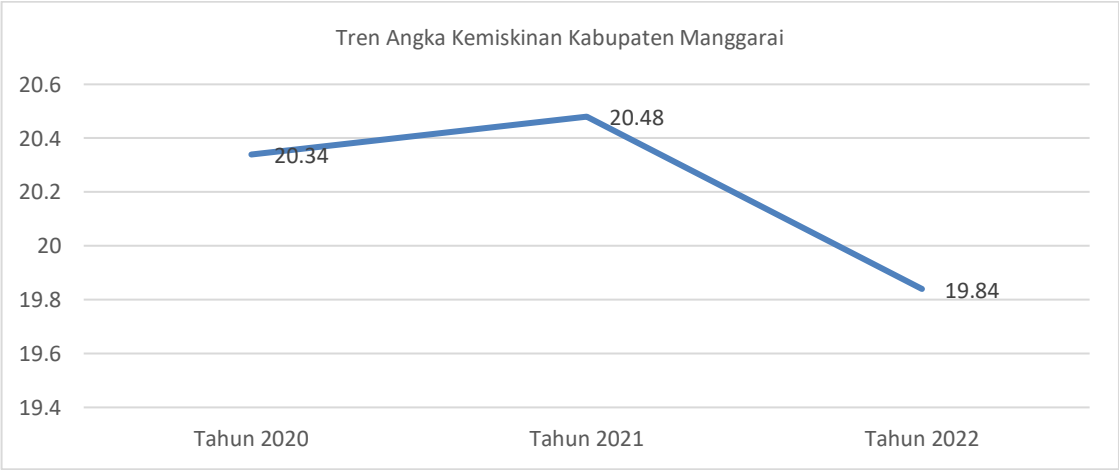

Angka realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mangarai tahun 2022 sebesar 19,84% atau sekitar 69.68 ribu jiwa. Realisasi 19,84% dari target tahun 2022 sebesar 19,47% sehingga capaiannya adalah 98,10%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2022 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 20,24% naik menjadi 20,48% tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 19,84% di tahun 2022.

Tabel 2.14
Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Manggarai		Manggarai Barat		Manggarai Timur	
		Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2020	69.52	20,34	49.40	17,71	76.69	26,52
2	2021	71.03	20,48	51.15	17,92	77.17	26,50
3	2022	69.68	19,84	49.95	17,15	74.55	25,35

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai lebih banyak/tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat namun lebih sedikit/rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mengurangi indikator ciri-ciri kemiskinan antara lain bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih dan lain-lain.

Dalam pencapaian tujuan *MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Menurunnya Pengangguran*

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Target 3,09 → Realisasi 3,50 → Capaian Kinerja 86,73% → SANGAT BAIK

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran } \textbf{(6.616 Org)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } \textbf{(189.198 Org)}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,

(4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 3,50% atau turun 0,20 point dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70%.

Grafik 2.14
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

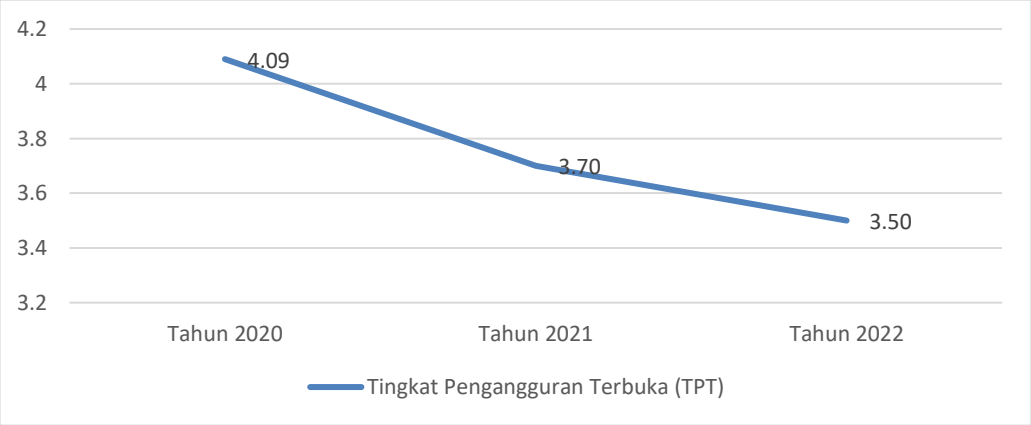

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mangarai 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 4,09% tahun 2020 menjadi 3,50% di tahun 2022 dan diharapkan terus mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang.

TPT Kabupaten Manggarai tahun 2022 masih lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 3,54% dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 4,91% namun lebih tinggi dari Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,89% di tahun yang sama.

Sasaran "*Menurunnya Pengangguran*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	37.787.324,00	37.685.540,00	99,73
Program Penempatan Tenaga Kerja	25.141.000,00	25.101.000,00	99,84
Program Hubungan Industrial	62.163.600,00	60.923.600,00	98,01
Total Anggaran	125.091.924,00	123.710.437,5768	98,90

Startegi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja/kesempatan kerja baru.
3. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.
4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Manggarai.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni*

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Rumah Layak Huni	Angka	90,75	94,37	103,99
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	78,092	83,13	106,46
3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	88,00	85,81	97,51
Rata-rata					*102,65*
Kategori					*MEMUASKAN*

Rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut di atas adalah 102,65%, kategori MEMUASKAN.

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Target 90,75 → Realisasi 94,37 → Capaian Kinerja 103,99% → MEMUASKAN

Realisasi 94,37% diperoleh dari jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2022 sebanyak 64.275 unit berbanding dengan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Manggarai sebanyak 68.111 unit.

Untuk mendukung capaian indikator "Rasio Rumah Layak Huni" Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan pada tahun 2022 memberikan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebanyak 180 unit dan bantuan meteran listrik sebanyak 90 unit.

Tabel 2.15
Data Bantuan Bahan Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Rumah Bantuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Total Rumah Bantuan
1	s/d 2018	10.910	45.403.280.941,0	APBD II, APBD I, DAK ABPD II, DAU APBD II, SNVT-APBN dan APBDes	10.910
2	2019	100	1.750.000.000,00	SNVT-APBN	11.010
		19	332.500.000,00	APBD I	11.029
		170	2.975.000.000,00	DAK APBD II	11.199
		104	1.560.000.000,00	DAU APBD II	11.303
		2.323	26.263.623.316,00	APBDes	13.626
3	2020	28	2.812.520.000,00	KSPN-APBN	13.654
		200	3.500.000.000,00	SNVT/BSPS-APBN	13.854
		135	2.362.500.000,00	DAK APBD II	13.989
		50	750.000.000,00	DAU APBD II	14.039
		1.547	19.324.276.298,00	APBDes	15.586
4	2021	126	2.520.000.000,00	DAK APBD II	15.712
		140	2.450.000.000,00	SNVT/BSPS-APBN	15.852
		801	9.687.543.127,00	APBDes	16.653
5	2022	180	6.300.000.000,00	DAK APBD II	16.833
Total			131.472.010.562,00		16.833

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan & Dinas PMD Kab. Manggarai, 2022

Tabel 2.16
Data Bantuan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Meteran Listrik (Unit)	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Total Meteran Listrik (Unit)
1	2019	600	1.457.130.000	APBD II	*600*
2	2020	468	1.158.709.200	APBD II	1.068
3	2021	90	240.000.000	APBD II	1.158
4	2022	90	269.010.000	APBD II	1.248
Total			3.124.849.200	APBD II	1.248

Sumber : Dinas PKPP Kab. Manggarai, 2022

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Target 78,092 → Realisasi 83,13 → Capaian Kinerja 106,46% → MEMUASKAN

Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, jumlah Rumah Tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebanyak 78.636 KK atau 83,13% dari total rumah tangga/KK yang ada di Kabupaten Manggarai. Realisasi 83,13 dari target 78,092 maka capaian kinerja menjadi 106,46% kategori MEMUASKAN.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Target 88,00 → Realisasi 85,81 → Capaian Kinerja 97,51% → SANGAT

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap air minum per 31 Desember 2022 sebanyak 81.176 RT/KK atau 85,81% dari total RT/KK di Kabupaten Menggarai sebanyak 94.598 RT/KK. Realisasi 85,81% dari target 88,00 menunjukan capaian kinerja dari indikator sasaran ini sebesar 97,51% kategori kinerja SANGAT BAIK.

Sasaran "*Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Kawasan Permukiman	7.353.602.600,00	7.352.152.600,00	99,98
Program Pengembangan Perumahan	128.310.000,00	126.510.000,00	98,60
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.016.799.450,00	1.006.463.950,00	98,98
Program Pengembangan Permukiman	4.103.975.819,00	3.339.350.052,00	81,37
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.311.000.000,00	5.250.861.375,00	98,87
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.256.812.549,00	9.099.672.208,00	98,30
Total Anggaran	27.170.500.418,00	26.175.010.761,10	96,34

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang*

Indikator Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali

Target 22,00 → Realisasi 23,18 → Capaian Kinerja 105,38% → MEMUASKAN

Hasil perhitungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai pengampu dari indikator sasaran ini, realisasi cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali di Kabupaten Manggarai adalah 23,18% dari target 22,00% dengan tingkat capaian kinerja 105,38% kategori kinerja MEMUASKAN.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	965.132.620,00	909.004.820,00	94,18
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	225.709.800,00	168.366.180,00	74,59
Program Penataan Bangunan Gedung	461.452.800,00	395.446.800,00	85,70
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	257.028.700,00	192.365.500,00	74,84
Total Anggaran	1.909.323.920,00	1.665.183.300,00	87,21

TUJUAN 7

MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA

INDIKATOR Indeks Desa Membangun (IDM)

Target 0,601 → Realisasi 0,618 → Capaian Kinerja 102,83% → MEMUASKAN

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2022 adalah 0,618 dari target 0,601 maka capaian kinerja 102,83% kategori MEMUASKAN.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA*, didukung oleh 1 (Satu) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 1 : *Meningkatnya Keberdayaan Desa*

Indikator Persentase Status Desa Berkembang

Target 42,06→ Realisasi 68,28 → Capaian Kinerja 162,33% → MEMUASKAN

Tabel 2.17
Status IDM Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Status Desa	Jumlah	Persentase
1	Mandiri	0	0,00
2	Maju	4	2,76
3	Berkembang	99	68,28
4	Tertinggal	42	28,97
5	Sangat Tertinggal	0	0,00
Total Desa		145	100,00

Sumber : Dinas PMD Kab. Manggarai, 2022

Langkah dan program dalam pencapaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Manggarai sebagai kategori desa berkembang yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa dengan program kerjasama antar desa dan program penataan desa.
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat desa dengan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan program Administrasi Pemerintah Desa.

Sasaran "*Meningkatnya Keberdayaan Desa*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	412.918.000,00	407.238.000,00	98,62
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	909.191.400,00	907.757.595,00	99,84
Program Penataan Desa	1.790.593.100,00	1.025.828.401,00	57,29
Total Anggaran	3.112.702.500,00	2.340.824.251,76	75,20

TUJUAN 8

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target 81,36 → Realisasi 72,98 → Capaian Kinerja 89,70% → SANGAT BAIK

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Kinerja meningkatnya kualitas lingkungan yang direpresentasikan dengan Indikator Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar sebesar 89,70% dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Capaian ini diukur dari target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebesar 81,36% dan mampu terealisasi sebesar 72,98%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbentuk dari 3 indikator pembentuk yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan
72,98	50,00	93,82	73,89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai :

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient).
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan sampah, melestarikan sumber mata air, melakukan penanaman terhadap lahan kritis dan menjaga sungai bersih.
3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Air*

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Target 71,50 → Realisasi 50,00 → Capaian Kinerja 69,93% → CUKUP

Kualitas air merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian indeks kualitas air pada 2 (dua) aliran sungai yaitu DAS Wae

Mese dan DAS Wae Pesi. Hasil pengujian menunjukan nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 50,00.

Realisasi IKA 50,00 dari target 71,50 maka capaian kinerjanya adalah 69,93% dengan kategori CUKUP. Indeks Kualitas Air dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 70,00 tahun 2020 menjadi 60,00 tahun 2021 dan 50,00 di tahun 2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Air*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	109.131.800,00	108.302.800,00	99,24
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	22.887.800,00	22.887.800,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	193.705.000,00	193.668.635,00	99,98
Total Anggaran	325.724.600,00	324.859.534,22	99,73

Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Udara*

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

Target 88,37 → Realisasi 93,82 → Capaian Kinerja 106,17% → MEMUASKAN

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x\ (I_{EU} - 0,1)\right)$$

Pada tahun 2022, hasil pengujian dan perhitungan indeks kualitas udara dilaksanakan melalui aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian indikator IKU tahun 2022 106,17% dengan kategori MEMUASKAN diukur dari target IKU yang ditetapkan sebesar 88,37% dan mampu terealisasi sebesar 93,82% dengan rating BAIK. Indeks Kualitas Udara dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 87,87 tahun 2020 menjadi 92,57 tahun 2021 dan 93,82 di tahun 2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Udara*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	339.810.000,00	338.827.612,00	99,71
Total Anggaran	339.810.000,00	338.827.711,71	99,71

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*

Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Target 85,32 → Realisasi 73,89 → Capaian Kinerja 86,60% → SANGAT

IKL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam IKLH. Perhitungan ini akan mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Capaian indikator IKTL tahun 2022 86,60% dengan kategori SANGAT BAIK diukur dari target IKTL yang ditetapkan sebesar 85,32% dan mampu terealisasi sebesar 73,89%. IKTL tahun 2020 mencapai 85,32%, turun menjadi 73,89% tahun 2021-2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*" tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun pada tahun 2022, program ini tidak disertai dengan anggaran.

Grafik 2.14
Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2022

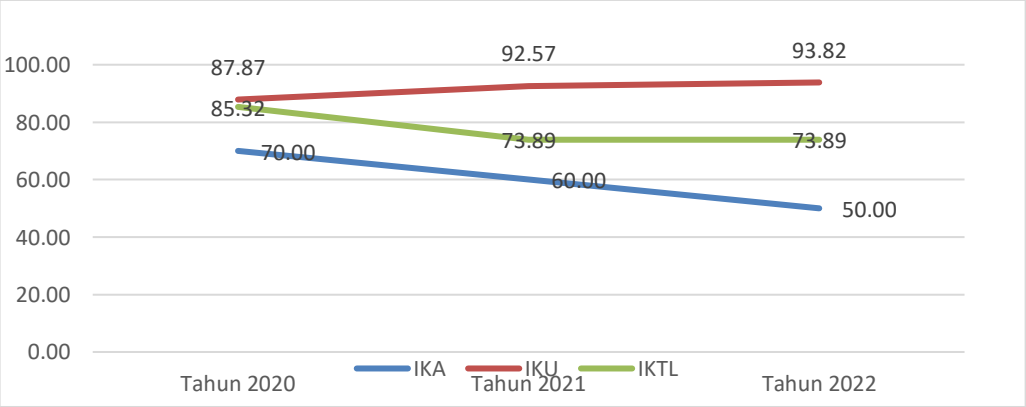

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Data pada grafik tersebut di atas menunjukan bahwa 3 (tiga) indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terus mengalami peningkatan adalah Indeks Kualitas Udara.

Sasaran 4 : *Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3*

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Sampah Tertangani	Persen	20,97	9,05	43,16
2	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Persen	26,13	69,64	266,52
Rata-rata					*154,84*
Kategori					*MEMUASKAN*

Sasaran "Meningkatan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Rata-rata capaian kinerja dari ke-2 indikator sasaran tersebut adalah 154,84%, kategori kinerja MEMUASKAN.

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Target 20,97 → Realisasi 9,05 → Capaian Kinerja 43,16% → KURANG

Data Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah yang tertangani tahun 2022 mencapai 73.714 M^3 per total volume produksi sampah Kabupaten Manggarai 814.395 M^3. Sesuai data tersebut maka realisasi dari indikator sasaran ini adalah 9,05% dari yang ditargetkan 20,97% dan capaian kinerjanya 43,16% kategori KURANG.

Faktor Pendorong tercapainya kinerja :

Tersedianya anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu efektifnya koordinasi dengan semua pihak yang terkait serta arahan dan dorongan dari pimpinan juga menjadi faktor pendorong. Realisasi anggaran khusus untuk operasional persampahan tahun 2022 adalah sebesar Rp.3.506.948.432. Jumlah tenaga kebersihan dan sopir pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 59 orang. Selain itu, tenaga operator roda 3 dari setiap kelurahan di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 20 orang. Sarana pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup antara lain dumptruck 5 unit dengan Kapasitas 6 m3, Armroll 3 unit, Roda Tiga 2 unit dan Container 7 unit.

Faktor Penghambat tercapainya kinerja:

Target persentase sampah tertangani merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2022 hanya mencakup 3

kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal, dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong. Sementara pada wilayah Kecamatan Cibal dan Ruteng hanya dilaksanakan di wilayah Cancar dan Pagal serta hanya dilakukan sekali dalam waktu satu minggu. Selain itu pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga BBM sehingga rotasi pengangkutan sampah ke TPA berkurang.

Solusi :

Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan sarana dan prasarana dan mobilitas pelayanan persampahan di Kabupaten Manggarai.

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

Target 26,13 → Realisasi 69,64 → Capaian Kinerja 266,84% → MEMUASKAN

Realisasi indikator sasaran ini 69,64% dari target 26,13 dengan capaian kinerja 266,84% kategori MEMUASKAN. Realisasi 69,64% diperoleh dari hasil perbandingan jumlah pelaku usaha yang mengelolah limbah B3 sesuai ketentuan sebanyak 39 pelaku usaha dari 56 pelaku usaha penghasil limba B3.

Sasaran "*Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.660.000,00	15.600.000,00	99,62
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	0,00	0,00
Program Pengelolaan Persampahan	6.470.873.533,00	5.469.031.432,00	84,52
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	63.341.000,00	63.341.000,00	100,00
Total Anggaran	6.549.874.533,00	5.547.972.432	84,70

TUJUAN 9
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR Indeks Reformasi Birokrasi

Target 50,10 (CC) → Realisasi 53,27 (CC) → Capaian Kinerja 106,33% → MEMUASKAN

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mangarai telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/120/RB.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Hal Undangan Pelaksanaan Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut, tertuang dalam surat Nomor B/1040/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah 53,27 dengan kategori CC. Realisasi 53,27 dari target 50,10 maka capaian kinerja dari indikator tujuan/IKU ini adalah 106,33 kategori MEMUASKAN.

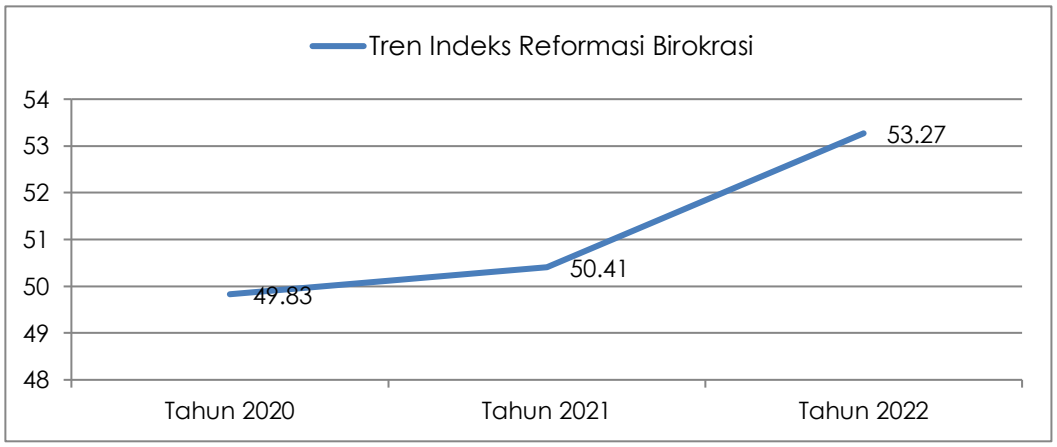

Tren tiga tahun terakhir, nilai RB Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan sedikit peningkatan dari 49,83 kategori C Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 50,41 kategori CC tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 53,27 kategori CC di tahun 2022.

Tabel 2.18
Hasil Evaluasi RB Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

NO	KABUPATEN	REFORMASI BIROKRASI		
		NILAI	KATEGORI	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi NTT		63,10	B	CUKUP BAIK
1	Kota Kupang	64,07	B	CUKUP BAIK
2	Manggarai Barat	53,79	CC	CUKUP
3	Manggarai	53,27	CC	CUKUP
4	Ngada	50,19	CC	CUKUP
5	Nagekeo	50,01	CC	CUKUP
6	Timor Tengah Utara	49,03	C	BURUK
7	Flores Timur	48,97	C	BURUK
8	Sikka	48,03	C	BURUK
9	Sumba Barat	45,80	C	BURUK
10	Manggarai Timur	45,14	C	BURUK
11	Ende	44,41	C	BURUK
12	Sumba Timur	44,27	C	BURUK
13	Lembata	43,52	C	BURUK
14	Belu	43,24	C	BURUK
15	Timor Tengah Selatan	42,29	C	BURUK
16	Kabupaten Kupang	41,93	C	BURUK
17	Sabu Raijua	41,68	C	BURUK
18	Rote Ndao	41,14	C	BURUK
19	ALOR	40,06	C	BURUK
20	Sumba Tengah	40,01	C	BURUK
21	Sumba Barat Daya	37,82	C	BURUK
22	Malaka	30,91	D	SANGAT BURUK

Sumber: LHE KemenPANRB Tahun 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 menempati urusan ke-3 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai didukung oleh:

1. Sosialisasi *road map* reformasi birokrasi dan rencana kerja reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Internalisasi core values BerAkhlak.
3. Melakukan identifikasi kebijakan yang tumpang tindih.
4. Optimalisasi peran APIP (maturitas SPIP level 2 dan kapasitas APIP level 3).
5. Implementasi kebijakan pengawasan internal seperti pelaporan LHKPN, SPIP, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

6. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tatalaksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam pencapaian tujuan *TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel*

Indikator Nilai SAKIP

Indikator Peringkat EKPPD

Indikator Opini BPK

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP	Angka	63,10 (B)	63,90 (B)	101,27
2	Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi	Tinggi	100,00
3	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Perlu Perbaikan	58.9308 B (Perlu Perbaikan)	100,00
5	Indeks Kapasitas Fiskal	Angka	Sedang (0,727)	0,546 (Rendah)	75,10
6	Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Angka	Level 3	Level 2	66,67
Rata-rata					*90,51*
Kategori					*SANGAT BAIK*

Rata-rata capaian sasaran *Meningkatnya Birokrasi yang Bersih Dan Akuntabel* tahun 2022 adalah 90,51% kategori SANGAT BAIK.

Indikator Nilai SAKIP

Target 63,10 → Realisasi 63,90 → Capaian Kinerja 101,27% → MEMUASKAN

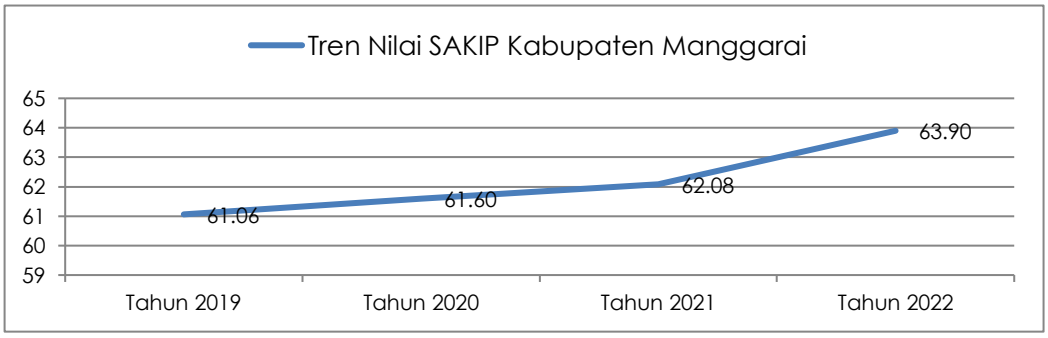

Sumber : LHE Kementerian PANRB

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/1111/AA.05/2022 menunjukan nilai sebesar 63,90 dengan predikat "B". Rincian hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,41
2	Pengukuran Kinerja	30	16,99
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45
	Nilai Hasil Evalasi	100	63,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Tabel 2.19
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

KABUPATEN		SAKIP		
		NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
Pemerintah Provinsi NTT		63,65	B	BAIK
1	Kota Kupang	64,44	B	BAIK
2	Manggarai	63,90	B	BAIK
3	Nagekeo	63,35	B	BAIK
4	Manggarai Barat	62,16	B	BAIK
5	Sikka	61,91	B	BAIK
6	Sumba Timur	61,41	B	BAIK
7	Manggarai Timur	60,85	B	BAIK
8	Timor Tengah Selatan	57,84	CC	CUKUP
9	Ngada	54,91	CC	CUKUP
10	Kabupaten Kupang	54,81	CC	CUKUP
11	Rote Ndao	53,89	CC	CUKUP
12	Ende	53,33	CC	CUKUP
13	Sumba Tengah	52,70	CC	CUKUP
14	Flores Timur	52,47	CC	CUKUP
15	Alor	51,79	CC	CUKUP
16	Belu	51,78	CC	CUKUP
17	Sumba Barat	51,55	CC	CUKUP
18	Timor Tengah Utara	51,15	CC	CUKUP
19	Malaka	50,28	CC	CUKUP
20	Lembata	50,23	CC	CUKUP
21	Sabu Raijua	47,48	C	KURANG
22	Sumba Barat Daya	43,44	C	KURANG

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Kabupaten Manggarai menempati Peringkat ke-2 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP Kabupaten Manggarai :

1. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melaui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi https://sakip.manggaraikab.go.id yang saat ini sedang dalam proses penginputan data.

Indikator Peringkat EKPPD

Target Tinggi→ Realisasi Tinggi → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN

Nilai dan Peringkat EKPPD yang disajikan disini merupakan nilai dan peringkat EKPPD tahun 2018 yang diperoleh pada tahun 2020. Nilai dan Peringkat EKPPD tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai saat kami menyusun laporan ini belum menerima hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Indikator Opini BPK

Target WTP→ Realisasi WTP → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN

Opini BPK terhadap LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 belum keluar, sehingga dalam laporan ini capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2021 berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 91.A/LHP/XIX.KUP/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, bahwa Opini atas Laporan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Manggarai terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan telah meraih sebanyak 4 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Hal ini membuktikan kualitas tata kelola keuanga Kabupaten Manggarai mampu dijaga dengan kualitas baik.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Target Perlu Perbaikan→ Realisasi 58.9308 B (Perlu Perbaikan) → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 348/KEP/HK/2022 Tanggal tanggal 1 November 2022 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam lampiran Keputusan Gubernur tersebut, hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

No	Kabupaten	Dimen-si 1	Dimen-si 2	Dimen-si 3	Dimen-si 4	Dimen-si 5	Dimen-si 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	Manggarai	6.5784	12.7586	4.6552	15	4.9387	15	58.9308	Perlu Perbaikan	B

Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disajikan pada tahun 2022 ini merupakan realisasi IPKD tahun 2021 dimana Indeks Total mencapai 58.9308 Kategori Perlu Perbaikan dengan nilai B. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 100%.

Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

Target Sedang (0,727) → Realisasi Rendah (0,546) → Capaian Kinerja 75,10% → BAIK

Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Manggarai 0,546 (kategori Rendah). Realisasi tersebut menunjukan capaian kinerja terhadap indikator sasaran ini adalah 75,10 kategori kinerja BAIK dari target 0,727 (kategori Sedang).

Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

Target Level 3 → Realisasi Level 2 → Capaian Kinerja 66,67% → CUKUP

Nilai Indeks Manajemen Resiko Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,310 atau berada pada level 2 (*risk aware*) sesuai hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai level 2 tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu level 3, dengan tingkat capaian 66,67 kategori CUKUP.

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi Pegawai terkait manajemen risiko.
2. Hasil penilaian risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terdahap Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
4. Hasil penilaian risiko dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan baik resiko yang strategis maupun yang operasional.

Sasaran "*Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappelitbanda, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	681.301.600,00	609.362.772,00	89,44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	596.790.424,00	494.638.488,00	82,88
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	342.586.900,00	302.468.411,00	88,29
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	78.115.000,00	77.875.000,00	99,69
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.911.659.984,00	4.654.538.914,00	94,77
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.147.762.578,00	13.029.561.605,00	99,10
Program Perekonomian dan Pembangunan	730.792.224,00	685.041.570,00	93,74
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.728.400.000,00	8.808.224.828,00	82,10
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	194.044.450.216,00	191.395.247.479,00	98,63

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappelitbanda, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.273.624.648,00	526.666.265,00	41,35
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.395.188.086,00	1.371.179.210,00	98,28
Program Penyelenggaraan Pengawasan	644.173.000,00	635.409.300,00	98,64
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	9.410.000,00	7.761.200,00	82,48
Total Anggaran	228.584.254.660,00	222.597.975.042,00	97,38

Sasaran 2 : *Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel*

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 2.20
Indikator Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks SPBE	Angka	2,10	1,76	83,81
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71,00 (Sedang)	47,73 (Sangat Rendah)	67,23
Rata-rata					*75,52*
Kategori					*BAIK*

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel adalah 75,52 kategori BAIK.

Indikator SPBE

Target 2,10 → Realisasi 1,76 → Capaian Kinerja 83,81% → BAIK

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian

mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

4,2 - 5,0 = Memuaskan

3,4 - <4,2 = Sangat Baik

2,6 - <3,5 = Baik

1,8 - <2,6 = Cukup

<1,8 = Kurang

Target Indeks SPBE Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,10 sedangkan realisasi pada tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SBPE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mencapai 1,76 dengan tingkat capaian kinerja 83,81% kategori BAIK. Walaupun tidak mencapai target, realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 1,55.

Tabel 2.21
Realisasi Indeks SPBE dari tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Indeks SPBE	Kategori	Keterangan
2020	1,91	CUKUP	-
2021	1,55	KURANG	Berkurang 0,36 dari tahun 2020
2022	1,76	KURANG	Bertambah 0,21 dari tahun 2021

Faktor pendukung pencapaian kinerja Indeks SPBE:

a. Walau masih berada pada kategori KURANG, namun terdapat peningkatan nilai sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 1,55 dengan kategori yang sama. Peningkatan ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai sudah menerapkan beberapa aplikasi umum dalam memberikan pelayanan publik. Misalnya Aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengawasan Internal pada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menggunakan aplikasi SILPPD dan OMSPAN serta Layanan Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan E-SAKIP Reviu milik Kementerian PANRB.
b. Adanya kemudahan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat karena adanya penggunaan aplikasi untuk beberapa proses bisnis.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Indeks SPBE

Realisasi Indeks SPBE 1,76 tahun 2022 ini menggambarkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Manggarai masih berada pada kategori KURANG. Hal ini dapat dijelaskan sbb:

a. Pada tahun 2022, penilaian SPBE dilaksanakan secara mandiri melalui dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi tanpa melalui tahapan Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.
b. Kebijakan penerapan SPBE di Kabupaten Manggarai belum memenuhi standar kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
c. Terbatasnya infrastruktur TIK dalam mendukung penyelenggaraan SPBE di daerah seperti jaringan intra pemerintah yang berfungsi menghubungkan antar perangkat daerah. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah *command center* (sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan dan mengintegrasikan beberapa aplikasi), sehingga pimpinan atau pengambil keputusan bersama-sama dengan tim melakukan pertemuan, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi antara lain tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan, pemulihan, langkah pengadaaan dan penyediaan informasi publik serta pemantauan harga-harga pasar dan realisasi pendapatan.

Solusi dalam peningkatan pencapaian kinerja Indeks SPBE

a. Melakukan rapat dengan Tim Evaluator SPBE Kementerian PANRB untuk meminta penjelasan rinci terkait Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 melalui Surat Nomor 44/Diskominfo/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Penjelasan. Rapat secara daring sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 yang diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo beserta staf yang menangani SPBE. Rapat ini sangat penting untuk melihat kekurangan pada saat evaluasi SPBE tahun 2022 dan melakukan perbaikan untuk tahun 2023.
b. Mengajukan usulan perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup 47 Tahun 2022.
c. Mengajukan usulan penetapan Perbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan

Perbup Nomor 10 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai.

d. Menyediakan jaringan intra pemerintah dan *command centre* untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan karena tersedianya lokasi terpusat yang menghubungkan beberapa layanan.
e. Membangun kolaborasi dengan konsep *pentahelix* untuk mewujudkan penerapan SPBE yang lebih baik.
f. Terus berproses, terus bergerak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Manggarai.

Indikator Profesionalitas ASN

Target 71,00 (Sedang) → Realisasi 47,73 (Sangat Rendah)→ Capaian Kinerja 67,23% → CUKUP

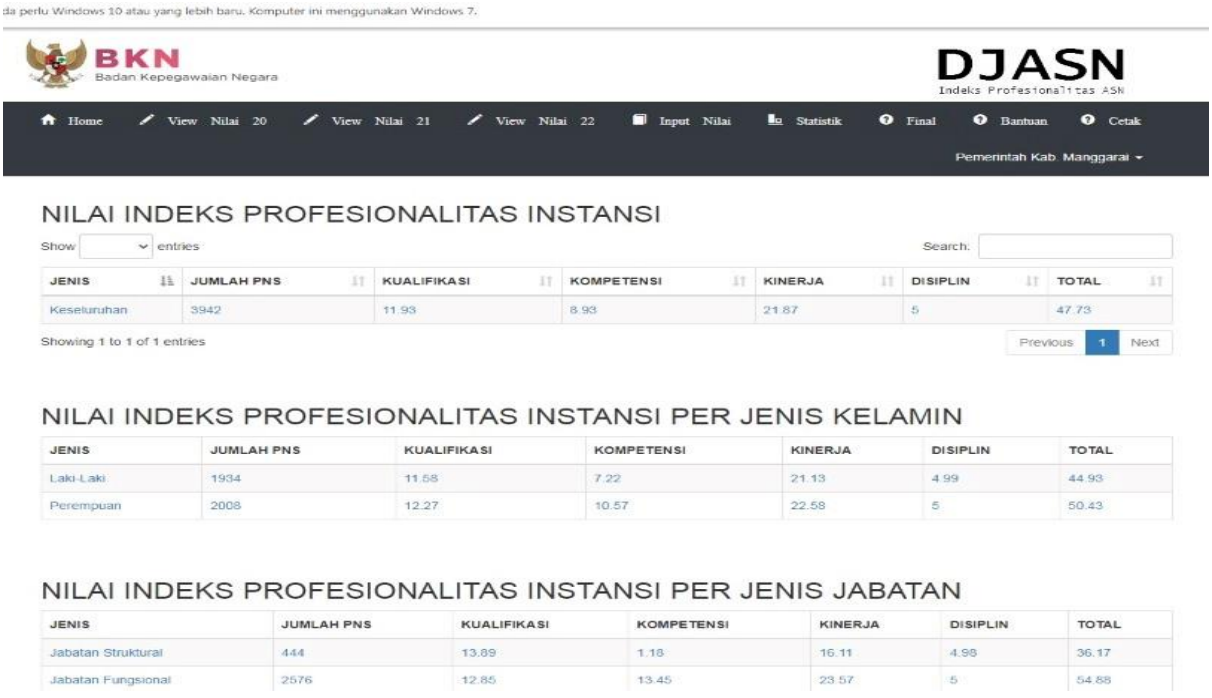
da perlu Windows 10 atau yang lebih baru. Komputer ini menggunakan Windows 7.

BKN
Badan Kepegawaian Negara

DJASN
Indeks Profesionalitas ASN

Home | View Nilai 20 | View Nilai 21 | View Nilai 22 | Input Nilai | Statistik | Final | Bantuan | Cetak

Pemerintah Kab. Manggarai

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

Show entries Search:

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	3942	11.93	8.93	21.87	5	47.73

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS KELAMIN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	1934	11.58	7.22	21.13	4.99	44.93
Perempuan	2008	12.27	10.57	22.58	5	50.43

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS JABATAN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Struktural	444	13.89	1.18	16.11	4.99	36.17
Jabatan Fungsional	2576	12.85	13.45	23.57	5	54.88

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 47,73 atau tingkat profesionalitas Sangat Rendah.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai mencakup 4 (empat) dimensi:

a) Dimensi kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

b) Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

c) Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

d) Dimensi Disiplin

Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bertujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar dan akurat. Capaian Indeks Profesionalitas Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Manggarai mencapai 47,73%. Hasil Indeks Profesionalitas Pegawai ini diambil dari Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui link sistem informasi Indeks Profesionalitas ASN dari Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara dengan Jumlah PNS yang masuk dalam Aplikasi sebanyak 3.942 orang dengan rincian capaian:

- Dimensi Kualifikasi sebesar : 11,93% dari bobot penilaian sebesar : 25%
- Dimensi Kompetensi : 8,93% dari bobot penilaian sebesar : 40%
- Dimensi Kinerja : 21,87% dari bobot penilaian sebesar : 30%
- Dimensi Disiplin : 5% dari bobot penilaian sebesar : 5%

Faktor yang menghambat peningkatan nilai IP ASN:

- Sebagian ASN belum mengikuti diklat sesuai persyaratan jabatan.
- Sebagian besar ASN belum menyampaikan sertifikat diklat/seminar/workshop /bimtek ke BKPSDMD untuk selanjutnya BKPSDMD menginput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Lagkah-langkah yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan nilai IP ASN

- Mengikuti diklat sesuai persayaratan jabatan (diklat PIM, diklat Fungsional dan Teknis).
- Melaporkan secara berkala diklat teknis dan diklat fungsional ke BKPSDMD untuk dapat diinput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Sasaran "*Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	683.003.404,00	677.900.980,00	99,25
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	744.824.500,00	735.012.689,00	98,68
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	83.680.000,00	83.236.800,00	99,47
Program Kepegawaian Daerah	4.342.786.450,00	3.881.398.311,00	89,38
Total Anggaran	5.854.294.354,00	5.377.548.780,00	91,86

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima*

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Target 80,00 → Realisasi 84,54 → Capaian Kinerja 105,68% → MEMUASKAN

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105,68% dan termasuk predikat MEMUASKAN.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 13 unit organisasi, terdiri dari 11 Perangkat Daerah, 2 UPT/UPTD. Capaian IKM tahun 2022 juga lebih baik dibandingkan IKM tahun 2021 yang terealisasi sebesar 84,39 atau meningkat 0,18%.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 per satuan organisasi dan pemeringkatannya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM 2022
1	Dinas PMPTSP	A	Sangat Baik	89,65
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	A	Sangat Baik	98,51
3	Kecamatan Satar Mese	A	Sangat Baik	94,01
4	Dinas PPO	B	Baik	88,13
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik	80,37
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	Baik	78,92
7	Dinas Sosial	B	Baik	86,17
8	Kecamatan Lelak	C	Kurang Baik	72,48
9	Kecamatan Satar Mese Barat	B	Baik	80,52
10	Kecamatan Langke Rembong	B	Baik	80,52
11	Kecamatan Reok	B	Baik	83,47
12	RSUD Ruteng	B	Baik	81,99

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM 2022
13	Puskesmas Kota	B	Baik	84,31
IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai		B	Baik	84,54

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan Nilai IKM Kabupaten Manggarai :

1. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tatalaksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Meningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik seperti pelaksanaan survei IKM, sosialisasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kecamatan (12) Kecamatan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.374.722.800,00	1.356.082.800,00	98,64
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	307.101.000,00	287.371.000,00	93,58
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	753.995.400,00	737.863.970,00	97,86
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	624.020.800,00	622.177.800,00	99,70
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.899.000,00	30.899.000,000	100,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	259.806.472,00	247.108.864,00	95,11
Program Pendaftaran Penduduk	242.753.592,00	237.536.130,00	97,85
Program Pencatatan Sipil	275.601.268,00	270.584.080,00	98,18
Program Pengelolaan Arsip	119.061.800,00	118.561.800,00	99,58
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	132.553.800,00	132.447.400,00	99,92
Total Anggaran	4.120.515.932,00	4.040.633.824,43	98,06

IKU PREVALENSI STUNTING

Target 19,40 → Realisasi 16,24 → Capaian Kinerja 116,30% → MEMUASKAN

Jumlah kasus stunting di Kabupaten Manggarai masih cukup tinggi. Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan (*hasil pengukuran pada Agustus 2022*), dari 26.563 Balita yang diukur, terdapat 4.313 Balita masuk kategori *stunting* atau sebesar 16,24% dari target 19,40% dengan capaian kinerja 116,30%.

IKU Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026 dijadikan Indikator Kinerja Utama.

Status Gizi Balita
Berdasarkan Bulan Penimbangan Balita Agustus 2022

Status gizi berdasarkan panjang/tinggi badan berbanding usia Balita *stunting*/pendek 4.313 (16,20 %)	Status gizi berdasarkan berat badan berbanding panjang/tinggi badan Balita *wasting*	Status gizi berdasarkan berat badan berbanding usia Balita *underweight* 3.384 (12,7 %)

Balita Wasting dan Underweight berpotensi menjadi Balita Stunting

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai :

1. Sarana : Belum semua Pustu/Posyandu memiliki alat ukur *anthtropometri*.
2. SDM : a. Jumlah tenaga gizi di Faskes masih kurang.
   b. Belum semua petugas kesehatan memahami cara penggunaan *anthtropometri.*
3. Anggaran : a. Belum optimalnya ketersediaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah untuk penurunan stunting.
   b. Pada Tahun Anggaran 2023, beberapa perangkat Daerah terkait tidak menganggarkan program/kegiatan untuk penanganan stunting.
4. Pola Asuh : Masih banyak orang tua yang kurang/tidak memahami dan/atau kurang/tidak mempraktikkan pola asuh yang benar.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai :

1. *Pembentukan Tim Peludes* (Pembina Kelurahan dan Desa Bebas Stunting) dimana semua Perangkat Daerah masing-masing diberikan tanggung jawab untuk membina beberapa Desa/Kelurahan.
2. *Lonto Leok* yaitu kegiatan sarasehan atau penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Desa/Keluarahan tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting.

4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

a. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
					2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1			2	3	4	5	6	7	8
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	69,30	65,83	99,38	94,99
		Rata-rata tujuan 1						99,38	94,99
		Kategori						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Mayarakat	Angka PMKS	Angka	19.089	17.089	16.299	85,38	95,38
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	66,02	64,58	98,09	97,82
		Rata-rata tujuan 2						91,74	96,60
		Kategori						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial	Angka	6	3	6	100,00	0,00
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	54,18	144,21	144,21
		Rata-rata tujuan 3						122,11	72,11
		Kategori						MEMUASKAN	BAIK
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,23	2,21	44,83	42,26
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	10.125	11.706	9.750	96,30	83,29
			Laju Inflasi	Angka	2,00	2,00	6,25	-112,50	-112,50
		Rata-rata tujuan 4						9,54	4,35

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
					2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1			2	3	4	5	6	7	8
		Kategori						KURANG	KURANG
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejah-teraan	Indeks Gini	Angka	0,289	0,276	0,291	99,31	94,57
		Rata-rata tujuan 5						99,31	94,57
		Kategori						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	17,12	19,84	98,10	84,11
		Rata-rata tujuan 6						98,10	84,11
		Kategori						SANGAT BAIK	BAIK
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Keman-dirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,650	0,618	102,83	95,08
		Rata-rata tujuan 7						102,83	95,08
		Kategori						MEMUASKAN	SANGAT BAIK
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	82,16	72,98	89,70	88,83
		Rata-rata tujuan 8						89,70	88,83
		Kategori						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerin-tahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	50,10 (CC)	60,10 (B)	53,27	106,33	88,64
		Rata-rata tujuan 9						106,33	88,64
		Kategori						MEMUASKAN	SANGAT BAIK
Rata-rata Tujuan 1 s/d 9								91,00	79,92

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
			2022	Akhir RPJMD		2022	Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
Kategori						SANGAT BAIK	BAIK

Ket : Indikator Kinerja Tujuan sebanyak 13 Indikator

Rata-rata capaian dari 9 tujuan tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 79,92%, kategori BAIK, dengan rincian 6 (enam) tujuan dengan kategori SANGAT BAIK (66,67%) dan 2 (dua) tujuan dengan kategori BAIK (22,22%) dan 1 (satu) tujuandengan kategori KURANG (11,11%). Sembilan tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator masing-masing yang berjumlah 13 indikator. Rincian capaian dari setiap indikator terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kategori MEMUASKAN sebanyak 1 (satu) indikator atau 7,69%.
2. Kategori SANGAT BAIK sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 53,85%.
3. Kategori BAIK sebanyak 2 (dua) indikator atau 15,38%.
4. Kategori KURANG sebanyak 3 (tiga) indikator atau 23,98%.

b. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai terdiri dari 14 indikator yang diambil dari Indikator Tujuan sebanyak 11 indikator, Indikator Sasaran sebanyak 2 indikator dan Indikator Program sebanyak 1 indikator. Adapun pengukuran realiasai IKU tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026) sebagai berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN		Ket.
			Tahun 2022	Akhir RPJMD		Tahun 2022	Akhir RPJMD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	69,30	65,83	99,38	94,99	IK Tujuan
2	Prevalensi Stunting	Persen	19,40	9,40	16,24	116,30	27,27	IK Program
3	Angka PMKS	Angka	19.089	17.089	16.299	85,38	95,38	IK Tujuan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN		Ket.
			Tahun 2022	Akhir RPJMD		Tahun 2022	Akhir RPJMD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	66,02	64,58	98,09	97,82	IK Tujuan
5	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	54,18	144,21	144,21	IK Tujuan
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,23	2,21	44,83	42,26	IK Tujuan
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	10.125	11.706	9.750	96,30	83,29	IK Tujuan
8	Indeks Gini	Angka	0,289	0,276	0,291	99,31	94,57	IK Tujuan
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	17,12	19,84	98,10	84,11	IK Tujuan
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,650	0,618	102,83	95,08	IK Tujuan
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	82,16	72,98	89,70	88,83	IK Tujuan
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	50,10 (CC)	60,10 (B)	53,27 (CC)	106,33	88,64	IK Tujuan
13	Nilai SAKIP	Angka	63,10	68,00 (B)	63,90 (B)	101,27	93,97	IK Sasaran
14	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	IK Sasaran
RATA-RATA						98,72	87,89	
KATEGORI						SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	

Rata-rata capaian dari 14 IKU tersebut terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 87,89% kategori kinerja SANGAT BAIK, dengan rincian sebanyak 2 (dua) indikator dengan kategori MEMUASKAN (14,29%), sebanyak 8 (delapan) indikator dengan kategori SANGAT BAIK (57,14%) dan masing-masing sebanyak 2 (dua) indikator kategori BAIK dan KURANG (14,29%).

c. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,61	8,04	7,62	100,13	94,78
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,53	14,03	13,70	101,26	97,65
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,42	56,52	73,47	130,21	129,98
	Rata-rata Sasaran 1								*110,53*	*107,47*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	12	15	18,455	153,79	123,03
	Rata-rata Sasaran 2								*153,79*	*123,03*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	67,77	69,24	67,38	99,42	97,31
			6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksa-nakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100,00	100,00	16,67	16,67	16,67
	Rata-rata Sasaran 3								*58,05*	*56,99*
	Kategori								*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	4	Terkendalinya laju partum-buhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,056	2,00	2,09	98,59	95,75
	Rata-rata Sasaran 4								*98,59*	*95,75*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,19	9,75	16,05	174,66	164,63
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5	4	0	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 5								*87,33*	*82,31*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	6	Meningkatnya pemberda-yaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	64,00	100,00	16,58	25,91	16,58
	Rata-rata Sasaran 6								*25,91*	*16,58*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1,12	5,08	0,85	76,24	16,81
	Rata-rata Sasaran 7								*76,24*	*16,81*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	64,16	68,37	81,91	127,66	119,80
	Rata-rata Sasaran 8								*127,66*	*119,80*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	25,45	21,24	28,18	89,27	67,32
			14	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,019	0,014	0,025	68,61	21,69

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rata-rata Sasaran 9								*78,94*	*44,51*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	13,86	67,87	18,095	130,56	26,66
	Rata-rata Sasaran 10								*130,56*	*26,66*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	6	3	6	100,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 11								*100,00*	*0,00*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,49 (Sedang)	0,66 (Sedang)	134,69	134,69
	Rata-rata Sasaran 12								*134,69*	*134,69*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	23,74	58,60	21,18	89,24	36,15
	Rata-rata Sasaran 13								*89,24*	*36,15*
	Kategori								*BAIK*	*KURANG*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	2,44	3,85	3,57	146,31	92,73
	Rata-rata Sasaran 14								*146,31*	*92,73*
	Kategori								*BAIK*	*CUKUP*
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	20	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	2,44	3,85	3,57	146,31	92,73
	Rata-rata Sasaran 15								*146,31*	*92,73*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	21	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	5,62	6,53	4,95	88,08	75,80
	Rata-rata Sasaran 16								*88,08*	*75,80*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	22	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	4,56	5,72	19,03	417,32	332,69
	Rata-rata Sasaran 17								*417,32*	*332,69*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	23	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	5,16	6,30	6,75	130,81	107,14
	Rata-rata Sasaran 18								*130,81*	*107,14*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi	24	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	25,00	1,68	33,51	6,70

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		penanaman modal	25	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 19								*16,75*	*3,35*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	56,15	67,88	54,80	97,60	80,73
	Rata-rata Sasaran 20								*97,60*	*80,73*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	76,20	88,00	72,311	94,90	82,17
	Rata-rata Sasaran 21								*94,90*	*82,17*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	81,71	100,00	72,26	88,43	72,26
	Rata-rata Sasaran 22								*88,43*	*72,26*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhu-bungan	29	Rasio konekvitas	Angka	0,81	0,89	0,74	91,44	83,22
			30	Kinerja lalulintas	Angka	46,22	65,94	21,74	47,03	32,97
	Rata-rata Sasaran 23								*69,24*	*58,09*
	Kategori								*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	74,60	81,94	71,88	96,35	87,72
	Rata-rata Sasaran 24								*96,35*	*87,72*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	110,57	119,69	113,54	102,69	94,86
	Rata-rata Sasaran 25								*102,69*	*94,86*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	90,00	100,00	47,80	53,11	47,80
			34	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	50,00	70,00	0,35	0,71	0,50
	Rata-rata Sasaran 26								*26,91*	*24,15*
	Kategori								*KURANG*	*KURANG*
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	3,09	2,08	3,50	86,83	31,88
	Rata-rata Sasaran 27								*86,83*	*31,88*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*KURANG*
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	90,75	94,75	94,37	103,99	99,60
			37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	78,092	89,872	83,13	106,45	92,49
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88,00	93,00	85,81	97,51	92,27

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
					Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rata-rata Sasaran 28							*102,65*	*94,79*
	Kategori							*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	22,00	62,00	23,18	105,38	37,39
	Rata-rata Sasaran 29							*105,38*	*37,39*
	Kategori							*MEMUASKAN*	*KURANG*
Sasaran	30 Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	42,06	65,51	68,28	162,33	104,22
	Rata-rata Sasaran 30							*162,33*	*104,22*
	Kategori							*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	31 Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	71,50	72,50	50,00	69,93	68,97
	Rata-rata Sasaran 31							*69,93*	*68,97*
	Kategori							*CUKUP*	*CUKUP*
Sasaran	32 Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,37	88,87	93,82	106,17	105,57
	Rata-rata Sasaran 32							*106,17*	*105,57*
	Kategori							*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
Sasaran	33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,32	86,32	73,89	86,60	85,60
	Rata-rata Sasaran 33							*86,60*	*85,60*
	Kategori							*SANGAT BAIK*	*SANGAT BAIK*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persam-pahan dan pengelolaan limba B3	44	Persentase sampah tertangani	Persen	20,97	29,91	9,05	43,16	30,26
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	26,13	46,57	69,64	266,52	149,54
	Rata-rata Sasaran 34								*154,84*	*89,90*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*SANGAT BAIK*
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	63,10 (B)	68,00 (B)	63,90 (B)	101,27	93,97
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	100,00	81,97
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Perlu Perbaikan	Baik	58.9308 B (Perlu Perbaikan)	100,00	100,00
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Sedang (0,727)	Tinggi (1,073)	0,546 (Rendah)	75,10	50,89
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 3	Level 2	66,67	66,67
	Rata-rata Sasaran 35								*90,51*	*82,25*
	Kategori								*SANGAT BAIK*	*BAIK*
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,10	3,00	1,76	83,81	58,67
			53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71,00 (Sedang)	83,00 (Tinggi)	47,73 (Sangat Rendah)	67,23	57,51
	Rata-rata Sasaran 36								*75,52*	*58,09*

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2022	% Capaian	
						Thn. 2022	Akhir RPJMD		Thn. 2022	Akhir RPJMD
1			*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori								*BAIK*	*CUKUP*
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00	84,50	84,54	105,68	100,05
	Rata-rata Sasaran 37								*105,68*	*100,05*
	Kategori								*MEMUASKAN*	*MEMUASKAN*
RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37									106,48	79,02
KATEGORI									MEMUASKAN	BAIK

Rata-rata capaian dari 37 sasaran sesuai tabel pengukuran tersebut di atas terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 79,02% dengan kategori kinerja BAIK. Dari 37 sasaran tersebut terdapat 9 sasaran atau 24,32% kategori MEMUASKAN, sebanyak 8 sasaran atau 21,62% kategori SANGAT BAIK, sebanyak 6 sasaran atau 16,22% kategori BAIK, sebanyak 4 sasaran atau 10,81% kategori CUKUP dan sebanyak 10 sasaran atau 7,03% kategori KURANG. Jumlah dan persentase kategori Kurang lebih banyak/dominan dari kategori-kategori kinerja lainnya. Hal ini disebabkan karena :

1. Tahun 2022 merupakan tahun ke-1 pelaksanaan RPJMD 2021-2026.
2. Alokasi anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran sangat minim, sementara target tahunan dari setiap indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD cukup tinggi.

4.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Penganggaran.

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Manggarai berjumlah 5.089 orang. Jumlah 5.089 orang tersebut terdiri dari PNS sebanyak 4.430 orang dan PPPK sebanyak 659 orang. Adapun komposisi ASN Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin sebagai berikut :

No.	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	2.128	323	2.451	48,16
2.	Perempuan	2.302	336	2638	51,84
JUMLAH		4.430	659	5.089	100

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022

b. Jumlah ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
1.	SD	15	0	15	0,29
2.	SMP /Sederajat	25	0	25	0,49
3.	SMA/Sederajat	773	16	788	15,48

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
4.	Diploma I, II /Akta I, II	106	0	106	2,08
5.	Diploma III/Akta III	885	18	903	17,74
6.	S-1/ Akta IV	2.540	626	3.166	62,20
7.	S-2	86	0	86	1,69
8.	S-3	0	0	0	0
JUMLAH		4.430	659	5.089	100

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2022, didominasi oleh tingkat pendidikan S-1/ Akta IV yang mencapai 62,21%.

c. Jumlah ASN menurut Golongan sebagai berikut:

GOL./Kelas		RUANG					Jlh	%
		PNS				PPPK		
		A	B	C	D			
1.	I	1	3	7	8	-	19	0,37
2.	II	31	75	351	280	-	737	14,48
3.	III	476	403	462	1.087	-	2.428	47,71
4.	IV	471	753	21	1	-	1.246	24,48
5.	V	-	-	-	-	15	15	0,29
6.	VII	-	-	-	-	18	18	0,35
7.	IX	-	-	-	-	626	626	12,30
JUMLAH						659	5.089	100

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022

Komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2022 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 47,71% dan menurut kelas didominasi oleh PPPK Kelas IX sebesar 12,30%.

2. Anggaran

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2022, bahwa perencanaan anggaran menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini berorientasi pada hasil atau outcome. Setiap input (SDM, Biaya dan Peralatan) harus memperhatikan urgensitas setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pola pembelanjaan harus proporsional, efisiensi dan efektif serta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Belanja daerah dikelompokan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah TA. 2022			Realisasi TA. 2021
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
BELANJA DAERAH	1.203.443.264.459	1.126.900.860.762,94	93,64	1.127.162.534.561,92
Belanja Operasi	832.537.175.122	769.242.594.846,96	92,40	721.098.288.730,92
- Belanja Pegawai	443.203.536.777	416.724.454.059,24	94,03	406.236.865.405,92
- Belanja Barang dan Jasa	291.767.608.712	267.825.977.623	91,79	237.908.984.373
- Belanja Bunga	1.000.000.000	727.530.923,72	72,75	0
- Belanja Subsidi	1.045.090.000	0	0	0
- Belanja Hibah	93.399.088.641	81.852.466.371	87,64	64.021.641.772
- Belanja Bantuan Sosial	2.121.850.992	2.112.165.870	99,54	12.930.797.180
Belanja Modal	180.784.326.029	169.206.541.293,98	93,60	174.222.039.501
- Belanja Modal Tanah	3.798.889.291	1.962.083.000	51,65	5.947.920
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.259.435.891	33.377.856.959,98	94,66	15.696.481.723
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.043.179.369	71.649.025.218	96,77	53.847.392.337
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.682.821.478	62.217.576.116	91,93	104.672.217.521
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	5.329.997.314	76,14	24.271.887.055
- Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	5.329.997.314	76,14	24.271.887.055
Belanja Transfer	183.121.763.308	183.121.727.308	100	207.570.319.275
- Belanja Bagi Hasil	3.847.593.908	3.847.593.908	100	3.557.946.475
- Belanja Bantuan Keuangan	179.274.169.400	179.274.169.400	100	204.012.372.800

Sumber : Badan Keuangan dan Asat Daerah, 2022 (Realisasi 2022 unaudited, 2021 Audited)

4.6. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran. Program-program tersebut berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam laporan ini hanya menyajikan program-program yang dianggap sangat relevan atau mempunyai keterkaitan dengan misi, tujuan dan sasaran. Program-program tersebut akan dipetakan sesuai sasarannya (untuk tahunan) seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.23

Keterkaitan antara Sasaran dan Program dengan Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Sasaran 1 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan				110,53
1	Program Pengelolaan Pendidikan	106.676.612.175	22.213.329.066	20,82
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.127.576.431	18.610.609.154	92,46
3	Program Pengembangan Kurikulum	72.718.100	70.427.700	96,85
	Total Angaran Sasaran 1	126.876.906.706	40.894.366.130,14	32,23
Sasaran 2 Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat				153,79
4	Program Pembinaan Perpustakaan	1.136.227.800	1.123.695.770	98,90
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	74.935.000	74.895.000	99,95
	Total Angaran Sasaran 2	1.211.162.800	1.198.590.968,84	98,96
Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				58,05
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	143.422.037.791	129.963.894.815	90,62
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.094.301.497	1.037.928.747	94,85
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	328.029.000	277.769.000	84,68
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	230.493.000	187.265.000	81,25
	Total Angaran Sasaran 3	145.074.861.288	131.466.857.562	90,62
Sasaran 4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk				98,59
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.064.282.492	2.640.124.700	86,16
11	Program Pengendalian Penduduk	107.772.500	102.855.000	95,44
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.242.718.500	618.828.500	27,59
	Total Angaran Sasaran 4	5.414.773.492	3.361.808.409,19	62,09
Sasaran 5 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan				87,33
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	308.840.000	297.616.200	96,37
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	192.615.000	184.844.562	95,97
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	742.690.980	731.505.280	98,49
	Total Angaran Sasaran 5	1.244.145.980	1.213.966.332,83	97,57
Sasaran 6 Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya				25,91
16	Program Pengembangan Kebudayaan	184.907.000	184.907.000	100

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	411.929.296	408.408.940	99,15
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	477.072.508	476.572.507	99,90
	Total Angaran Sasaran 6	1.073.908.804	1.069.888.447	99,63
Sasaran 7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat				76,24
19	Program Perlindungan Jaminan Sosial	41.786.000	34.477.000	82,51
20	Program Rehabilitasi Sosial	261.268.000	260.384.370	99,66
21	Program Pemberdayaan Sosial	484.663.000	475.037.500	98,01
22	Program Penanganan Bencana	28.976.000	19.646.000	67,80
	Total Angaran Sasaran 7	816.693.000	789.544.870	96,68
Sasaran 8 Menurunnya ketimpangan gender				127,66
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.485.000	60.485.000	100
	Total Angaran Sasaran 8	60.485.000	60.485.000	100
Sasaran 9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				78,94
24	Program Perlindungan Perempuan	28.590.000	28.480.000	99,62
25	Program Perlindungan Khusus Anak	108.535.300	108.345.388	99,83
	Total Angaran Sasaran 9	137.125.300	136.825.587,44	99,78
Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban umum				130,56
26	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.593.291.560	1.590.251.710	99,81
	Total Angaran Sasaran 10	1.593.291.560	1.590.251.710	99,81
Sasaran 11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial				100
27	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	885.176.000	885.063.000	99,99
28	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	207.028.000	151.590.000	73,22
29	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.430.706.000	590.189.320	41,25
30	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.854.000	33.784.000	99,79
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70.405.000	70.390.000	99,98
	Total Angaran Sasaran 11	2.627.169.000	1.731.016.320	65,89
Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana				134,69
32	Program Penanggulangan Bencana	457.572.448	422.214.106	92,27
33	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	20.084.000	20.084.000	100

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Total Angaran Sasaran 12	477.656.448	442.298.106	92,60
Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana				89,24
34	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.959.299.400	1.943.629.104	99,20
	Total Angaran Sasaran 13	1.959.299.400	1.943.629.104	99,20
Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sector pertanian				146,31
35	Program Penyuluhan Pertanian	1.450.475.972	1.422.005.520	98,04
36	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.581.949.771	6.476.577.665	75,47
37	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	449.035.972	443.609.320	98,79
38	Program Perizinan Usaha Pertanian	16.000.000	15.180.000	94,88
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	564.180.000	553.260.000	98,06
40	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	965.673.892	952.828.865	98,67
	Total Angaran Sasaran 14	12.027.315.607	9.863.461.370	82,01
Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan sector perikanan				146,31
41	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	181.739.296	179.530.684	98,78
42	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.482.285.916	1.474.649.480	99,48
43	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	185.180.000	3.680.000	1,99
	Total Angaran Sasaran 15	1.849.205.212	1.657.860.164	89,65
Sasaran 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri				88,08
44	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.346.711.511	7.164.972.763	97,53
	Total Angaran Sasaran 16	7.346.711.511	7.164.972.763	97,53
Sasaran 17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata				417,32
45	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	260.144.520	258.403.115	99,33
46	Program Pemasaran Pariwisata	559.040.330	478.472.830	85,59
47	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.229.633.620	1.212.969.969	98,64
	Total Angaran Sasaran 17	2.048.818.470	1.949.845.914	95,17
Sasaran 18 Meningkatnya pertumbuhan sector perdagangan				130,81
48	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50.600.000	50.550.000	99,90
49	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	20.101.000	20.101.000	100

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
50	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	36.700.000	36.630.000	99,81
	Total Angaran Sasaran 18	107.401.000	107.281.000	99,89
Sasaran 19 Meningkatnya realisasi penanaman modal				16,75
51	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.310.000	8.160.000	98,19
52	Program Promosi Penanaman Modal	7.632.000	7.632.000	100
53	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360.216.000	350.870.900	97,41
54	Program Pelayanan Penanaman Modal	149.264.648	148.310.342	99,36
	Total Angaran Sasaran 19	525.422.648	514.973.242	98,01
Sasaran 20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan				97,60
55	Program Penyelenggaraan Jalan	46.408.276.032	42.133.244.420	90,79
	Total Angaran Sasaran 20	46.408.276.032	42.133.244.420	90,79
Sasaran 21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan				94,90
56	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.405.443.606	5.091.027.422	94,18
	Total Angaran Sasaran 21	5.405.443.606	5.091.027.422	94,18
Sasaran 22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan				88,43
57	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	4.116.431.400	3.807.945.066	92,51
	Total Angaran Sasaran 22	4.116.431.400	3.807.945.066	92,51
Sasaran 23 Meningkatnya pelayanan perhubungan				69,24
58	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	3.266.071.013	3.228.642.796,98	98,85
59	Program Pengelolaan Pelayaran	937.580.000	48.709.700	5,20
	Total Angaran Sasaran 23	4.203.651.013	3.277.352.497	77,96
Sasaran 24 Meningkatnya ketahanan pangan				96,35
60	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8.679.000	8.679.000	100
61	Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.516.000	5.516.000	100
62	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	360.385.500	346.372.996	96,11
63	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4.593.000	3.793.000	82,58
	Total Angaran Sasaran 24	379.173.500	364.361.374,69	96,09
Sasaran 25 Meningkatnya stabilitas hargaarang				102,69
64	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.201.887.924	145.783.840	12,13
	Total Angaran Sasaran 25	1.201.887.924	145.783.840	12,13
Sasaran 26 Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian				26,91
65	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	387.200.000	375.560.506	96,99

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
66	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	11.360.000	11.360.000	100
67	Program Pengembangan UMKM	12.845.800	12.845.500	100
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	11.852.000	11.852.000	100
	Total Angaran Sasaran 26	423.257.800	411.618.006	97,25
Sasaran 27 Menurunnya pengangguran				86,83
69	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	37.787.324	37.685.540	99,73
70	Program Penempatan Tenaga Kerja	25.141.000	25.101.000	99,84
71	Program Hubungan Industrial	62.163.600	60.923.600	98,01
	Total Angaran Sasaran 27	125.091.924	123.710.437,5768	98,90
Sasaran 28 Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni				102,65
72	Program Kawasan Permukiman	7.353.602.600	7.352.152.600	99,98
73	Program Pengembangan Perumahan	128.310.000	126.510.000	98,60
74	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.016.799.450	1.006.463.950	98,98
75	Program Pengembangan Permukiman	4.103.975.819	3.339.350.052	81,37
76	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.311.000.000	5.250.861.375	98,87
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.256.812.549	9.099.672.208	98,30
	Total Angaran Sasaran 28	27.170.500.418	26.175.010.185	96,34
Sasaran 29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang				105,38
78	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	965.132.620	909.004.820	94,18
79	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	225.709.800	168.366.180	74,59
80	Program Penataan Bangunan Gedung	461.452.800	395.446.800	85,70
81	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	257.028.700	192.365.500	74,84
	Total Angaran Sasaran 29	1.909.323.920	1.665.183.300	87,21
Sasaran 30 Meningkatnya keberdayaan desa				162,33
82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	412.918.000	407.238.000	98,62
83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	909.191.400	907.757.595	99,84
84	Program Penataan Desa	1.790.593.100	1.025.828.401	57,29
	Total Angaran Sasaran 30	3.112.702.500	2.340.823.996	75,20
Sasaran 31 Meningkatnya kualitas air				69,93

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
85	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	109.131.800	108.302.800	99,24
86	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	22.887.800	22.887.800	100
87	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	193.705.000	193.668.635	99,98
	Total Angaran Sasaran 31	325.724.600	324.859.235	99,73
Sasaran 32 Meningkatnya kualitas udara				106,17
88	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0
89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	339.810.000	338.827.612	99,71
	Total Angaran Sasaran 32	339.810.000	338.827.612	99,71
Sasaran 33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan/vegetasi				86,60
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0
	Total Angaran Sasaran 33	0	0	0
Sasaran 34 Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limba B3				154,84
90	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.660.000	15.600.000	99,62
91	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	0	0
92	Program Pengelolaan Persampahan	6.470.873.533	5.469.031.432	84,52
93	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	63.341.000	63.341.000	100
	Total Angaran Sasaran 34	6.549.874.533	5.547.972.432	84,70
Sasaran 35 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel				90,51
94	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	681.301.600	609.362.772	89,44
95	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	596.790.424	494.638.488	82,88
96	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	342.586.900	302.468.411	88,29
97	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	78.115.000	77.875.000	99,69
98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.911.659.984	4.654.538.914	94,77

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.147.762.578	13.029.561.605	99,10
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	730.792.224	685.041.570	93,74
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.728.400.000	8.808.224.828	82,10
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	194.044.450.216	191.395.247.479	98,63
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.273.624.648	526.666.265	41,35
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.395.188.086	1.371.179.210	98,28
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	644.173.000	635.409.300	98,64
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	9.410.000	7.761.200	82,48
	Total Angaran Sasaran 35	228.584.254.660	222.597.975.042	97,38
Sasaran 36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel				75,52
107	Program Informasi dan Komunikasi Publik	683.003.404	677.900.980	99,25
108	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	744.824.500	735.012.689	98,68
109	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	83.680.000	83.236.800	99,47
110	Program Kepegawaian Daerah	4.342.786.450	3.881.398.311	89,38
	Total Angaran Sasaran 36	5.854.294.354	5.377.548.780	91,86
Sasaran 37 Meningkatnya pelayanan Publik yang prima				105,68
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.374.722.800	1.356.082.800	98,64
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	307.101.000	287.371.000	93,58
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	753.995.400	737.863.970	97,86
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	624.020.800	622.177.800	99,70
115	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.899.000	30.899.0000	100
116	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	259.806.472	247.108.864	95,11
117	Program Pendaftaran Penduduk	242.753.592	237.536.130	97,85
118	Program Pencatatan Sipil	275.601.268	270.584.080	98,18
119	Program Pengelolaan Arsip	119.061.800	118.561.800	99,58
120	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	132.553.800	132.447.400	99,92
Total Angaran Sasaran 37		4.120.515.932	4.040.632.844	98,06
TOTAL ANGGARAN		652.702.567.342	530.921.799.489,69	81,34

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
RATA-RATA 37 SASARAN				106,48

Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel di atas merupakan anggaran dan realisasi anggaran pada program/kegiatan strategis yang berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja sasaran yang mencapai 106,48%.

Realisasi penyerapan anggaran dari program/kegiatan strategis tersebut adalah Rp.530.921.799.489,69 atau 81,34% dari total pagu anggaran Rp.652.702.567.342. Sedangkan program/kegiatan pendukung sasaran tidak menjadi bagian dari perhitungan tersebut di atas.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan

A. Dinas Pertanian

a. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

1) SP DIPA-018.08.4.249165/2022 tanggal 17 November 2022
2) SP DIPA-018.03.4.249158/2021 tanggal 17 November 2022

b. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Tugas Pembantuan ada 2 program yaitu berupa uang dan berupa barang untuk kelompok tani.

c. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

1) Target kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan yaitu sebagai berikut :

a) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan :
   - Embung pertanian;
   - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;

b) Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan:
   - Bantuan benih Padi Inbrida Sawah;
   - Bantuan Sarana Budidaya Padi Biofortifikasi;
   - Bantuan Sarana Budidaya Sorgum;
   - Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Padi;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna;
   - UPH Kedelai;
   - Tanam Jagung Panen Sapi.

2) Realisasi

Relasisasi pelaksanaan program pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

a) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan :
   - Tersedianya 1 unit embung pertanian;
   - Terehabilitasinya 5 unit jaringan irigasi tersier.

b) Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan:
   - Tersedianya benih padi inbrida sawah untuk 1.000 ha;
   - Tersedianya sarana budidaya padi biofortifikasi lahan seluas 500 Ha;
   - Tersedianya sarana budidaya sorgum untuk lahan seluas 100 ha;
   - Terlaksananya Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi untuk lahan seluas 12 Ha;
   - Tersedianya 2 Unit Thresher Padi;
   - Tersedianya 8 Unit Power Thresher Multiguna Kedelai;
   - Tersedianaya 2 Unit Power Thresher Multiguna Kedelai Mobile;
   - Tersedianya bantuan bibit kedelai untuk lahan seluas 250 ha;
   - Tersedianya 1 Unit UPH Kedelai;
   - Terlaksanannya tanam jagung panen sapi pada lahan seluas 100 Ha.

d. Permasalahan dan kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun

sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

2) Anggaran untuk APBN sejak tahun 2017 dikelola oleh Pihak Propinsi sehingga kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik pelaksanaan maupun dalam proses pencairan keuangan.

e. Saran dan tindak lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
2. Disarankan pada tahun mendatang Kabupaten memiliki anggaran APBN sendiri atau DIPA.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan : tidak ada

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan;
3. Pendidikan anak usia dini.

B. Target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah

No	Indikator SPM	Target sesuai RPJMD (100%)
1.	Pendidikan Dasar (SD) Jumlah warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100
	Pendidikan Dasar (SMP) Jumlah warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100
2	Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara yang menyelesaikan pendidikan dasar/menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidik PAUD	100

C. Alokasi Anggaran

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.800.380.800	53.713.533.925	99,83
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.772.266.380	43.609.881.780	99,62
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.739.740.114	6.731.939.058	99,88
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	2.364.223.981	2.361.136.627	99,86
	Jumlah	106.676.611.275	106.416.491.390	99,75

D. Dukungan Personil

- Data Tenaga Fungsional PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 adalah :

Tingkat sekolah	PNS	Non PNS	Tendik
TK/KB/PAUG/PKBM	51	902	121
SD	1.468	1.335	181
SMP	785	949	192

- Data pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tahun 2022 :

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		NPNS	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Kepala Bidang/ sekretaris				7	7
3	Pengawas Dinas /Pengawas SMP			1	7	8
4	Kepala Seksi/ Kasubag			8		8
5	Fungsional			9		9
6	Pelaksana		11	13	1	25
7	THL	7				7
	JUMLAH	7	11	31	16	65

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a) Banyak ruangan kelas tidak layak pakai dan adanya kekurangan ruang kelas pada jenjang SMP khususnya yang sekolah baru sehingga harus di penuhi secara bertahap di tahun 2022;

b) Tidak ada keseimbangan rasio antara siswa per ruangan kelas, khusus untuk jenjang PAUD dan pendidikan sekolah menengah pertama di kecamatan;

c) Kualifikasi guru belum memenuhi standar sesuai amanat undang-undang guru dan dosen yang dengan jelas merumuskan dasar minimal pendidikan untuk guru adalah strata satu;

d) Buku Penunjang pembelajaran belum memadai;

e) Nilai hasil Ujian Sekolah pada jenjang SD masih dibawah target pada RPJMD;

f) Jumlah angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP masih tinggi atau dibawah target pada RPJMD.

2. Solusi
   a) Rehabilitasi ruangan kelas dan membangun ruang kelas baru untuk jenjang SMP;
   b) Penambahan ruangan kelas baru dan proses kegiatan belajar mengajar sore hari untuk melayani siswa karena minimnya daya tampung;
   c) Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dengan penerapan kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru;
   d) Pembangunan perpustakaan dengan pengadaan TIK edukasi dan dianjurkan anak masuk sekolah sesuai dengan usia sekolah yang sudah ditetapkan;
   e) Penguatan materi pembelajaran pada kegiatan bedah SKL dan peningkatan uji kompetensi guru;
   f) Penguatan berupa monitoring ke sekolah tentang penggunaan dana bos, pendidikan karakter dan mengupayakan menampung anak putus sekolah dengan mengikuti program kesetaraan.

4.2 Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

B. Target pencapaian dan realisasi standar pelayanan minimal oleh daerah

No	Indikator SPM	Target	Sasaran Per Indikator	Realisasi (Absolut)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100	7.616	5.109	67%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	100	7.270	5.913	81%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	100	6.924	5.844	82%
4	Pelayanan kesehatan balita;	100	32.058	35.816	112%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100	36.297	33.358	92%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	100	198.511	74.05	37%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100	21.876	10.217	47%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	100	92.860	12.097	13%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	100	1.374	1.313	96%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100	575	487	85%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	100	1.002	1.689	169%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	7.515	5.794	77%

C. Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.663.253.000	1.493.950.524	90%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.304.226.403	760.521.403	58%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	684.675.000	558.175.000	82%
4	Pelayanan kesehatan balita	4.913.445.500	4.434.292.000	90%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	780.885.000	671.360.000	86%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.742.331.500	1.529.900.999	88%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	852.250.000	762.365.000	89%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	767.287.000	609.325.000	79%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	652.575.000	479.640.000	73%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	490.218.000	393.480.000	80%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	291.926.100	193.256.000	66%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	315.450.000	132.685.000	42%

D. Dukungan Personil

No	Jenis Tenaga	Pangkat / Gol. Ruang Akhir				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pejabat Struktural			4	4	8
2	Fungsional Umum	1	15	39	3	58
3	Apoteker			21	1	22
4	Asisten Apoteker		21	10		31
5	Bidan		30	190	3	223
6	Gokter Gigi			6	8	13
7	Dokter			20	1	21
8	Epidemiologi			1	2	3
9	Fisioterapi			2		2
10	Nutrisionis		20	27	1	48

No	Jenis Tenaga	Pangkat / Gol. Ruang Akhir				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
11	Penyuluh Kesehatan			27	1	28
12	Perawat		30	210	6	246
13	Perawat Gigi		14	28		42
14	Rekam Medis		12			12
15	Pranata Labkes		19	13		32
16	Radiografer			1		1
17	Sanitarian		20	25		45
18	Teknisi Elektromedis		1			1
T o t a l		1	182	624	30	837

E. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1) Masalah Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit.

a. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan mencari dan menemukan penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular serta kesehatan jiwa mengakibatkan rendahnya cakupan program karena keterlambatan obatdan BMHP yakni stick PTM dan Reaped Test Diagnostik (RDT)

b. Kegiatan rutin seperti program surveilance dan imunisasi; Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa tidak dapat dilakukan secaraoptimal karena situasi Pandemi Covid 19.

2) Masalah Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Tahun 2022 untuk Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan murni Pembiayaan dari DAK, sehingga tidak dapat dilakukan pembelian spare part jika terjadi kerusakan salah satu komponen pada alat karena tidak diperbolehkan pada Juknis.

b. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya, yang lambat mengakibatkan menumpuk kegiatan pendistribusian di akhir tahun

c. Pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan TPM/Industri Rumah Tangga Pangan tahun 2022 murni dibiaya dana DAK Non Fisik BPOM
d. Pada Kegiatan Fasilitas Rujukan UKM khususnya kegiatan pengawasan jajanan anak sekolah dan pemeriksaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan tidak ada dana pendamping dari dau untuk kegiatan diluar juknis

3) Masalah Bidang Pelayanan Kesehatan.
a. Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
b. Belum optimalnya akses pelayanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil dan Kepulauan;
c. Belum semua Kepala Puskesmas mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas;
d. Kerjasama lintas program belum berjalan optimal terutama terkait pembangunan Puskesmas Baru;
e. Adanya mutasi petugas pengelola program pelayanan kesehatan pada puskesmas tertentu, sehingga tidak ada kesinambungan dalam pemahaman pengisian registrasi dan form pencatatan dan pelaporan;
f. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) belum berjalan optimal;
g. Tingginya permintaan masyarakat untuk pelayanan kesehatan sosial, namun tidak diimbangi dengan dana yang tersedia;
h. Ketersediaan Obat dan BMHP JKN tidak bisa menjawab kebutuhan saat pelayanan berlangsung karena Obat dan BMHP tidak tersedia.

4) Masalah Bidang Kesehatan Masyarakat.
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target;
b. Masih ada ibu yang melahirkan dirumah;
c. Masih adanya ibu hamil yang ditolong dukun;
d. Masih banyaknya kematian neonatal;
e. Balita yang tidak dideteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
f. Masih banyak bayi 0-6 bulan yang tidak ASI eksklusif.

b) Solusi

1) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit

a. Mempercepat pengadaan obat dan BMHP seperti Stick PTM dan RDT agar penjaringan dapat berjalan optimal dan tidak mnumpuk di akhir tahun;
b. Dalam situasi Pandemi Covid 19, kegiatan-kegiatan tetap dilakukan dengan mematuhi protokoler Covid 19 dengan jumlah sasaran terbatas.

2) Bidang Sumber Daya Kesehatan
   a. Kegiatan - kegiatan selain dibiayai dari Dana DAK NON FISIK, tetap dianggarkan dana Pendamping dari DAU guna menunjang kegiatan yang dibiayai DAK NON FISIK;
   b. Honorarium PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa harap benar-benar diperhatikan mengingat beban kerja serta tanggungjawab yang harus dipikul, dan sebaiknya Panitia Penerima dan Pemeriksa Obat, Alkes dan Meubeler dibuat terpisah agar pekerjaan lebih fokus, terukur dan tuntas;
   c. Pada pengadaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mohon diperhatikan usulan manual dari UPTD Puskesmas, mengingat tidak semua UPTD Puskemsas mengupdate kondisi terakhir melalui Aplikasi ASPAK serta menjadwalkan kegiatan Pengadaan lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun;
   d. Kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (DAU) menganggarakan honor keahlian bagi penguji ukom propinsi kegiatan pelatihan penguji ukom menyediakan anggaran yang cukup agar dapat mengakomodir semua profesi kesehatan yang ada;
   e. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengawas DFI dan PKP DAK Menu POM pelaksanaan kegiatan wajib melibatkan panitia dari Dinas Kesehatan, sehingga untuk kegiatan ini perlu dana pendamping dari DAU.

3) Bidang Pelayanan Kesehatan
   a. Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas secara lintas program dalam rangka memberikan arahan/bimbingan kepada staf

puskesmas sehingga mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat tercapai optimal.;

b. Mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk pelayanan DokterSpesialis ke daerah terpencil dan kepulauan;
c. Membuat usulan pelatihan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT bagi Kepala Puskesmas yang belum mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas;
d. Mengoptimalkan kerjasama lintas program;
e. Mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan/ pengelola program pelayanan kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
f. Mengalokasikan dana yang cukup memadai untuk pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat mengakomodir permintaan masyarakat;
g. Pelaksanaan tender pengadaan Obat dan BMHP JKN agar dilakukan lebih awal dalam tahun berjalan sehingga bisa menjawab kebutuhan obat bagi peserta JKN sesuai waktu pelayanan;
h. Perlu dilakukan pembenahan sistem rujukan pasien umum maupun pasien JKN sehingga derajad kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

4) Bidang Kesehatan Masyarakat.
   a. Kerjasama dengan kader, dukun, tenaga pendamping ibu hamil(TPK)dalam menjaring ibu hamil baru (K1 murni);
   b. Aktifkan kembali 5 H2 center;
   c. Cegah kematian bayi baru lahir, neonatus melalui kerjasama lintas sektor;
   d. Memperkuat P4K;
   e. Optimalkan kunjungan rumah.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal		Target	Realisasi s.d tahun 2022
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.	100%	85,81%
2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	83,13%

C. Alokasi Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.256.812.549	9.099.672.208	98,30
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota			
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	871.326.000	856.947.800	98,35
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	802.100.956	721.344.260	89,93
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	7.177.985.593	7.127.651.157	99,30
	pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	2.300.000	2.300.000	100,00
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	403.100.000	391.428.991	97,10
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	5.311.000.000	5.250.861.375	98,87
	Kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota			
	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan	34.682.000	34.022.000	98,10

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota			
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	5.276.318.000	5.216.839.375	98,87

D. Dukungan Personil

- Banyaknya PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pendidikan S1	9
2.	Pendidikan SLTA	2
J u m l a h		11

- PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Jenis Golongan	Jumlah
1	Pembina, IV/a	2
2	Penata Tk. I, III/d	1
3	Penata, III/c	2
4	Penata Muda, III/a	4
5	Pengatur Tk. I, II/d	2
Jumlah		11

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
   a. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan instansi lain seperti Dinas Perumahan Rakyat, sehingga dibutuhkan koordinasi terutama terkait data capaian;
   b. Perubahan desain pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan;
   c. Timbulnya masalah sosial dalam pelaksanaan pekerjaan baik terkait pembebasan lahan maupun masalah operasional seperti perusakan sarana yang sudah dibangun;
   d. Masih kurangnya penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di daerah yang profesional dibidang air minum.

2. Solusi

Beberapa alternative penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan dinas sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM;
b. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran SPM;
c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui perencnaaan teknis yang lebih baik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Terlaksananya rehabilitasi 5 unit rumah korban bencana dari 11 unit rumah korban bencana atau 45,45% sesuai target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pada indicator ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan realisasi realisasinya target pencapaiannya 0% dikarenakan untuk sementara belum adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

C. Alokasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Program pengembangan perumahan dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	128.310.000	126.510.000	99

D. Dukungan Personil

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	S1	7	18			25
2	DIII	-	2	-	-	2

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
3	D1	-	1	-	-	1
4	SLTA	-	2	10	-	12
5	SD					1
Jumlah		7	23	10		40

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Penyerapan anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan target belum mencapai 100%.

b. Belum akuratnya data base dalam mendukung pencapaian target urusan perumahan dan kawasan permukiman

c. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dalam mendukung program/kegiatan prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman

d. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya ASN melalui Bimtek/Diklat teknis guna mendukung pelaksanaan tugas dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman.

e. Belum cukup/kurangnya sarana dan prasrana pendukung pelaksanaan tugas

2) Solusi

a. Pada Tahun-tahun selanjutnya dapat meningkatkan pencapaian realisasi anggaran sesuai target yang direncanakan

b. Perlu adanya validasi dan sinkronisasi kembali data-data base urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam tahun-tahun kedepan sehingga terwujudnya pencapaian target yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Perlu upaya pendekatan secara intensif bagi masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam keswadayaannya.

d. Melaksanakan kegiatan bimtek/diklat teknis bagi ASN guna meningkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas

e. Perlu penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN urusan perumahan dan kawasan permukiman.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
   a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
   b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Pelayanan informasi rawan bencana
   b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	$\frac{439}{439}$ X 100% = 100 %	Terhadap Warga Negara yang melakukan pelanggaran dilakukan teguran dan pembinaan
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	$\frac{14}{14}$ X 100% = 100 %	Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator SPM	CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50	0	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaga-an terhadap bencana	50	0	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penye-lamatan dan Evakuasi korban bencana	50	100	100	100

C. Alokasi Anggaran

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	4.277.153.695	4.179.050.140	97,70
2.	Belanja Modal	90.600.000	90.009.900	99,35
	TOTAL	4.367.753.695	4.269.060.040	97,74

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator SPM	Anggaran (Rp)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	74.258.000
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101.326.000
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	281.988.448

D. Dukungan Personil

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- Jumlah pegawai menurut golongan / pangkat

No	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNSD	1
2.	II	PNSD	3
3.	III	PNSD	24
4.	IV	PNSD	4
5.	-	Tenaga Kontrak	2
6.	-	Tenaga Harian Lepas	37
Jumlah			71

- Jumlah pegawai menurut pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Sarjana/DIII	PNSD	20
		Tenaga Kontrak	-
		Tenaga Harian Lepas	13
2.	SMA / SMK	PNSD	10
		Tenaga Kontrak	2
		Tenaga Harian Lepas	25
3.	SMP	PNSD	1
Jumlah			71

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S1	17
2	D3	2
3	SLTA	6

E. Permasalahan dan Solusi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Permasalahan

1) Kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai. Masih banyak anggota yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, juga pendidikan dan pelatihan teknis lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2) Tidak tersedianya fasilitas yang memadai antara lain mobil operasional, pos pemadam kebakaran, mobil suplai air dan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sehingga berpengaruh terhadap waktu tanggap petugas memadamkan kebakaran.
3) Kondisi wilayah Kabupaten Manggarai yang berbukit-bukit dan terjal sering menyulikan petugas dalam melaksanakan tugas. Hal ini diperparah lagi apabila kondisi cuaca sedang buruk. Dengan sarana dan prasarana seadanya para petugas harus menantang alam dan badai untuk dapat mencapai wilayah rawan konflik dan bencana(kebakaran).

b. Solusi

1) Meningkatkan upaya pembinaan terhadap anggota Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3) Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Diklat Dasar, Diklat Tingkat Lanjutan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
4) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan sarana dan prasarana yang ada

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Permasalahan
      1) Letak geografis dan topografi wilayah kabupaten Manggarai;
      2) Fluktuasi serta anomali cuaca dan iklim yang sulit diperkirakan sebelumnya;
      3) Masih banyaknya konsentrasi pemukiman penduduk yang berada pada daerah- daerah rentan / rawan bencana;
      4) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan masyarakat Manggarai;
      5) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana;
      6) Masih lemahnya koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
      7) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks;
      8) Sosialisasi tentang dampak dan potensi bencana perlu terus di tingkatkan di kalangan masyarakat;
      9) Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga.
   b. Solusi
      1) Upaya penanggulangan pra bencana
         a) Sosialisasi bencana kepada masyarakat luas melalui media cetak dan media elektronik;
         b) Pelatihan manajemen kebencanaan bagi aparatur dan komponen masyarakat pengelola masalah kebencanaan;
         c) Penyusunan peta daerah rawan bencana serta penyusunan profil kebencanaan;
         d) Mengeluarkan himbauan maupun instruksi kepada masyarakat agar meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai ancaman bencana;
         e) Meningkatkan koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

f) Meningkatkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional tidak terhambat.

2) Upaya penanggulangan pada saat bencana

a) Melakukan/mengaktifkan posko pemantauan bencana selama 1 x 24 jam;

b) Menyalurkan bantuan emergency kepada para korban berupa, makanan, pakaian dan air bersih;

c) Melakukan kegiatan pencarian dan evakuasi terhadap para korban bencana;

d) Menyiagakan mobil dapur umum lapangan serta personil Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas posko bencana, petugas logistik dan petugas penyelenggara dapur umum lapangan di lokasi bencana.

3) Upaya penanggulangan pasca bencana

a) Melakukan koordinasi penghitungan jumlah kerugian yang timbul akibat bencana yang terjadi, dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b) Menyalurkan bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) bagi para korban bencana;

c) Menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada korban bencana.

4.6 Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Sasaran	Realisasi tahun 2022	Capaian
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten /Kota	100 %	16.000	16.167	101,04%
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %	72	72	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %	0	0	0,00%
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	57	57	100,00%
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %	0	0	0,00%

C. Alokasi Anggaran

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi
Belanja Operasi	3.636.709.658	3.349.272.904
Belanja Modal	53.246.700	53.130.000
	3.689.956.358	3.402.402.904

D. Dukungan Personil

- Jumlah pegawai menurut golongan / pangkat

No	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNSD	1
2.	II	PNSD	5
3.	III	PNSD	16
4.	IV	PNSD	6
Jumlah			28

- Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Tahun Anggaran 2021

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Magister (S2)	PNSD	1
2.	Strata 1 (S1)	PNSD	14
3.	SMA / SMK	PNSD	12
4.	SMP	PNSD	1
Jumlah			28

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai adalah tanggungjawab Dinas Sosial sebagai Leading Sector. Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menangani masalah ini, tidak semua masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai dapat teratasi.

2. Solusi

   Dinas Sosial Kabupaten Manggarai memprioritaskan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara bertahap dengan menyesuaikan alokasi anggaran pada tahun berjalan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran singkat tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama Tahun 2022.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Manggarai pada masa yang akan datang.

Ruteng, 20 Maret 2023

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

"Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing"

"Cama Lewang Ngger Pe'ang, Cama Po'e Ngger One"